



WORLD BANK GROUP

Indonesia  
Kerangka Kerja Kemitraan Negara  
TA2016-2020

# Kajian Kinerja dan Pembelajaran

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized



TANGGAL KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA YANG TERAKHIR  
1 Desember 2015

TAHUN ANGGARAN  
1 Januari – 31 Desember

NILAI TUKAR MATA UANG  
Rp 14.929 = \$1,00 (28 September 2018)

©2018 The World Bank Group, Indonesia

## HAK DAN IZIN

Materi dalam karya ini tunduk pada hak cipta. Karena Bank Dunia mendorong untuk membagikan pengetahuannya, maka karya ini dapat direproduksi, baik keseluruhan atau sebagian, untuk tujuan non-komersial, sepanjang atribusi sepenuhnya diberikan kepada karya ini. Setiap pertanyaan mengenai hak dan lisensi, termasuk hak-hak anak perusahaan, harus dialamatkan kepada World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; e-mail: [pubrights@worldbank.org](mailto:pubrights@worldbank.org).

Diterbitkan oleh:  
Grup Bank Dunia  
Kantor Perwakilan Indonesia

[www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id)

Foto sampul: Atet / World Bank  
Kredit Foto: Atet / World Bank, Achmad / World Bank, Jerry Kurniawan / World Bank,  
Ruby Mangunsong / World Bank, Rio Lecatompessy / Unsplash

Dicetak dan dibundel di Indonesia

INDONESIA  
KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA  
TA 2016 - 2020

# Kajian Kinerja dan Pembelajaran



Victoria Kwakwa, *Wakil Presiden*  
Rodrigo Chaves, *Direktur*  
Rolande Pryce, *Ketua Tim Tugas*

Snezana Stoiljkovic, *Wakil Presiden*  
Vivek Pathak, *Direktur*  
Azam Khan, *Ketua Tim Tugas*

Keiko Honda, *Wakil Presiden*  
Merli Baroudi, *Direktur*  
Sandro Diez-Amigo, *Ketua Tim Tugas*  
Gero Verheyen, *Ketua Tim Tugas*

# Ucapan Terima Kasih

Kajian Kinerja dan Pembelajaran (PLR) dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia (CPF) TA16-20 ini disusun oleh Tim Grup Bank Dunia yang diketuai oleh Rolande Pryce (IBRD TTL), Azam Khan (IFC co-TTL) serta Sandro Diez-Amigo dan Gero Verheyen (MIGA co-TTLs) dan yang beranggotakan Steisianasari Mileiva, Jana Halida Uno, Noviarisa Sjailendra, Ipek Alkan, Rafael Dominguez, Andreas Sylverius, Gene Li Gwee dan Dewi Sutisna (anggota tim inti).

Tim mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan dalam penyusunan laporan ini oleh Frederico Gil Sander, Camilla Holmemo, Taimur Samad, Yongmei Zhou, serta rekan-rekan penelaah Luc Lecuit dan Ogo-Oluwa Oluwatoyin Jagha.

Kami ingin berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan atas kerja sama yang sangat baik dalam penyusunan strategi ini. Selanjutnya, laporan ini juga memanfaatkan hasil pembahasan dengan, dan masukan tertulis dari, rekan-rekan lain di tim – yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu – dan kami sangat berterima kasih atas semuanya itu.

---

## TUJUAN GRUP BANK DUNIA

---

### Mengentaskan Kemiskinan di tahun 2030

Dengan mengurangi proporsi populasi global yang hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari

### Memperluas Kesejahteraan Bersama

Dengan menaikkan pendapatan rakyat yang berada di 40 persen lapisan terbawah di setiap negara

---





# Daftar Isi

Bab 1.

## **PENDAHULUAN** 1

Bab 2.

## **PERUBAHAN UTAMA DALAM KONTEKS NEGARA** 3

Perubahan pada Pengentasan Kemiskinan dan Kemakmuran Bersama	3
Perubahan dalam Perkembangan Utama Ekonomi Makro dan Utang	6
Lingkungan Politik	9

Bab 3.

## **RINGKASAN PELAKSANAAN PROGRAM** 11

Kinerja Portofolio	11
Perkembangan Kemitraan dan Peningkatan Pembiayaan	13
Kemajuan untuk Mencapai Tujuan CPF	15

Bab 4.

## **PELAJARAN YANG DIPETIK** 27

Bab 5.

## **PENYESUAIAN KERANGKA KEMITRAAN NEGARA** 29

Program Indikatif Grup Bank Dunia	31
-----------------------------------	----

Bab 6.

## **RISIKO TERHADAP PROGRAM CPF** 35

Lampiran 1: Kerangka Hasil CPF yang Diperbaharui	38
Lampiran 2. Rencana dan Realisasi Pembiayaan IBRD TA16-20	64
Lampiran 3. Indikator Kunci Ekonomi Makro	68

# Singkatan dan Akronim

ADB	Bank Pembangunan Asia ( <i>Asian Development Bank</i> )	DPL/DPF	Pinjaman/Pembiayaan Kebijakan Pembangunan ( <i>Development Policy Loan/Financing</i> )
AFD	Bank Pembangunan Perancis ( <i>Agence Française de Développement</i> )	DPO	Operasi Kebijakan Pembangunan ( <i>Development Policy Operation</i> )
AIIB	Bank Investasi Infrastruktur Asia ( <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i> )	ECA	Lembaga Kredit Ekspor ( <i>Export Credit Agency</i> )
ASA	Layanan Konsultasi dan Analisis ( <i>Advisory Services and Analytics</i> )	EDGE	Keunggulan Desain untuk Efisiensi Lebih Besar ( <i>Excellence in Design for Greater Efficiencies</i> )
ASEAN	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ( <i>Association of Southeast Asian Nations</i> )	EFC	Kesalahan, Kecurangan dan Korupsi ( <i>Error, Fraud, and Corruption</i> )
APBN	Anggaran Pendapatan and Belanja Negara	ENV	Lingkungan dan Sumber Daya Alam ( <i>Environment and Natural Resources</i> )
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	FDI	Investasi Langsung Asing ( <i>Foreign Direct Investment</i> )
BBM	Bahan Bakar Minyak	FIP	Program Investasi Kehutanan ( <i>Forest Investment Program</i> )
BEPS	Erosi Basis Pajak dan Perpindahan Keuntungan ( <i>Base Erosion and Profit Shifting</i> )	GEF	Fasilitas Lingkungan Global ( <i>Global Environment Facility</i> )
BI	Bank Indonesia	GP	Praktek Global ( <i>Global Practice</i> )
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	GRK	Gas Rumah Kaca
CIF	Dana Investasi Iklim ( <i>Climate Investment Funds</i> )	GSURR	Pertanian, Sosial, Perkotaan, Pedesaan dan Ketahanan ( <i>Agriculture, Social, Urban, Rural, and Resilience</i> )
COD	Tanggal Operasional Komersial ( <i>Commercial Operation Date</i> )	IBRD	Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan ( <i>International Bank for Reconstruction and Development</i> )
COP	Konferensi Para Pihak ( <i>Conference of the Parties</i> )	ICB	Lelang Kompetitif Internasional ( <i>International Competitive Bidding</i> )
CPF	Kerangka Kerja Kemitraan Negara ( <i>Country Partnership Framework</i> )	IsDB	Bank Pembangunan Islam ( <i>Islamic Development Bank</i> )
CPPR	Ulasan Portofolio dan Kinerja Negara ( <i>Country Portfolio and Performance Review</i> )	IFC	Korporasi Keuangan Internasional ( <i>International Finance Corporation</i> )
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil ( <i>Civil Society Organization</i> )	IIF	Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia ( <i>Indonesia Infrastructure Finance Facility</i> )
CTF	Pendanaan Teknologi Iklim ( <i>Climate Technology Funding</i> )	IIGF	Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia ( <i>Indonesia Infrastructure Guarantee Fund</i> )
DAK	Dana Alokasi Khusus	IPF	Pembiayaan Proyek Investasi ( <i>Investment Project Financing</i> )
DFAT	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia ( <i>Australian Department of Foreign Affairs and Trade</i> )	IPP	Produsen Listrik Mandiri ( <i>Independent Power Producer</i> )
DGM	Mekanisme Hibah Khusus ( <i>Dedicated Grant Mechanism</i> )	ISR	Laporan Status dan Hasil Pelaksanaan ( <i>Implementation Status and Results Report</i> )
DNI	Daftar Negatif Investasi		
DOISP	Proyek Perbaikan dan Keselamatan Operasional Bendungan ( <i>Dam Operational Improvement and Safety Project</i> )		



Kemendes	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PERISAI	Program untuk Ketahanan Ekonomi, Investasi dan Bantuan Sosial ( <i>Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance</i> )
PDPT			
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
Kemenkeu	Kementerian Keuangan	PFM	Manajemen Keuangan Publik ( <i>Public Financial Management</i> )
Kemenko	Kementerian Koordinator		
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan	PforR	Program untuk Hasil ( <i>Program for Results</i> )
Kemensos	Kementerian Sosial		
KfW	Bank Pembangunan Jerman ( <i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i> )	PKH	Program Keluarga Harapan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PLN	Perusahaan Listrik Negara
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PLR	Kajian Kinerja dan Pembelajaran ( <i>Performance and Learning Review</i> )
KUR	Kredit Usaha Rakyat	PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
MCA-I	<i>Millennium Challenge Account-Indonesia</i>	PPP	Kemitraan Publik-Swasta ( <i>Public-Private Partnership</i> )
MFD	Pendekatan Maksimalisasi Pembiayaan untuk Pembangunan ( <i>Maximizing Finance for Development</i> )	Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
MIGA	Lembaga Penjamin Investasi Multilateral ( <i>Multilateral Investment Guarantee Agency</i> )	QSDS	Survei Layanan Kuantitatif ( <i>Quantitative Service Delivery Survey</i> )
Migas	Minyak dan gas	REDD+	Program Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi ( <i>Program to Reduce Emissions from Deforestation and Degradation</i> )
NHFO	<i>Non-Honoring of Financial Obligation</i> (Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Keuangan)	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
NSUP	Program Penataan Kawasan Kumuh Nasional ( <i>National Slum Upgrading Program</i> )	SCD	Diagnostik Negara Sistematis ( <i>Systematic Country Diagnostic</i> )
OECD	Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ( <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> )	SIAP	Rencana Aksi Perbaikan Kawasan Kumuh ( <i>Slum Improvement Action Plan</i> )
PAD	Dokumen Penilaian Proyek ( <i>Project Appraisal Document</i> )	SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	SORT	Alat Pemeringkat Risiko Operasional Sistematis ( <i>Systematic Operations Risk-Rating Tool</i> )
PAMSIMAS	Proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
PCG	Jaminan Kredit Parsial ( <i>Partial Credit Guarantee</i> )	UHC	Cakupan Kesehatan Universal ( <i>Universal Health Coverage</i> )
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	UKM	Usaha Kecil dan Menengah
PDB	Pertumbuhan Domestik Bruto	UMKM	Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah
PDO	Tujuan Pengembangan Proyek ( <i>Project Development Objective</i> )	USAID	Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat ( <i>U.S. Agency for International Development</i> )
PELINDO	PT. Pelabuhan Indonesia	WISMP	Program Pengelolaan Sektor Sumber Air Bersih dan Irigasi ( <i>Water Resources and Irrigation Sector Management Program</i> )
Pemilu	Pemilihan Umum	YOY	Tahun-ke-tahun ( <i>Year-over-Year</i> )
		\$	Dolar Amerika Serikat



# Pendahuluan

**Kajian Kinerja dan Pembelajaran (*Performance Learning Review, PLR*) ini menilai kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dalam pelaksanaan Kerangka Kerja Kemitraan Negara Grup Bank Dunia (*Country Partnership Framework, CPF*) untuk Republik Indonesia, yang dibahas oleh Dewan Direksi Eksekutif pada bulan Desember 2015.** CPF disusun berdasarkan jalur-jalur (*pathways*) yang diidentifikasi dalam Diagnostik Negara Sistematis (*Systematic Country Diagnostic, SCD*)<sup>1</sup> untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran bersama, dan diselaraskan dengan prioritas-prioritas pemerintah. CPF menjabarkan program lima tahunan yang ambisius dan berfokus pada enam bidang kerjasama (*engagement area*) sebagai berikut: 1: Platform Infrastruktur di Tingkat Nasional, 2: Energi Berkelanjutan dan Akses Universal, 3: Perekonomian dan Konektivitas Maritim, 4: Penyelenggaraan Pelayanan dan Infrastruktur di Daerah, 5: Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, dan 6: Meningkatkan Pendapatan dan Membelanjakannya dengan Lebih Baik. Dua balok pendukung (*supporting beam*): 1: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta – Investasi, Iklim Usaha dan Fungsi Pasar, dan 2: Kemakmuran Bersama, Pemerataan dan Inklusi, membantu memberikan landasan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan bidang-bidang kerjasama di atas dengan efisien dan efektif. PLR ini memperkenalkan beberapa perubahan program CPF untuk merespons kondisi di Indonesia yang dinamis, pengalaman dalam pelaksanaan, dan pembelajaran yang diperoleh sampai saat ini.

**Pelaksanaan program CPF diperkirakan akan mencapai tujuan-tujuan ambisius yang diidentifikasi dalam CPF meski ada keterlambatan dan perubahan keadaan sehingga membutuhkan revisi.** Dari 18 tujuan yang

diidentifikasi dalam Kerangka Hasil (*Results Framework*) CPF, 1 tujuan telah tercapai, 14 tujuan diperkirakan akan dicapai pada akhir periode CPF, dan 3 tujuan telah direvisi, baik berupa pembatalan atau penggabungan. Dalam 3 tahun pertama pelaksanaan CPF, Grup Bank Dunia telah menyelenggarakan program yang kuat dan beragam sesuai dengan lingkup dan target dalam CPF. Salah satu ciri khas dari program Grup Bank Dunia di Indonesia adalah kuatnya upaya untuk memberikan solusi pembangunan multisektoral, yang telah menghasilkan kolaborasi lintas Praktek Global (*Global Practice, GP*) dan 'Satu Kesatuan Grup Bank Dunia' (*One World Bank Group*). Luas dan dalamnya kerjasama Grup Bank Dunia dan keberhasilan pelaksanaan CPF tidak mungkin tercapai tanpa kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara Grup Bank Dunia dengan mitra-mitra bilateral dan multilateral. Upaya-upaya pengelolaan portofolio secara proaktif selama periode pelaksanaan CPF telah meningkatkan kinerja portofolio, yang menghasilkan portofolio IBRD yang sehat dan menunjukkan perbaikan yang nyata dalam pencairan dana, proaktivitas dan risiko sejak akhir TA15.

**CPF tetap merupakan kerangka yang efektif untuk kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah. Meskipun PLR menegaskan relevansi enam bidang kerjasama dan dua balok pendukung, program CPF telah mengalami sedikit penyesuaian.** Penyesuaian tersebut mencerminkan peningkatan prioritas dan kebutuhan pembangunan manusia, memaksimalkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan lebih berfokus untuk mendukung program nasional dan pinjaman berbasis kinerja, serta kendala-kendala ekonomi politik di sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dibandingkan dengan situasi ketika CPF dipersiapkan.

<sup>1</sup> Diagnostik Negara Sistematis: Menghubungkan 40 Persen Masyarakat Terbawah dengan Penciptaan Kemakmuran, 2015.



# Perubahan Utama Dalam Konteks Negara

## Perubahan pada Pengentasan Kemiskinan dan Kemakmuran Bersama

Indonesia terus membuat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan menjadi satu digit untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Pada bulan Maret 2015, angka kemiskinan Indonesia mencapai 11,2 persen, lalu secara bertahap turun menjadi 10,9 persen pada tahun 2016, 10,6 persen pada tahun 2017 dan 9,8 persen pada bulan Maret 2018. Jumlah penduduk miskin juga turun dari 28,6 juta jiwa menjadi 26,0 juta jiwa dalam periode yang sama. Penurunan pada tahun lalu adalah penurunan tahunan (*year-on-year/yo*y) terbesar sejak Maret 2011. Hal ini sebagian disebabkan oleh perluasan program bantuan sosial baru-baru ini yang telah membantu menurunkan angka kemiskinan kronis dan juga disebabkan oleh kondisi pasar tenaga kerja yang cenderung meningkat dengan angka penyerapan tenaga kerja yang mencapai tingkat tertinggi selama dua dekade terakhir sebesar 65,7 persen pada bulan Februari 2018, disertai dengan menurunnya angka pengangguran yang mencapai tingkat terendah selama 18 tahun terakhir sebesar 5,1 persen.

**Tabel 1**  
Besaran Konsumsi Nasional, Persentase

Periode	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas
Maret 2016	17,1	34,7	48,2
Maret 2017	17,1	36,5	46,4
Maret 2018	17,3	36,6	46,1
Δ 2016–2018	+0,2	+1,9	-2,1

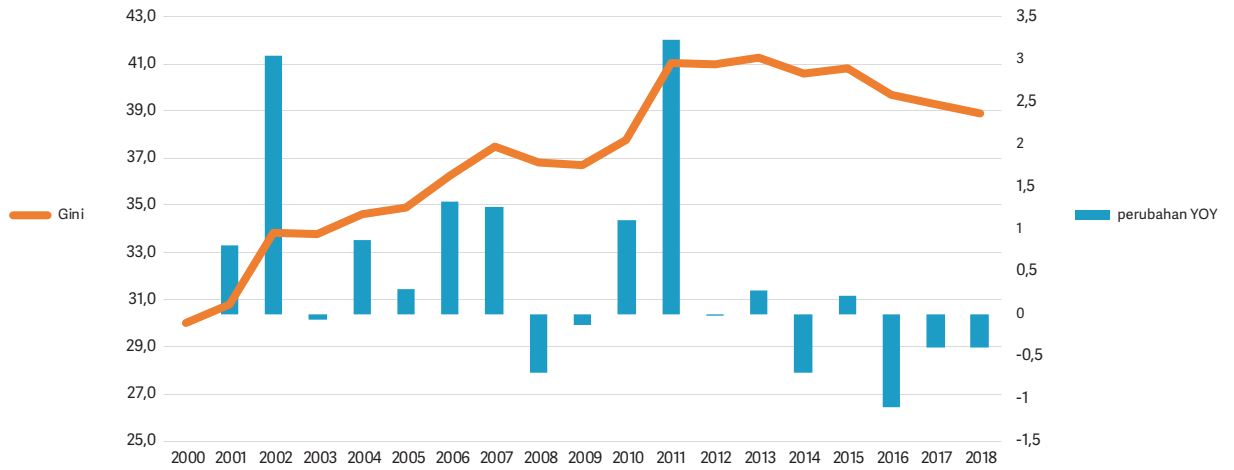
Sumber: SUSENAS

Ketimpangan mulai berkurang setelah beberapa tahun hampir stagnan, yang disebabkan oleh sejumlah perbaikan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah dan menengah. Setelah periode peningkatan yang panjang dari tahun 2000 sampai 2011, koefisien Gini untuk konsumsi—suatu ukuran ketimpangan yang umum digunakan di Indonesia—turun dari puncaknya sebesar 41 pada tahun 2014 menjadi 38,9 pada tahun 2018 (lihat Gambar 1). Penurunan koefisien Gini disebabkan oleh perbaikan distribusi konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah (Kuintil 1 dan 2) dan 40 persen menengah (Kuintil 3 dan 4). Besaran konsumsi nasional dari kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah naik masing-masing sebesar 0,2 poin persentase dan 1,9 poin persentase, dengan mengorbankan kelompok 20 persen teratas (Kuintil 5) (lihat Tabel 1). Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua penduduk Indonesia, mempermudah akses semua orang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, memperkuat ketahanan terhadap guncangan dan membuat kebijakan fiskal yang lebih inklusif, Indonesia akan terbantu untuk mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengahnya untuk menurunkan koefisien Gini menjadi 36 pada tahun 2019.

Meskipun ada kemajuan, satu dari lima orang Indonesia masih rentan terhadap kemiskinan dan dua dari lima orang Indonesia tidak mempunyai keamanan ekonomi untuk menjadi bagian dari kelas menengah yang berkembang pesat di Indonesia.<sup>2</sup> Kelas menengah Indonesia—yang didefinisikan sebagai kelompok dengan keamanan ekonomi yang memadai sehingga memiliki risiko minimal untuk menjadi rentan jatuh miskin—telah meningkat dari sekitar 7 persen jumlah penduduk pada tahun 2002 menjadi 20 persen pada

<sup>2</sup> Bank Dunia. 2018. Harapan Indonesia: Memperluas Kelas Menengah, akan terbit

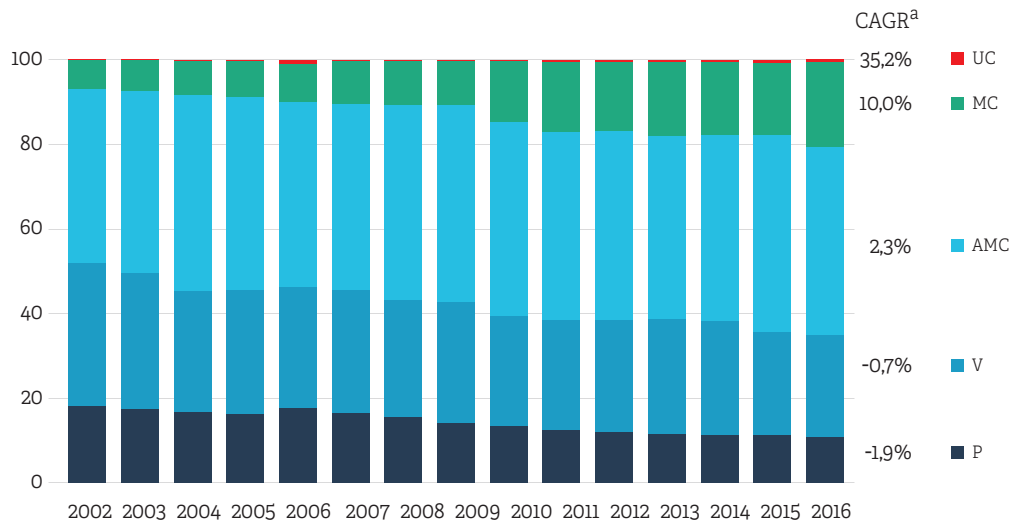
**Gambar 1**  
Koefisien Gini, Nilai; Perubahan Gini, Nilai



Sumber: SUSENAS

Catatan: YOY = tahun ke tahun. Data untuk beberapa tahun terakhir (2011-2018) berdasarkan pada survei SUSENAS bulan Maret

**Gambar 2**  
Distribusi Konsumsi berdasarkan Kelas, 2002–2016 (Persentase Penduduk)



Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia; lihat laporan 'Harapan Indonesia: Memperluas Kelas Menengah' 2018 untuk definisi dan lain-lain.

Catatan: a. CAGR adalah angka pertumbuhan tahunan gabungan dari tahun 2002 sampai 2016. Kategori kelas terdiri dari: miskin (poor/P), rentan (vulnerable/V), kelas menengah harapan (aspiring middle class/AMC), kelas menengah (middle class/MC), dan kelas atas (upper class/UC).

tahun 2016. Dengan angka pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 10 persen dalam periode ini, kelas menengah menjadi segmen penduduk utama yang bertumbuh paling pesat, kecuali kelas atas yang bertumbuh lebih cepat sekalipun dari basis yang jauh lebih rendah. Namun, dua dari lima orang Indonesia masih berada dalam kelompok kelas menengah harapan (*aspiring middle class*), dan satu dari lima orang Indonesia masih sangat rentan jatuh miskin. Menerjemahkan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan selama dua dekade terakhir menjadi terbentuknya kelas menengah yang besar dan dinamis merupakan aspek penting bagi aspirasi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan kantong-kantong kemiskinan kronis yang sudah ada sejak lama, maupun kebijakan yang dapat membantu masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan untuk melindungi hasil-hasil yang dicapai dan membuat mereka semakin produktif dalam melakukan kegiatan ekonomi dan berkontribusi untuk perekonomian.

**Tingkat urbanisasi Indonesia yang berkembang pesat merupakan aspek penting lain bagi kebijakan di masa mendatang untuk mengurangi kemiskinan dan membangun kemakmuran bersama.** Sekalipun angka kemiskinan telah menurun lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di wilayah pedesaan yang mencapai 13,2 persen pada bulan Maret 2018, masih tetap lebih tinggi daripada angka kemiskinan di wilayah perkotaan (7,0 persen). Akan tetapi, keadaan ini bisa berubah dalam waktu dekat. Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah bertumbuh dari 17 persen pada tahun 1970 menjadi 54 persen pada tahun 2016 sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tercepat di dunia. Hasil proyeksi jumlah penduduk memperlihatkan bahwa 58 persen penduduk miskin di Indonesia akan berada di wilayah perkotaan pada tahun 2025. Akan tetapi, Indonesia belum dapat memanfaatkan urbanisasi sebaik negara-negara lain di kawasan regional. Keberhasilan dalam menikmati manfaat kolektif dari urbanisasi dengan meminimalkan dampak negatifnya seperti kemacetan lalu lintas, polusi dan kerentanan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh pembangunan tak terkendali di daerah-daerah yang berisiko, akan membantu Indonesia untuk mempertahankan dan memperkuat keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bersama.



---

Menerjemahkan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan selama dua dekade terakhir menjadi terbentuknya kelas menengah yang besar dan dinamis merupakan aspek penting bagi aspirasi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi.

---

**Investasi pada modal manusia sangat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan dan mempercepat pengurangan kemiskinan.** Meskipun terdapat belanja dan perbaikan yang signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara setara lain dalam hal kualitas pelayanan dan hasil-hasil modal manusia. *Stunting* (tubuh kerdil) adalah salah satu tantangan kebijakan publik yang paling mendesak, sedangkan tingkat pembelajaran di sekolah termasuk yang terendah di Asia Timur. Peningkatan efisiensi belanja dan dampak investasi di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan merupakan prioritas penting dalam agenda pembangunan Indonesia dan akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa 2 juta orang yang baru memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun turut menyumbang kepada pertumbuhan masa depan Indonesia.

## Perubahan dalam Perkembangan Utama Ekonomi Makro dan Utang

**Fundamental ekonomi dan kerangka kebijakan ekonomi makro telah diperkuat secara substansial sejak tahun 2013.** Pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya sekitar 5 persen dari tahun ke tahun sejak 2016, dan defisit transaksi berjalan telah berkurang mencapai tingkat terendah dalam enam tahun terakhir sebesar 1,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2017 dan 2,3 persen pada pertengahan kedua tahun 2018, dari 2,9 persen pada tahun 2013. Harga-harga komoditas yang terus pulih, khususnya batubara, secara bertahap telah mengangkat nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) Indonesia. Inflasi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 3–5 persen, dibandingkan dengan 5,2 persen pada tahun 2013. Kebijakan fiskal telah menjadi lebih efektif – dengan belanja subsidi BBM yang direalokasikan untuk infrastruktur – sedangkan kredibilitas telah meningkat karena anggaran belanja 2018 tidak mengalami perubahan. Karena menunjukkan perbaikan fundamental ekonomi makro, maka *Standard and Poor's* menaikkan peringkat obligasi internasional Indonesia (*sovereign bond*) menjadi layak investasi (*investment grade*) pada bulan Mei 2017, sedangkan

*Fitch* dan Lembaga Pemeringkat Kredit Jepang memberikan kenaikan peringkat serupa masing-masing pada bulan Desember 2017 dan Februari 2018. Indonesia sekarang dinilai layak investasi oleh semua lembaga pemeringkat internasional utama. Lihat Lampiran 3 untuk uraian lebih lanjut mengenai Indikator Kunci Ekonomi Makro Indonesia.

**Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir berhasil mempertahankan momentumnya dengan dukungan konsumsi swasta yang sehat, investasi yang lebih kuat dan pemulihan sektor eksternal.** Realisasi pertumbuhan PDB mencapai rata-rata 5,1 persen tahun ke tahun sejak 2015. Meskipun relatif kuat, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan yang tercatat pada awal dekade, karena perekonomian terus menyesuaikan dengan harga komoditas global yang lebih rendah dalam kerangka ekonomi makro yang konsisten – misalnya, pertumbuhan kredit masih belum terlalu besar (6,6 persen pada tahun 2018), dan nilai tukar tidak diperbolehkan untuk apresiasi pada tahun 2017 meskipun ada tekanan dari masuknya arus modal.

**Prospek pertumbuhan masih tetap kuat di mana pertumbuhan PDB diproyeksikan akan mencapai rata-rata 5,3 persen dalam jangka menengah.** Yang mendasari sedikit peningkatan pertumbuhan ini adalah menguatnya permintaan domestik yang mempercepat pertumbuhan investasi, harga-harga komoditas yang mendukung, dan pasar tenaga kerja yang kuat. Akan tetapi, nilai ekspor netto akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan mitra-mitra perdagangan utama melambat dan impor barang modal meningkat bersamaan dengan masuknya investasi.

**Pertumbuhan konsumsi swasta masih stabil di kisaran 5 persen tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir dan akan tetap menjadi dasar pertumbuhan secara keseluruhan.** Pasar tenaga kerja yang kuat – sebagaimana dibuktikan dengan angka penyerapan tenaga kerja yang mencapai tingkat tertinggi dari yang pernah ada – angka inflasi yang rendah dan stabil, serta pertumbuhan pertanian dan pertambangan telah mendukung pertumbuhan konsumsi.

**Tingkat inflasi berkurang setelah tahun 2015 dan mencapai titik terendah pada tahun 2016, sebelum naik sedikit pada tahun 2017 ketika terjadi kenaikan tarif listrik.** Inflasi rata-rata mencapai 3,5 persen tahun ke tahun pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh harga beras dan harga BBM yang stabil. Pada tahun 2017,



tingkat inflasi secara umum (*headline inflation*) naik menjadi 3,8 persen, terutama akibat kenaikan tarif listrik pada bulan Januari, Maret dan Mei. Akan tetapi, inflasi harga pangan yang terus menurun, hingga mencapai 2,1 persen pada tahun 2017 dari 6,7 persen pada tahun 2016, turut meredam dampak kenaikan tarif listrik yang terjadi sehingga inflasi tahunan mendekati batas bawah kisaran inflasi yang ditargetkan BI sebesar 3-5 persen.

#### **Tingkat investasi mengalami pertumbuhan yang kuat dan lebih cepat dalam beberapa triwulan terakhir bersamaan dengan kenaikan harga-harga komoditas.**

Formasi modal tetap bruto pada triwulan ke-2 tahun 2018 mencapai 9 persen tahun ke tahun meskipun terjadi penurunan investasi konstruksi, yang sebagian disebabkan oleh masa liburan Idul Fitri. Momentum pertumbuhan investasi telah didukung oleh harga komoditas, dorongan infrastruktur pemerintah, dan beberapa perbaikan iklim investasi, seperti pengurangan cakupan sektoral di Daftar Negatif Investasi (DNI) antara tahun 2014 dan 2016. Investasi langsung asing (FDI) dengan arus masuk netto terbesar dalam lebih dari tujuh tahun terakhir juga tercatat terjadi pada triwulan ke-3 tahun 2017, meskipun persentasenya terhadap PDB masih lebih rendah daripada banyak negara setara lain di kawasan regional karena tingginya tingkat pembatasan FDI di Indonesia.

**Pertumbuhan ekspor dan impor mengalami pemulihan seiring terus membaiknya harga-harga komoditas dan menguatnya perdagangan global.** Volume ekspor meningkat 7,7 persen tahun ke tahun dan volume impor meningkat 15,2 persen pada triwulan ke-2 tahun 2018. Pemulihan harga-harga komoditas menaikkan nilai tukar perdagangan Indonesia melalui enam komoditas unggulan, yaitu minyak mentah, minyak sawit mentah, karet, batubara, logam dasar dan gas alam cair. Pemulihan kegiatan ekspor dimulai pada akhir tahun 2016 dan terutama didorong oleh kenaikan permintaan luar negeri untuk batubara, minyak sawit, komoditas olahan, dan produk-produk manufaktur seperti kendaraan serta produk-produk karet dan kimia. Demikian pula, pemulihan kegiatan impor dimulai pada akhir tahun 2016, dan didorong oleh barang-barang non-migas, khususnya bahan mentah dan barang-barang modal.

**Posisi eksternal Indonesia secara umum semakin kuat sejak tahun 2013 meskipun terjadi pelebaran defisit transaksi berjalan yang dipicu oleh investasi pada tahun 2018.** Pada tahun 2017, defisit transaksi berjalan

berkurang, dan arus portofolio meningkat. Penurunan defisit transaksi berjalan dari 2,9 persen pada tahun 2013 menjadi 2,0 persen PDB pada tahun 2015 dan 1,7 persen PDB pada tahun 2017 didorong oleh kenaikan surplus perdagangan; demikian pula, peningkatan defisit transaksi pada pertengahan ke-1 tahun 2018 didorong oleh penurunan surplus perdagangan, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan impor barang modal dan barang setengah jadi, tetapi juga mencerminkan tantangan Indonesia dalam meningkatkan ekspor sesuai dengan permintaan global yang lebih kuat. Surplus neraca keuangan (*financial account surplus*) meningkat pada tahun 2017 menjadi 2,9 persen PDB dari 1,1 persen pada tahun 2015. Arus masuk yang signifikan terjadi baik untuk FDI maupun investasi portofolio, khususnya untuk obligasi pemerintah. Mengingat menyempitnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus keuangan, maka BI telah mengakumulasi cadangan devisa untuk mencegah apresiasi mata uang secara berlebihan. Utang eksternal rendah yaitu sebesar 35 persen PDB. Utang eksternal dari sektor swasta non-keuangan mencapai 15 persen PDB, dan sejak tahun 2014, perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap jumlah yang signifikan dari utang mata uang asing yang jatuh tempo.

#### **Efisiensi dan kredibilitas kebijakan fiskal telah meningkat.**

Pada tahun 2017, Indonesia mempunyai kinerja fiskal yang kuat, dengan mengumpulkan lebih banyak pendapatan, terutama dari pajak pertambahan nilai dan pendapatan yang berkaitan dengan migas. Realisasi belanja pada tahun 2017 juga terus mencerminkan peningkatan kualitas belanja dengan belanja material, modal dan sosial yang lebih tinggi, sedangkan belanja subsidi terus berkurang sejalan dengan kenaikan tarif listrik. Tidak ada perubahan pada APBN 2018, di mana hal ini mencerminkan peningkatan kredibilitas terhadap proses anggaran.

#### **Harga aset Indonesia mengalami tekanan pada triwulan ke-2 dan ke-3 tahun 2018 karena adanya gejolak eksternal.**

Seiring dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan seiring meningkatnya ketidakpastian karena 'perang dagang' dan kekhawatiran terdampak dari pasar-pasar berkembang yang lebih rentan, maka arus portofolio mengalami penurunan. Mengingat Indonesia mempunyai tingkat struktural investasi langsung asing (FDI) yang rendah sehingga tidak cukup untuk menutupi defisit transaksi berjalan yang melebar maupun pasar keuangan yang terbatas,

maka tekanan arus modal telah menimbulkan depresiasi mata uang (sekitar 10 persen selama tahun berjalan), penipisan cadangan devisa (meskipun nilai cadangan masih berada di atas ketentuan kecukupan Dana Moneter Internasional/IMF), dan pembayaran imbal hasil obligasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kinerja harga saham dan mata uang Indonesia masih sejajar dengan negara-negara berkembang lain, yang mencerminkan respons kebijakan yang kuat dan terkoordinasi oleh pihak yang berwenang.

**Kerangka kebijakan ekonomi makro yang diperkuat menjadi pelindung dari tekanan eksternal.** Kerangka kebijakan ekonomi makro Indonesia telah menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan masa *Taper Tantrum* dan Krisis Keuangan Asia (lihat Tabel 2). Dimulai dari tingkat tertinggi di awal tahun, cadangan devisa masih sehat dan mampu membiayai impor selama 8,7 bulan. Meskipun ada intervensi untuk meminimalkan gejolak, BI telah menghemat cadangan devisa dengan membiarkan terjadinya depresiasi berbasis pasar ketimbang mengendalikan mata uang melalui kurs tetap seperti yang pernah dilakukannya pada tahun 1997. Kebijakan moneter juga telah diperketat untuk mempertahankan perbedaan tingkat suku bunga dengan Amerika Serikat dalam rangka meredam arus modal keluar. Demikian pula, kebijakan fiskal lebih hati-hati; defisit dan tingkat utang tetap rendah dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Utang pemerintah mencapai kurang dari separuh ambang batas undang-undang 60 persen PDB, di mana 57 persennya menggunakan mata uang

lokal (Rupiah). Pada saat yang sama, sektor perbankan dan keuangan masih sehat; pertumbuhan kredit terus meningkat tetapi tetap terkendali, dan bank-bank mempunyai modal yang cukup dengan hanya sedikit kredit bermasalah. Peraturan makroprudensial yang dilaksanakan sejak tahun 2013 telah mengurangi risiko tekanan pada neraca perusahaan. Selain itu, pemerintah mempunyai akses ke sekitar \$250 miliar dalam dana cadangan dan berbagai fasilitas pinjaman bilateral dan multilateral, yang besarnya mencapai sekitar 10 kali defisit transaksi berjalan tahunan.

**Komitmen pihak berwenang untuk menjaga stabilitas meningkatkan ketahanan terhadap gejolak aliran modal, tetapi pengetatan kebijakan dapat menghambat pertumbuhan.** Suku bunga acuan/kebijakan meningkat sebesar 125 basis poin (bps) selama tahun berjalan meskipun tingkat inflasi sudah sesuai target, dan defisit anggaran menurun pada tahun 2018 dan 2019. Depresiasi mata uang berlangsung dengan tertib dan akan mendukung penyesuaian neraca transaksi berjalan. Ketika kondisi perekonomian dan inflasi di Amerika Serikat mulai menguat, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat bukan hanya akan berlanjut melainkan juga bisa lebih cepat. Oleh karena itu, ada risiko bahwa tekanan aliran modal keluar bisa semakin kuat. Dalam menghadapi percepatan aliran modal keluar, pemerintah mungkin perlu lebih memperketat kebijakan moneter maupun fiskal untuk membendung aliran modal keluar, yang membebani pertumbuhan dalam jangka pendek dan menengah.

**Tabel 2**

Perbandingan indikator ekonomi makro tertentu, Indonesia Dulu dan Sekarang

	September 2018	Taper Tantrum (2013)	Krisis Keuangan Asia (1998)
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,1	6,0	7,9
Pertumbuhan kredit (% yoy)	8,7	23,5	..
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)	-2,3	-3,0	-2,7
Cadangan devisa (berapa bulan impor barang)	8,7	6,9	..
Utang Eksternal (% PDB)	33,0	32,9	62,1
Inflasi (% yoy)	3,4	4,2	5,2

Sumber: BPS, BI melalui CEIC; IIF

Catatan: Periode *Taper Tantrum* dimulai bulan Mei 2013 sedangkan periode Krisis Keuangan Asia dimulai bulan Juli 1997. Variabel bulanan: Pertumbuhan kredit, dana cadangan, inflasi (menggunakan rata-rata 12 bulan sebelum dimulainya peristiwa). Variabel triwulan: Pertumbuhan PDB, Defisit Transaksi Berjalan (menggunakan rata-rata 4 triwulan sebelum dimulainya peristiwa). Variabel tahunan: Keseimbangan fiskal, utang eksternal (menggunakan angka 1 tahun sebelum dimulainya peristiwa). Cadangan dihitung sebagai Cadangan pada tahun  $t$  / Impor Barang pada tahun  $t+1$ . Aset cadangan resmi mencakup cadangan mata uang asing, posisi cadangan IMF, hak penarikan khusus, Emas, dan aset cadangan lain

Tindakan-tindakan baru-baru ini yang ditujukan untuk membatasi impor juga dapat membebani potensi pertumbuhan. Untuk mempermudah impor dan, sebagai hasilnya, memperlambat pelebaran defisit transaksi berjalan, pemerintah telah melaksanakan tindakan-tindakan yang meliputi penyusunan proyek-proyek infrastruktur untuk mengurangi impor barang modal terkait, meningkatkan pajak yang dipungut pihak lain (*withholding tax*) untuk impor barang konsumen, dan melaksanakan tindakan-tindakan pengganti impor. Karena adanya ketimpangan infrastruktur yang signifikan di Indonesia, tindakan-tindakan ini mungkin mempunyai dampak yang tidak diinginkan dengan membebani potensi pertumbuhan dan menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap perekonomian. Menaikkan tarif pajak atas barang konsumen juga bisa berdampak pada kenaikan inflasi yang membebani konsumsi swasta.

## Lingkungan Politik

Indonesia mengantisipasi periode pemilu yang dinamis untuk parlemen maupun presiden yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April 2019. Pilkada gubernur Jakarta diadakan bulan Februari dan April 2017, setelah salah satu kampanye pemilihan yang dianggap paling memecah belah antara gubernur antar-waktu petahana Basuki Purnama (yang biasa dipanggil Ahok) dan mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Masa-masa sebelum pilkada sampai lengsernya Ahok, yang mungkin menjadi gubernur keturunan Tionghoa dan beragama Kristen terpilih pertama jika ia menang, menyoroti profil kelompok-kelompok konservatif keagamaan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan peranan agama dalam politik di Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak oleh separuh dari 34 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota di Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018 memberikan pemahaman sejauh mana kelompok-kelompok konservatif dapat mempengaruhi hasil pemilihan Presiden pada bulan April 2019 nanti, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berupaya mendapatkan masa jabatan untuk kedua kalinya.

Presiden Jokowi terus mendapatkan dukungan masyarakat di tengah-tengah lingkungan eksternal yang menguntungkan dan stabilitas ekonomi makro yang diraihnya. Beberapa reformasi penting dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi, termasuk pengurangan subsidi energi, moratorium pembangunan lahan gambut, perubahan fokus belanja pemerintah kepada sektor-sektor social, dan serangkaian paket kebijakan ekonomi untuk mendorong partisipasi sektor swasta dan investasi asing. Akan tetapi, kemajuan di bidang-bidang lain lebih lambat termasuk perbaikan iklim investasi, percepatan reformasi kelembagaan, peningkatan tata kelola, dan pemberantasan korupsi – isu-isu yang diangkat oleh Jokowi dalam kampanye dan masa jabatan pertamanya, yang tampaknya masih sulit untuk dilaksanakan, khususnya selama musim kampanye menjelang pemilu yang akan datang. Kebijakan-kebijakan yang ada tetap selaras dengan tujuan ganda Grup Bank Dunia dengan terus berfokus pada peningkatan pertumbuhan dalam rangka penanggulangan ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan. Pengembangan modal manusia menjadi semakin terfokus dengan dipromosikannya bantuan pangan non-tunai, program bantuan tunai sebagai upah kerja (*cash-for-work*), dan pengendalian harga, serta pendidikan dan pelatihan kejuruan.

---

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada tetap selaras dengan tujuan ganda Grup Bank Dunia dengan terus berfokus pada peningkatan pertumbuhan dalam rangka penanggulangan ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

---



# Ringkasan Pelaksanaan Program

## Kinerja Portofolio

Setelah 3 tahun pertama pelaksanaan CPF, Grup Bank Dunia telah menyelenggarakan program yang kuat dan beragam. Total persetujuan untuk IBRD di bawah program CPF sampai Juni 2018 bernilai \$5,2 miliar untuk memenuhi kebutuhan 18 pinjaman baru termasuk proyek pertama Bank Dunia yang akan dibiayai bersama (*co-financed*) dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), kegiatan pertama yang menggunakan Program untuk Hasil (PforR) di Indonesia, dan pinjaman langsung pertama Bank Dunia kepada badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia. Hal ini sejalan dengan CPF yang merencanakan pinjaman IBRD sebesar kira-kira \$7,5 miliar selama periode CPF sehingga portofolio aktif<sup>3</sup> mencapai \$6,3 miliar per Juni 2018. Dalam periode yang sama, komitmen Dana Jangka Panjang (LTF) Korporasi Keuangan Internasional (IFC) mencapai \$1,2 miliar (termasuk mobilisasi inti senilai \$704 juta) sehingga portofolio investasi yang dikomitmenkan mencapai \$ 1,84 miliar per 30 Juni 2018. Dalam hal produk-produk pengetahuan dan bantuan teknis (TA), Grup Bank Dunia menyampaikan kepada pemerintah dan masyarakat banyak laporan analisis, misalnya: Kisah Urbanisasi Indonesia (2016); Kajian Belanja Publik Bantuan Sosial (2017); Harapan Indonesia: Memperluas Kelas Menengah (2018); dan Apakah Indonesia Siap Melayani? Analisis Kesiapan Sisi Penawaran Layanan Kesehatan Primer di Indonesia (2018). Grup Bank Dunia mendukung upaya-upaya reformasi yang ambisius dari pemerintah melalui bantuan teknis di berbagai bidang yang meliputi urbanisasi yang berkelanjutan,

perlindungan pekerja, pendidikan, inklusi keuangan, manajemen keuangan publik, lanskap yang berkelanjutan, dan kebijakan pangan. Dialog kebijakan yang sehat dan bersemangat berkaitan erat dengan ruang lingkup Layanan Konsultasi dan Analisis (ASA) yang dihasilkan oleh Grup Bank Dunia. Keterlibatan IFC dalam produk-produk pengetahuan melalui Layanan Konsultasi mencakup 16 proyek dengan dana yang dikelola mencapai \$35,2 juta.

**Portofolio IBRD secara umum sehat dan kinerjanya stabil dengan perbaikan penanganan risiko yang menonjol jika dibandingkan dengan akhir TA15.** Sampai Juni 2018, portofolio terdiri dari 33 proyek, termasuk 28 pinjaman dan 7 hibah dana perwalian/*trust fund* (yang berjumlah \$350 juta), dengan total komitmen sebesar \$6,3 miliar, di mana \$3,6 miliar masih belum dicairkan. Risiko portofolio pada akhir TA15 mencapai sekitar 30 persen dari proyek dan komitmen yang berisiko. Sejak itu, portofolio mengalami perbaikan dengan hanya 15 persen proyek yang berisiko dan 17 persen komitmen yang berisiko di akhir TA18. Rasio pencairan mengalami peningkatan sejak akhir TA15 dari 15 persen menjadi 18,3 persen pada akhir TA18, yang mencapai puncaknya 22,5 persen pada akhir TA17. Tingkat proaktivitas stabil di kisaran 50 persen meskipun pernah mencapai puncaknya 83 persen di akhir TA17.

**Upaya manajemen portofolio yang proaktif selama periode pelaksanaan CPF telah menghasilkan kinerja portofolio yang lebih baik.** Grup Bank Dunia secara aktif melibatkan mitra-mitranya dalam pelaksanaan kerjasama. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia mengangkat isu-isu yang tidak dapat diselesaikan di tingkat teknis ke tingkat menteri apabila diperlukan, untuk memperbaiki persiapan proyek dan mengatasi hambatan pelaksanaan. Pemantauan berkala terhadap risiko portofolio dan kinerja pencairan, dan pelibatan

<sup>3</sup> Komitmen mencakup pinjaman Kebijakan Pembangunan (*Development Policy*) dan PforR dikurangi pembatalan.

staf unit manajemen untuk bekerja sama dengan tim kerja yang bertugas secara proaktif (termasuk dalam proses restrukturisasi) proyek-proyek yang sulit telah membuahkan hasil. Akan tetapi, beberapa masalah sistemik masih menjadi kendala, khususnya keengganan beberapa instansi pemerintah untuk memenuhi ketentuan pengadaan sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Bank Dunia dan saran Bank Dunia mengenai penerapan prosedur yang benar dalam pengadaan barang/jasa Bank Dunia terkait dengan regulasi pengadaan barang/jasa nasional. Syukurlah, dalam pelaksanaan Kajian Kinerja Portofolio baru-baru ini (Agustus 2018), pemerintah menyampaikan bahwa telah diterbitkannya regulasi baru yang mempertegas bahwa perjanjian pinjaman merupakan dokumen acuan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga para pejabat pemerintah wajib menggunakan Pedoman Pengadaan Bank Dunia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Bank Dunia. Selain itu, terlihat juga kapasitas yang belum memadai dalam manajemen keuangan dan pengamanan sosial, serta keterlambatan dalam penyediaan dana pendamping.

**Layanan Konsultasi dan Analisis (ASA) telah membantu menetapkan fokus strategis dukungan**

---

Setelah 3 tahun pertama pelaksanaan CPF, Grup Bank Dunia telah menyelenggarakan program yang kuat dan beragam. Portofolio IBRD secara umum sehat dan kinerjanya stabil dengan perbaikan penanganan risiko yang menonjol dan portofolio IFC telah berkembang dalam tiga tahun terakhir.

---

**Grup Bank Dunia, mendukung dialog kebijakan yang kuat dengan pemerintah dan berkontribusi dalam rancangan operasi yang diusulkan.** Laporan utama ASA mengenai Nutrisi dan 'Biaya Kebakaran' adalah beberapa contoh yang baik. Untuk menanggulangi angka stunting anak yang mencapai 37,2 persen di Indonesia, yang merupakan angka tertinggi kelima di dunia, Bank Dunia mengembangkan kerangka multisektoral ASA di enam sektor dengan melibatkan tingkat tertinggi pemerintahan. Bantuan teknis (TA) mencakup analisis dan diagnosis serta perjalanan pertukaran pengetahuan untuk belajar dari pengalaman Peru. Melalui kerjasama yang erat dengan Bank Dunia, pemerintah telah meluncurkan Strategi Percepatan Pengurangan Stunting Nasional tahun 2017 dan mekanisme koordinasi pemerintah terlampir yang melibatkan peserta dari 16 kementerian. Pelaksanaan strategi pemerintah ini didukung dengan operasi PforR senilai \$400 juta. Laporan utama 'Biaya Kebakaran' (*Cost of Fire*) menyampaikan hasil analisis ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya mengenai krisis kebakaran hutan 2015 di Indonesia, yang diperkirakan bernilai \$16,1 miliar (2 persen PDB). Temuan-temuan dikutip secara luas oleh media nasional dan internasional dan memfasilitasi dialog yang sensitif namun sangat penting mengenai kerugian lingkungan dan ekonomi akibat kebakaran hutan, yang menghasilkan beberapa perubahan kebijakan penting seperti moratorium pengembangan lahan gambut dan Desain Besar Pencegahan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkebunan pemerintah, yang melibatkan puluhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

**Salah satu ciri khas dari program Grup Bank Dunia di Indonesia adalah kuatnya upaya untuk memberikan solusi pembangunan multisektoral, yang menghasilkan kolaborasi lintas Praktek Global (*Global Practice, GP*) dan 'Satu Kesatuan Grup Bank Dunia' yang baik.** Misalnya, program lanskap berkelanjutan dipimpin oleh tim GP Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam (ENV) tetapi melibatkan kolega-kolega dari tim GP Bidang Pertanian, Sosial, Perkotaan, Pedesaan dan Ketahanan (GSURR) dan Bidang Air Bersih, serta IFC yang bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan dan keahlian teknis dari lintas sektor dalam rangka mendukung pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan di bidang lanskap multisektoral yang kompleks. ASA Program Nutrisi didukung oleh lima tim GP, dan operasi program PforR Investasi Nutrisi Anak Usia Dini dipimpin bersama oleh GSURR dan

tim GP Kesehatan dan didukung oleh empat tim GP tambahan. Program Kajian Sektor Infrastruktur (InfraSAP) merupakan produk 'Satu Kesatuan Grup Bank Dunia' yang dipimpin Bank Dunia tetapi dengan partisipasi aktif dari Lembaga Penjamin Investasi Multilateral (MIGA) dan IFC. Proyek Pembangunan Pariwisata dipimpin oleh tim gabungan GP Keuangan, Daya Saing dan Inovasi WBG dan didukung oleh tim GP Transportasi dan Pembangunan Digital, ENV, GSURR, Air Bersih, Pendidikan, MTI, dan Tata Kelola.

**Portofolio IFC telah berkembang dalam tiga tahun terakhir.** Kerjasama yang baru dengan IFC selama tiga tahun pertama periode CPF yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 bernilai \$1,2 miliar sebagai komitmen LTF dalam 18 proyek. Total portofolio investasi LTF yang dikomitmenkan mencapai \$1,8 miliar (atas tanggungan sendiri maupun melalui mobilisasi inti) dengan 28 klien per Juni 2018, sebagian besar di sektor pasar keuangan, bahan kimia dan listrik. Sejak awal periode CPF, sudah ada keinginan yang kuat untuk mendapatkan modal, pinjaman, jaminan dan mobilisasi. Sesuai dengan tujuan CPF, IFC baru-baru ini telah mempertajam fokusnya dengan mengelompokkan intervensi yang dilakukannya menjadi tiga bidang utama: inklusi, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Pendekatan ini membantu mendiversifikasi portofolio IFC, semakin mendorong pendanaan dari sektor swasta dan menciptakan pasar. Dari investasi pertamanya pada tahun 1971 sampai Juni 2018, IFC telah menginvestasikan \$7,7 miliar di Indonesia (di mana \$4,6 miliar dari investasi ini atas tanggungan sendiri) untuk lebih dari 200 proyek. Dalam 12 tahun terakhir, total komitmen investasi LTF IFC mencapai \$5,1 miliar (\$2,8 miliar atas tanggungan sendiri - *own account/OA*). Sebagian besar komitmen ditujukan untuk sektor keuangan serta untuk kluster Manufaktur, Agribisnis dan Jasa (MAS). Portofolio IFC untuk Konsultasi mencapai \$35,2 juta (dana yang dikelola) dengan 16 proyek di berbagai tema dan sektor termasuk agribisnis dan kehutanan berkelanjutan, PPP infrastruktur, bangunan ramah lingkungan (*green buildings*), kemudahan melakukan usaha dan sektor keuangan, khususnya keuangan mikro.

**MIGA saat ini sedang mendukung satu proyek di Indonesia.** MIGA saat ini mempunyai *outstanding exposure* sebesar \$200 juta di Indonesia untuk proyek pembangkit listrik tenaga air 47MW Rajamandala dekat Bandung (TA15). Jaminan dari MIGA, yang menanggung kewajiban *offtake* Perusahaan Listrik Negara (PLN),

membantu mempercepat dukungan pembiayaan tambahan mandiri dari Lembaga Kredit Ekspor (ECA) untuk PLN, dalam rangka melaksanakan prinsip memaksimalkan pembiayaan untuk pembangunan yang berkelanjutan. MIGA tetap memanfaatkan kerjasama dengan Bank Dunia dan IFC di Indonesia untuk memberikan solusi yang lebih berbasis sektor swasta, yang ditujukan pada agenda pembangunan prioritas pemerintah, termasuk mengidentifikasi peluang-peluang yang cocok untuk menerapkan solusi peningkatan kredit *Non-Honoring of Financial Obligation* (NHFO) MIGA dalam mendukung fasilitas pembiayaan suku bunga dan swap mata uang bagi lembaga-lembaga keuangan utama yang didukung pemerintah seperti Bank EXIM Indonesia.

## Perkembangan Kemitraan dan Peningkatan Pembiayaan

**Program Kerjasama di Indonesia mempunyai tradisi untuk berkolaborasi secara luas dengan mitra bilateral dan global, mobilisasi pembiayaan, serta keahlian dalam rangka meningkatkan manfaat, dan mengujicoba solusi pembangunan inovatif selama periode CPF.** Pembiayaan IBRD senilai \$5,2 miliar yang telah disetujui sejak awal periode CPF mendukung pelaksanaan pembiayaan pemerintah senilai \$32,2 miliar, dan mendorong pembiayaan dari mitra-mitra pembangunan lain senilai \$3,2 miliar dan diharapkan dapat menghasilkan pembiayaan tambahan dari sektor swasta senilai \$2,2 miliar. Pendekatan Platform, dan Pendekatan Maksimalisasi Pembiayaan untuk Pembangunan (MFD) merupakan prinsip-prinsip CPF dan cara kedua pendekatan ini diterapkan akan dijelaskan berikut ini.

**Pendekatan Platform.** Secara spesifik, melalui Bidang Kerjasama 1: Platform Infrastruktur di Tingkat Nasional, CPF menetapkan agar Grup Bank Dunia bekerja di sektor-sektor yang dapat memberikan dampak melalui 'platform-platform' kemitraan dengan pemerintah, mitra-mitra pembangunan dan, bila mungkin, sektor swasta, untuk mencapai skala dan dampak sistemik yang diinginkan. Sumber daya IBRD mendorong pendanaan dari pemerintah dan mitra-mitra pembangunan untuk mendukung program-

program yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah. Program kerjasama Grup Bank Dunia membantu Indonesia meningkatkan kapasitas, terutama berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, koordinasi dan implementasi. Semua mitra pembangunan mengikuti pengaturan, pengamanan (*safeguards*) dan ketentuan fidusia yang sama, untuk menghindari intervensi yang tumpang tindih atau saling bertentangan, dan mengurangi biaya transaksi bagi pemerintah.

Melalui Pendekatan Platform ini, Bank Dunia akan meningkatkan pembiayaan pembangunan yang tersedia bagi pemerintah dan memperbaiki kualitas belanja publik. Akan tetapi, pendekatan ini memperbesar risiko portofolio mengingat skala operasinya. Proyek Penataan Kawasan Kumuh Nasional (*National Slum Upgrading Project*), yang disetujui pada TA16, adalah proyek pertama Bank Dunia yang dibiayai bersama dengan AIB dan menjadi contoh yang tepat dari penerapan Pendekatan Platform. Proyek ini dibiayai secara paralel oleh Bank Pembangunan Islam (IsDB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), sedangkan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menyediakan sumber daya dana perwalian (TF) untuk bantuan teknis dan dukungan pelaksanaan proyek. Pembiayaan IBRD sebesar \$216,5 juta meningkatkan pendanaan suatu program senilai \$2,1 miliar. Sepanjang pelaksanaan CPF ini, Pendekatan Platform telah diperluas ke seluruh program di luar penerapan yang dibatasi pada infrastruktur dan sekarang dianggap sebagai prinsip inti CPF meskipun masih terlalu dini untuk menarik pelajaran yang kredibel dari pelaksanaan program. Program Reformasi Bantuan Sosial merupakan salah satu contoh yang tepat mengenai program non-infrastruktur di mana pembiayaan IBRD senilai \$200 juta mendukung perbaikan sistem pelayanan, kapasitas dan kualitas belanja dalam program unggulan pemerintah bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan, PKH) senilai \$5,4 miliar. Kajian Kinerja dan Pembelajaran (PLR) menjelaskan manfaat yang diperoleh dari pendekatan kerjasama ini dan menguraikan risiko-risiko terkait.

**Pendekatan Maksimalisasi Pembiayaan untuk Pembangunan (MFD).** MFD adalah tentang memprioritaskan solusi sektor swasta dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik yang terbatas dengan cara yang berkelanjutan baik secara fiskal, lingkungan dan sosial. Indonesia

merupakan salah satu negara percontohan MFD Grup Bank Dunia. Untuk membantu mengoperasikan MFD sepenuhnya, Grup Bank Dunia telah menyusun InfraSAP sebagai alat diagnosis yang akan menjelaskan bagaimana pemerintah dapat meningkatkan akses dan kinerja infrastrukturnya. InfraSAP difokuskan pada memberikan saran kepada pemerintah mengenai cara mendorong solusi dari sektor swasta untuk infrastruktur. InfraSAP Indonesia mencakup empat sektor: energi, transportasi, air bersih dan pembangunan perkotaan. InfraSAP mengkaji empat persoalan lintas bidang: peran BUMN; persiapan proyek, instrumen fiskal dan kelembagaan untuk mendukung kemitraan publik-swasta (PPP); kerangka peraturan perundang-undangan untuk PPP; serta lanskap pembiayaan, yang mencakup pengembangan bank umum dan pasar modal. Hasil yang dicapai selama periode pelaksanaan CPF dan sebelum inisiasi InfraSAP berorientasi pada pendekatan MFD, yang meliputi, misalnya, Proyek Perumahan Terjangkau senilai \$450 juta, sebagai bagian dari program pembiayaan publik pemerintah senilai \$1,1 miliar yang akan meningkatkan pembiayaan hipotek (*mortgage finance*) komersial dan swasta senilai \$1–1,5 miliar. Usulan Strategi Kerjasama Grup Bank Dunia telah disusun sebagai pendamping InfraSAP, yang akan digunakan untuk meningkatkan fokus pendekatan MFD dalam persiapan TA19 dan TA20. Strategi Kerjasama ini akan menjadi dasar bagi layanan konsultasi untuk membantu mengatasi kendala pengikatan kerjasama sektor swasta dan bagi proyek-proyek di hilir yang akan mengisi dan mendorong solusi dari sektor swasta. Proyek-proyek tersebut dapat didukung oleh investasi Bank Dunia dan/atau IFC serta instrumen-instrumen mitigasi risiko IFC dan MIGA.

**Luas dan dalamnya kerjasama dengan Grup Bank Dunia dan keberhasilan pelaksanaan CPF tidak mungkin tercapai tanpa kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara Grup Bank Dunia dengan mitra-mitra bilateral dan multilateral.** Selama periode CPF, Bank Dunia telah berkolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan lain dalam dialog kebijakan dan memberikan dukungan keuangan untuk pelaksanaan program-program pemerintah. Selain berbagai pembiayaan bersama (*co-financing*) dengan AIB untuk mendukung kegiatan penataan kawasan kumuh, rehabilitasi bendungan, pembangunan infrastruktur daerah dan irigasi, Operasi Kebijakan Pembangunan (DPO) Energi Berkelanjutan dan Inklusif dibiayai secara paralel oleh ADB dan Bank Pembangunan Perancis (AFD) sedangkan DPO Logistik



dan Konektivitas Maritim dibiayai secara paralel oleh, antara lain, bank pembangunan milik pemerintah Jerman (KFW).

**Dana Perwalian (TF) yang dikontribusikan oleh mitra-mitra pembangunan sangat penting bagi penyelenggaraan program Indonesia dan promosi kolaborasi mitra-mitra pembangunan.** TF mendukung persiapan proyek, pelaksanaan proyek, ASA maupun pelaksanaan proyek-proyek percontohan utama. Sampai akhir Juni 2018, portofolio TF Indonesia terdiri dari 17 TF dan hibah spesifik negara dari 35 TF global/korporasi dengan kontribusi gabungan yang bernilai \$1 miliar. TF iklim global (seperti Dana BioCarbon, Dana Investasi Kehutanan, Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan, Mekanisme Hibah Khusus [DGM], Dana Lingkungan Global, dan sebagainya), memfasilitasi kerjasama dengan Bank Dunia dan menjadi titik masuk ke sektor yang sejak lama enggan menerima pinjaman. Dengan tersedianya dana-dana ini, Bank Dunia dapat memberikan dukungan analisis dan konsultasi strategis maupun dukungan hibah yang membantu pemerintah mengendalikan tantangan-tantangan lingkungan hidup dan ekonomi politik yang terinformasi dengan baik dan fleksibel. TF spesifik negara mencapai \$750 juta atau 74 persen dari total kontribusi, dan dihimpun dari 10 donor aktif yang meliputi Australia, U.S. Agency for International Development (USAID), Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I), Swiss, Kanada, Norwegia, Komisi Eropa, Belanda, Denmark, dan Selandia Baru. TF sepenuhnya selaras dengan prioritas pemerintah dan CPF dalam bidang-bidang kerjasama inti yaitu infrastruktur, pembangunan sosial, pelayanan, manajemen lanskap yang berkelanjutan, samudera dan iklim, pembangunan sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, pengentasan kemiskinan dan manajemen ekonomi. Melalui kemitraan-kemitraan tersebut, Bank Dunia dapat mengadakan dialog kebijakan yang baik dan memberikan respons yang tepat waktu atas permintaan dukungan teknis dan analisis dari pemerintah, yang tidak mungkin terwujud jika program hanya mengandalkan sumber daya anggaran Bank Dunia yang terbatas.

**Grup Bank Dunia telah berupaya meningkatkan kerjasamanya dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO),** di luar lingkup kerjasama konvensional dalam hal: (a) konsultasi untuk keperluan korporat dan yang berkaitan dengan proyek (misalnya, Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial); (b) persiapan produk-produk kerjasama negara; dan (c) kunjungan oleh pejabat senior Grup Bank Dunia. Sejalan dengan strategi

kerjasama dengan CSO yang saat ini sedang disusun, Grup Bank Dunia secara sistematis menjangkau masyarakat sipil dengan mengundang wakil-wakil mereka yang terdiri dari serikat pekerja, kelompok keagamaan dan kelompok-kelompok masyarakat adat untuk mengadakan diskusi kelompok kecil mengenai berbagai topik permasalahan dan tantangan pelaksanaan proyek. Bank Dunia mengharapkan dapat membina hubungan yang lebih kuat dan mendapatkan umpan balik untuk kebijakan dan program yang didukung oleh Kelompok Bank Dunia dari suara di tingkat akar rumput dan mendukung perbaikan kehidupan masyarakat miskin dan rentan. Meskipun awalnya ada keraguan di pihak CSO lokal, interaksi telah berjalan dengan sangat positif dan akan terus dilakukan selama periode CPF yang tersisa. Baru-baru ini, Bank Dunia memberikan dukungan langsung (melalui hibah) kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berpengaruh dengan ide-ide inovatif mereka, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan warga masyarakat dan akuntabilitas sosial. Hibah yang diberikan sangat dihargai oleh CSO, dan Bank Dunia akan berupaya mencari peluang-peluang untuk kolaborasi strategis di bidang ini di masa-masa yang akan datang.

## Kemajuan untuk Mencapai Tujuan CPF

**Pelaksanaan program CPF secara umum diharapkan akan dapat mencapai sebagian besar tujuan yang diidentifikasi dalam CPF, meskipun terdapat keterlambatan dalam beberapa hal dan kebutuhan revisi dalam hal lainnya.** Dari 18 tujuan yang diidentifikasi dalam Kerangka Hasil CPF, 1 tujuan telah tercapai, 14 tujuan diharapkan akan dicapai pada tahun 2020, 3 tujuan telah direvisi, yang mencakup dibatalkan atau digabung. Hasil kajian terhadap pencapaian utama dan hal-hal yang menonjol dari pelaksanaan program CPF, berdasarkan bidang kerjasama, disajikan dalam paragraf-paragraf berikut ini. Intervensi Bank Dunia dalam keterlibatan warga masyarakat, fokus perubahan iklim dan kesetaraan gender selama periode CPF masing-masing dijabarkan dalam Kotak 1, Kotak 2, dan Kotak 3.

## BIDANG KERJASAMA 1: PLATFORM INFRASTRUKTUR DI TINGKAT NASIONAL

Kemajuan pesat telah dicapai dalam **memperluas akses ke layanan pengairan melalui irigasi dan keamanan bendungan (Tujuan 1)**, melalui serangkaian proyek yang didukung oleh Bank Dunia selama periode CPF yang bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur irigasi maupun merehabilitasi saluran irigasi yang ada dan membangun saluran irigasi yang baru. Melalui program Satu Juta Rumah, pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk membangun 1 juta rumah setiap tahun guna membantu mengatasi kekurangan rumah. Sejak tahun 2015, kemajuan pesat telah dicapai untuk **meningkatkan akses ke perumahan yang terjangkau (Tujuan 2)** dengan kira-kira 905.000 rumah yang dibangun pada tahun 2017. Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk membangun Satu Juta Rumah: (a) Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), yang disahkan menjadi undang-undang pada bulan Februari 2016; (b) Subsidi Selisih Bunga (SSB); dan (c) Subsidi Rp 4 juta untuk membantu pembiayaan uang muka pembelian rumah bagi keluarga-keluarga yang mendapatkan kombinasi insentif kredit rumah (hipotek) yang terjangkau. Dukungan Bank Dunia untuk program Satu Juta Rumah melalui Program Perumahan Terjangkau Nasional bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program dalam memenuhi kebutuhan segmen masyarakat

sasaran dengan lebih baik dan dalam mendorong pembiayaan sektor swasta melalui proyek-proyek perumahan yang terjangkau.

Meskipun pelaksanaan program dimulai lebih lambat daripada yang diperkirakan, komitmen pemerintah tetap tinggi. Ada kolaborasi yang baik antara Bank Dunia dengan IFC, komitmen pemerintah yang tinggi dan partisipasi yang kuat dari para mitra pembangunan dalam **pengembangan destinasi wisata terpadu (Tujuan 3)**. Melalui pembayaran di muka dan hibah untuk persiapan, pengadaan jasa untuk menyusun tiga rencana induk pariwisata terpadu (ITMP) memasuki tahap akhirnya sehingga diharapkan dapat segera diserahkan, di mana rencana induk untuk destinasi wisata tambahan diharapkan dapat didukung selama periode CPF ini. Proyek Pembangunan Pariwisata yang dibiayai oleh Bank Dunia penting untuk mewujudkan tujuan ini karena proyek tersebut akan memenuhi tingginya permintaan masyarakat, menyelesaikan masalah fragmentasi kelembagaan dan mengelola aset lingkungan dan sosial untuk menarik wisatawan. Namun persiapannya mengalami keterlambatan padahal harapan pemerintah semakin besar. Selain itu penetapan lebih dari satu destinasi wisata dalam ITMP, badan koordinasi dan pengaturan operasional pelaksanaan sejalan dengan pelayanan konsultasi pelengkap dari IFC dan IBRD yang tersedia.



## BIDANG KERJASAMA 2: ENERGI BERKELANJUTAN DAN AKSES UNIVERSAL

Kemajuan yang baik telah dicapai untuk **meningkatkan pasokan dan akses ke energi (Tujuan 4)**. Prioritas program Bank Dunia sangat selaras dengan tujuan pemerintah di sektor energi, termasuk: (a) memastikan keberlanjutan keuangan di sektor energi, (b) memperbaiki iklim investasi, (c) menghapuskan rintangan terhadap perluasan tenaga listrik terbarukan, dan (d) memperluas akses ke energi modern. Selama pertengahan pertama pelaksanaan CPF, pemerintah telah melaksanakan berbagai reformasi positif di bidang-bidang ini sebagaimana ditunjukkan oleh kemajuan besar dalam pengurangan subsidi dan memberikan harga ekonomis kepada masyarakat berdasarkan regulasi baru yang memperjelas proses perpanjangan hak produksi gas domestik yang telah berakhir masa berlakunya, dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2014 tentang Energi Panas Bumi.

Akan tetapi, masih terdapat kebijakan yang saling bertentangan, ketidakpastian dan/atau keterlambatan pelaksanaan dalam 18 bulan terakhir (yang berkaitan dengan keberlanjutan keuangan sektor energi dan peraturan tentang tarif, peraturan pembangkit tenaga listrik terbarukan dengan biaya terendah dan dorongan pembiayaan dari sektor swasta), yang mungkin diperburuk oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik menjelang pemilihan umum. Pertengahan pertama periode CPF juga dicirikan dengan upaya yang sangat besar untuk membersihkan portofolio energi Bank Dunia sebagaimana ditunjukkan dengan pembatalan parsial senilai \$784 juta dari tiga pinjaman yang sedang berlangsung (Proyek Upper Cisokan Pumped Storage dan Proyek Pembangunan Transmisi Listrik Indonesia 1 dan 2), yang pasti akan menurunkan hasil yang telah direncanakan dalam Bidang Kerjasama ini. Portofolio tersebut terdiri dari sejumlah proyek energi panas bumi yang sedang berlangsung dan turut menyumbang kepada manfaat mitigasi iklim (lihat Kotak 2). IFC akan meningkatkan dukungan dan upaya mobilisasi untuk solusi cerdas-iklim dan menjadi pendukung aktif pembangunan energi dan infrastruktur di Indonesia. IFC telah berkomitmen untuk melakukan investasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga air Medco Power dengan kapasitas operasi 1.947 MW dan Asahan I dengan kapasitas operasi 180 MW, memberikan dukungan konsultasi PPP untuk mengembangkan IPP dan transmisi berbasis gas

dan energi terbarukan, dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Bisnis energi terbarukan.

## BIDANG KERJASAMA 3: PEREKONOMIAN DAN KONEKTIVITAS MARITIM

Kemajuan yang baik telah dicapai untuk **perbaikan logistik dan konektivitas maritim (Tujuan 5)** karena pemerintah telah memperlihatkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki kualitas perumusan kebijakan logistik secara keseluruhan melalui intervensi dan analisis kebijakan di sektor-sektor kunci dan untuk mengurangi biaya logistik melalui promosi reformasi kebijakan. Bank Dunia telah menyelenggarakan program konsultasi kebijakan dan bantuan teknis secara berkelanjutan yang disertai dengan serangkaian Operasi Kebijakan Pembangunan (DPO) bidang Maritim, Logistik dan Konektivitas, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan karena adanya perubahan mitra-mitra kunci. Di bidang konektivitas, IFC memberikan dukungan pinjaman kepada *Jakarta International Container Terminal*.



Akan tetapi, **perbaikan praktek pengelolaan perikanan (Tujuan 6)** belum mengalami kemajuan selama periode CPF karena lemahnya komitmen pemerintah dan keterlambatan pelaksanaan kerjasama satu-satunya Bank Dunia di bidang ini, yaitu Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang, yang mendorong dilaksanakannya restrukturisasi proyek secara signifikan.

#### BIDANG KERJASAMA 4: PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

Pemerintah terus menyempurnakan caranya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa bekerja sama untuk menyediakan pelayanan dan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk memberikan hasil di lapangan. Kemajuan yang baik telah dicapai dalam **memperbaiki pelayanan di daerah (Tujuan 7)** di mana Bank Dunia mendukung pembentukan sistem transfer fiskal berbasis kinerja, penguatan kapasitas pemerintah pusat untuk mendukung dan mengawasi kinerja pemerintah daerah, perbaikan fungsi 'back-office' pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur di daerah dan penyediaan instrumen bagi warga masyarakat untuk memantau penyelenggaraan pelayanan di daerah. Lihat Kotak 1 yang menyajikan gambaran singkat mengenai bagaimana kinerja dan akuntabilitas guru dapat ditingkatkan melalui keterlibatan masyarakat.

Ada beragam tingkat kemajuan dalam **meningkatkan akses ke pelayanan dasar di kota-kota sasaran (Tujuan 8)** sebagian karena adanya keterlambatan pemberian persetujuan atas operasi yang direncanakan di bidang air bersih, sanitasi dan penanganan limbah padat, dan penghapusan intervensi spesifik-kota tertentu yang telah direncanakan. Akan tetapi, Bank Dunia mendukung Program Penataan Kawasan Kumuh Nasional (NUSP) senilai \$1,8 miliar yang pelaksanaannya saat ini sedang berlangsung.

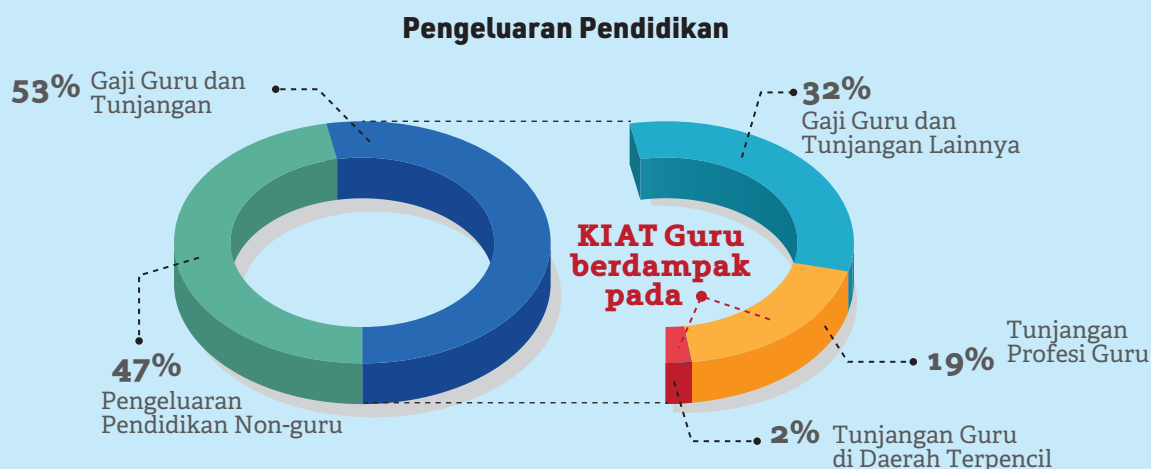
Ada kemajuan yang menonjol dalam **memperbaiki akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di daerah-daerah pedesaan yang ditargetkan (Tujuan 9)**. Khususnya, kerjasama dengan Bank Dunia telah mendukung percepatan dan peningkatan investasi pemerintah di bidang modal manusia, termasuk bidang pendidikan, air bersih dan sanitasi melalui pelaksanaan dan perluasan program platform pemerintah pusat yang besar, seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan dan PNPM Generasi, yang mendapatkan kontribusi dari Bank Dunia. Selain itu, pelayanan analisis dan konsultasi yang diberikan juga telah memfasilitasi dialog kebijakan yang dinamis dan dukungan tingkat tinggi (*high-level buy-in*) dan momentum untuk agenda investasi modal manusia, sehingga pemerintah meminta agar program-program berbasis kinerja di bidang kesehatan, pendidikan, nutrisi dan pengembangan anak usia dini diselenggarakan pada TA18-19.



## Kotak 1

### KIAT Guru: Memperbaiki Kinerja dan Akuntabilitas Guru melalui Keterlibatan Masyarakat dan Upah Berbasis Kinerja

Setengah dari 3 juta guru yang terdaftar di Indonesia telah disertifikasi sehingga menerima Tunjangan Profesi Guru. Pemerintah Indonesia mengalokasikan 10 persen dari APBN atau sekitar \$16,5 miliar pada tahun 2016, untuk gaji dan tunjangan guru. Akan tetapi, pengeluaran yang signifikan ini masih belum menghasilkan perbaikan kinerja guru atau hasil belajar siswa. Karena Pemerintah Indonesia terus berfokus pada kualitas dan pelayanan guru serta sertifikasi mereka, KIAT Guru merupakan pendekatan yang tepat untuk membantu meningkatkan hasil pendidikan.



KIAT Guru, singkatan dari Kinerja dan Akuntabilitas Guru, merupakan proyek percontohan yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran guru, kinerja guru dan hasil belajar siswa di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, guru yang tidak hadir di sekolah mencapai 19 persen selama jam belajar dibandingkan dengan 9 persen secara nasional, dan para siswa di Indonesia masih tertinggal dalam hal peringkat hasil tes internasional. Salah satu ciri dari KIAT Guru adalah bahwa proyek ini memberdayakan masyarakat, termasuk orangtua, untuk meminta pertanggung-jawaban guru dan menghubungkan pembayaran Tunjangan Guru di Daerah Terpencil (1 x gaji pokok) dengan kinerja pelayanan guru. Hal ini dilakukan dengan meminta warga masyarakat untuk memverifikasi: (a) kehadiran guru melalui aplikasi berbasis Android, dan (b) kinerja pelayanan melalui evaluasi berbasis kartu skor yang dijalankan oleh masyarakat.

Sejak proyek percontohan ini diluncurkan pada tahun 2016, hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketidakhadiran guru di ruang kelas mengalami penurunan dari 25 persen menjadi 13 persen, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan guru, sebagaimana yang dinilai dari kartu skor, mengalami peningkatan dari 56 persen menjadi 93 persen. Bank Dunia mengadakan evaluasi yang saksama terhadap dampak yang diberikan pada pertengahan tahun 2018 untuk membandingkan hasil proyek percontohan dengan kelompok kontrol. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta agar proyek percontohan KIAT Guru yang baru diadakan di wilayah perkotaan untuk menghubungkan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (yang mencapai kira-kira \$6 miliar setiap tahun) dengan kinerja guru.

## BIDANG KERJASAMA 5: PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN

Mengelola lanskap secara berkelanjutan menghadapi tantangan ekonomi politik dan tata kelola yang berat berupa kepentingan politik dan ekonomi yang berkuasa dan berurat-berakar di sektor kelapa sawit, kayu, pulp dan kertas; tata kelola daerah yang buruk di wilayah dataran rendah yang berisiko tinggi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua; serta tantangan kerjasama lintas lembaga dengan agenda multi-sektoral. Akibatnya, kemajuan yang dicapai masih



lambat dalam **memperbaiki pengelolaan lahan dan tata ruang (Tujuan 10)**. Sejak CPF disetujui, Bank Dunia telah menyetujui dua pinjaman Dana Investasi Iklim (CIF), yang meliputi Program Investasi Kehutanan (FIP) yang mendukung inovasi pengelolaan hutan terdesentralisasi di lanskap prioritas dan pinjaman DGM yang mendukung masyarakat adat yang menetap di hutan untuk menjamin hak-hak mereka atas lahan dan meningkatkan mata pencaharian berbasis hutan yang berkelanjutan, yang merupakan proyek-proyek pertama dengan investasi di lapangan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam 20 tahun terakhir. Sekalipun demikian, melalui analisis dan bantuan teknis (TA) yang saksama, Bank Dunia telah mengarahkan perhatian dunia kepada besarnya tantangan lanskap Indonesia, membantu menyiapkan komitmen Konferensi Para Pihak (COP) 21 Indonesia dan penanganan pasca-kebakaran, dan mendukung pengembangan program pemerintah dalam penanganan kebakaran dan kabut asap multisektoral. Bank Dunia juga telah memberikan dukungan analisis dan konsultasi kebijakan sehingga pemerintah dapat menetapkan prioritas upaya pemetaan dan penatausahaan lahan di provinsi-provinsi lanskap prioritas (termasuk komitmen untuk menentukan batas-batas Kawasan Hutan—pemicu utama deforestasi, kebakaran dan konflik), sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden No. 2, pada Februari 2018, yang membubuh dasar untuk pelaksanaan di masa mendatang Program Percepatan Reformasi Agraria yang didukung Bank Dunia dan Proyek Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Kemajuan yang dicapai masih lambat dalam **memperkuat kapasitas dalam pengelolaan hutan terdesentralisasi (Tujuan 11)** karena terdapat keterlambatan substansial dalam pelaksanaan proyek akibat keterbatasan kapasitas. Akan tetapi, kemajuan yang dicapai baru-baru ini dalam kegiatan yang didukung oleh FIP dan DGM menunjukkan tetap adanya komitmen untuk pengelolaan hutan terdesentralisasi. Kegiatan-kegiatan lanskap yang berkelanjutan menjadi kontributor yang kuat untuk menghasilkan manfaat tambahan (*co-benefits*) mitigasi iklim (Lihat Kotak 2). IFC sedang melaksanakan program yang berkelanjutan di bidang Regulasi Bangunan Hijau/Ramah Lingkungan (*Green Buildings*) di Indonesia, Konsultasi Kehutanan Asia Tenggara, Rantai Pasokan Kehutanan, Pengembangan Sawit untuk Perkebunan Rakyat dan Inisiatif Modal Sosial untuk Usaha Perkebunan.

## Kotak 2

### Fokus Perubahan Iklim dalam Program Indonesia

Grup Bank Dunia mendukung Indonesia untuk mengatasi tantangan perubahan iklim melalui portofolio aktif kegiatan yang berkaitan dengan iklim. Karena berfokus pada tema perubahan iklim dalam seluruh bidang kerjasama CPF saat ini, Bank Dunia telah menetapkan target sedikitnya 31 persen komitmen pinjaman dengan manfaat tambahan yang berkaitan dengan iklim. Untuk TA18, target ini sedang dicapai melalui integrasi yang aktif antara pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tindakan-tindakan ketahanan terhadap iklim dalam proyek-proyek pemberian pinjaman di berbagai sektor, termasuk irigasi, infrastruktur perkotaan, pembangunan sektor swasta dan pemberian pelayanan publik di bidang air bersih dan sanitasi, kesehatan dan gizi. Kegiatan-kegiatan pemberian pinjaman utama yang sedang dipersiapkan untuk TA19-20 adalah program-program investasi pengelolaan air limbah perkotaan, penanggulangan kebakaran, pembiayaan karbon hutan dan energi terbarukan dari energi panas bumi. Yang turut melengkapi kegiatan persiapan pemberian pinjaman ini adalah pelayanan konsultasi lintas bidang mengenai topik-topik yang berkaitan dengan iklim seperti penetapan harga karbon, reformasi tarif listrik, restorasi lahan gambut, mata pencaharian yang berkelanjutan di wilayah dataran rendah, akutansi modal alam, manajemen risiko bencana, diagnosis pertumbuhan perkotaan, dan laboratorium perencanaan pembangunan kota.

Untuk melengkapi portofolio Bank Dunia, operasi IFC juga mencakup fokus iklim yang kuat. IFC bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan swasta untuk mengembangkan program dan produk pembiayaan iklim maupun persiapan yang saksama proyek-proyek ramah lingkungan (*green projects*). Melalui inisiatif-inisiatif seperti obligasi 'hijau' (*green bonds*), IFC akan membantu meningkatkan saluran pembiayaan khusus untuk proyek-proyek tersebut dan menggerakkan investor-investor lain untuk berpartisipasi. Dalam ruang lingkup infrastruktur, program perubahan iklim IFC berfokus pada upaya-upaya hulu dan proyek-proyek investasi energi terbarukan, termasuk energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga air berskala kecil, energi surya dan konversi limbah menjadi energi. Selain itu, IFC bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam melaksanakan ketentuan bangunan ramah lingkungan, menetapkan standar efisiensi sumber daya sukarela untuk bangunan-bangunan dengan sistem sertifikasi *Excellence in Design for Greater Efficiencies* (EDGE) dan pembiayaan properti hijau/ramah lingkungan (*green property*). Sejak TA13, melalui dukungan finansial dan teknis dari IFC, lebih dari 600 bangunan ramah lingkungan dengan total luas lebih dari 18 juta m<sup>2</sup> telah memenuhi ketentuan bangunan ramah lingkungan atau telah menerima sertifikasi EDGE dan membantu Indonesia menghemat biaya energi lebih dari \$70 juta dan 720.000 ton emisi GRK.

Ke depannya, Grup Bank Dunia akan terus memperkuat agenda iklim dalam kerjasama CPF di Indonesia dan mengkaji risiko-risiko penting dan berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pinjaman yang berkaitan dengan iklim, khususnya ekonomi politik perkebunan sawit, energi terbarukan, dan tata kelola kehutanan, dan menyusun strategi kerjasama adaptif.



## BIDANG KERJASAMA 6: MENGUMPULKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN DAN MEMBELANJAKANNYA DENGAN LEBIH BAIK

Secara keseluruhan, kemajuan telah dibuat dalam **meningkatkan pengumpulan pendapatan (Tujuan 12)** dan **meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja (Tujuan 13)** meskipun agak lambat daripada yang ditargetkan, khususnya sehubungan dengan pengumpulan pendapatan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki administrasi pendapatan melalui 'Tim Reformasi', suatu komite reformasi perpajakan berprofil tinggi yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan para peneliti internasional, termasuk Bank Dunia. Reformasi konkret yang dilaksanakan sejauh ini dan didukung oleh Layanan Konsultasi dan Analisis (ASA) program Bank Dunia mencakup mencocokkan identitas penduduk dengan nomor pokok wajib pajak, memperkenalkan sistem *e-invoicing* dan *e-filing*, dan melaksanakan upaya-upaya penanganan kepatuhan yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut mendapatkan dukungan dari program amnesti pajak yang diselesaikan pada Triwulan ke 3 tahun 2017, dengan hasil deklarasi aset senilai kira-kira \$366 miliar, atau 39,3 persen dari PDB Indonesia tahun 2016, suatu rekor baru untuk program amnesti pajak di seluruh dunia. Keberhasilan program amnesti pajak berkaitan dengan kuatnya dukungan politik dari pemerintah di mana Presiden dan Menteri Keuangan berhasil menaikkan kepatuhan pajak yang lebih baik menjadi prioritas nasional. Investasi yang signifikan untuk memperkuat

infrastruktur IT dasar administrasi perpajakan baru saja dimulai. Dalam hal kebijakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan 'erosi basis pajak dan perpindahan keuntungan' (BEPS) sehingga Indonesia menjadi salah satu dari hanya beberapa negara berkembang yang telah memenuhi dan menandatangani 'standar minimum' agenda anti-BEPS yang dipimpin oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Peraturan cukai tembakau tahun 2018 memperkenalkan peta jalan penyederhanaan berjenjang untuk pertama kalinya dan meneruskan kebijakan kenaikan tarif secara bertahap namun dalam jumlah terbatas setiap tahun. Efisiensi alokasi anggaran berhasil ditingkatkan secara substansial karena belanja dalam jumlah yang lebih besar telah ditujukan kepada sektor-sektor prioritas (kesehatan, bantuan sosial dan infrastruktur). Hal ini dipengaruhi oleh hasil pekerjaan Bank Dunia sebelumnya untuk mereformasi subsidi BBM.

Tantangan sistem manajemen keuangan publik, terutama berkaitan dengan kredibilitas anggaran, masih mempengaruhi pelaksanaan anggaran, khususnya dalam belanja modal. Karena kementerian-kementerian memperkirakan revisi anggaran akan menurunkan jumlah anggaran yang semula, maka besaran belanja cenderung mengalami penyesuaian penurunan, dan persentase pelaksanaan anggaran, meskipun dibandingkan dengan revisi anggaran, masih jauh di bawah 100 persen. Melalui ASA programatik mengenai Kebijakan Makro dan Fiskal dan mengenai 'Penguatan



Manajemen Pendapatan dan Anggaran', Bank Dunia terus berkontribusi untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui pekerjaan analisis dan diagnosis serta bantuan teknis (TA), dan kegiatan-kegiatan reformasi terkait telah mendapatkan dukungan dari dilaksanakannya CPF melalui rangkaian Pembiayaan Kebijakan Pembangunan (DPF) Reformasi Fiskal.

## BALOK PENDUKUNG 1: MENDORONG KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA – INVESTASI, IKLIM USAHA DAN FUNGSI PASAR

Pemerintah membuat kemajuan yang signifikan dalam **menyederhanakan proses perizinan usaha untuk mendukung sektor swasta (Tujuan 14)**. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan strategi pertumbuhan dengan melibatkan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan, dan penciptaan pasar yang lebih terbuka dan dapat diprediksi dengan peraturan-peraturan yang disederhanakan dalam melakukan usaha telah menjadi inti dari upaya-upaya pemerintah. Grup Bank Dunia telah memberikan dukungan melalui program pemberian pinjaman, pengetahuan dan bantuan teknis yang signifikan, dan telah berkontribusi dalam peluncuran 16 paket kebijakan ekonomi pemerintah sejak bulan September 2015. Untuk lebih mendukung reformasi ini maka pada tahun 2017 pemerintah berupaya untuk meluncurkan pendekatan ekstensif (*wholesale approach*) dalam memperbaiki lingkungan usaha di daerah dan memperkuat tata kelola regulasi, termasuk melalui peraturan dan instruksi presiden yang menuntut adanya analisis dampak kebijakan dan koordinasi antar kementerian dengan lebih baik. Laporan *Doing Business* 2018 mengakui Indonesia sejak tahun 2003 sebagai salah satu dari 10 negara reformis tertinggi di dunia, dengan 39 reformasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 15 tahun, dan peringkat keseluruhan Indonesia meningkat menjadi ke-72 pada tahun 2017 (pada tahun 2016 dan 2017, dari 57 rekomendasi lingkungan usaha yang dibuat oleh Grup Bank Dunia, 31 rekomendasi telah dilaksanakan, 9 di antaranya dimuat dalam peraturan yang direvisi atau baru). Akan tetapi, untuk meningkatkan investasi swasta di Indonesia, sangat penting untuk melaksanakan reformasi yang lebih menantang secara politik tetapi sangat dibutuhkan dalam menghadapi keterbukaan dan persaingan usaha. Misalnya, analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa

beberapa pembatasan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) Indonesia memberikan rintangan yang besar kepada realisasi investasi langsung asing (FDI) dan bahkan rintangan yang lebih besar kepada FDI yang telah disetujui.

Kemajuan yang signifikan dibuat untuk **meningkatkan peranan sektor swasta di bidang investasi infrastruktur nasional (Tujuan 15)**, yang mencerminkan kuatnya penekanan dan komitmen pemerintah untuk tujuan ini. Pemerintah secara aktif mendorong peningkatan investasi swasta untuk infrastruktur melalui kemitraan publik-swasta (PPP) maupun melalui akses BUMN ke pasar modal. PLN dan Jasa Marga (BUMN penyedia jasa jalan tol) berhasil melaksanakan dua sekuritisasi aset selama periode CPF, salah satunya di pasar obligasi internasional. Beberapa PPP juga berhasil mencapai kesepakatan pembiayaan (*financial closure*) pada tahun 2017, seperti proyek air bersih Umbulan dan Palapa Ring. Beberapa mekanisme atau 'alat' yang baru untuk mendorong lebih banyak investasi swasta di bidang infrastruktur telah diluncurkan, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), suatu entitas yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang tidak mewajibkan pendanaan dari APBN. Bank Dunia juga telah mendukung persiapan kasus bisnis secara garis besar untuk jalan tol, yang diharapkan akan dibiayai melalui Program Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Nasional yang telah direncanakan melalui PPP. Selanjutnya, Grup Bank Dunia melalui penyusunan InfraSAP akan memberikan saran/nasihat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur. IFC telah mendukung keterlibatan sektor swasta di bidang infrastruktur dengan menyediakan advokasi hulu mengenai Konsesi Jalan Tol dan Perjanjian Pembelian Listrik Tenaga Air dengan PLN.

Kemajuan yang signifikan juga dicapai dalam **meningkatkan akses ke pembiayaan (Tujuan 16)** di mana program Grup Bank Dunia telah mendukung, antara lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk mengembangkan dan berhasil melaksanakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merancang Rekening Tabungan Dasar dalam rangka memperluas akses keuangan, dan memberikan masukan untuk Undang-Undang Stabilitas Keuangan yang baru dan peraturan tentang asuransi mikro. IFC mempunyai

beberapa proyek yang sedang berjalan: asuransi gempa berbasis indeks untuk perlindungan portofolio keuangan mikro, manajemen risiko lingkungan dan sosial bagi lembaga perantara keuangan, proyek Tata Kelola Korporasi Indonesia, Infrastruktur Keuangan Indonesia – Transaksi Berjaminan (*Secured Transactions*), *Indonesia Mobile Banking 2 Digital Inclusion*, *Ciputra Residence Bond Partial Credit Guarantee*, dan menyediakan dukungan investasi maupun konsultasi bagi beberapa klien sektor swasta.

## BALOK PENDUKUNG 2: KEMAKMURAN BERSAMA, PEMERATAAN DAN INKLUSI.

Bank Dunia mempunyai program ASA yang dinamis dan sangat jelas di bidang kemiskinan, pemerataan dan inklusi, yang membantu menekankan pentingnya agenda ini dan membentuk dialog kebijakan di tingkat tertinggi. Peluncuran laporan utama Bank Dunia mengenai ketimpangan “Meluasnya Ketimpangan di Indonesia” (*Indonesia’s Rising Divide*) mendapatkan liputan secara luas dan ditindaklanjuti dengan rapat kabinet khusus pada bulan Desember 2015, yang membubuh dasar bagi bidang-bidang kerjasama baru yang terdiri dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dan gizi. Sebagian besar laporan tersebut yang termasuk dalam kegiatan pendukung ini berkaitan dengan kesetaraan gender, dan gambaran singkatnya disajikan dalam Kotak 3.

Kemajuan dalam **meningkatkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan (Tujuan 17)**, terutama yang berkaitan dengan perluasan cakupan beberapa program perlindungan sosial utama, telah melampaui harapan. Indonesia saat ini sedang melaksanakan salah satu reformasi jaminan sosial terbesar di dunia, dan peningkatan kualitas dan cakupan berbagai program perlindungan sosial masih menjadi prioritas tertinggi pemerintah. Belanja bantuan sosial terus meningkat dan total belanja pusat dan daerah untuk bantuan sosial yang bersifat tetap meningkat sebesar 126 persen secara riil antara tahun 2009 sampai 2016, bersamaan dengan tingkat cakupan dan manfaat program bantuan sosial utama –Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan

luran (JKN-PBI) telah berhasil mendaftarkan 16 juta peserta tambahan antara tahun 2013 sampai 2016, sedangkan peserta Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah meningkat lebih dari 3 juta orang dalam periode yang sama. Agenda ambisius ini mendapatkan dukungan dari pinjaman PforR yang baru, Program Reformasi Sosial Indonesia senilai \$200 juta, yang mendukung upaya pemerintah untuk memperluas cakupan PKH, memperkuat sistem pelayanan program dan meningkatkan koordinasinya dengan program-program sosial pelengkap. Karena tingginya dampak PKH maka pemerintah memutuskan untuk memperluas cakupan PKH dari 3,5 juta keluarga pada tahun 2015 menjadi 10 juta keluarga, atau 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia, yang sudah tercapai pada awal tahun 2018. Bantuan teknis pendamping yang diberikan telah mendukung Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kemenkeu dan para pemangku kepentingan utama lain untuk meninjau kembali kebijakan, program dan sistem penyelenggaraan bantuan sosial, dan mendukung penguatan efektivitas program serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pelaksana.

Dalam **mendukung penciptaan dan akses ke lapangan pekerjaan yang produktif (Tujuan 18)**, memang sudah ada kemajuan tetapi diharapkan akan ada kemajuan yang lebih besar karena pemerintah telah memberikan sinyal bahwa pemerintah siap melaksanakan reformasi besar di bidang ketenagakerjaan menjelang pemilu tahun 2019. Ada kesempatan baru untuk melaksanakan reformasi kebijakan pasar tenaga kerja, termasuk pengembangan keterampilan dan pemantauannya, modernisasi kebijakan perlindungan pekerja dan kebijakan/program untuk mendukung pekerja migran dan mengatasi persoalan pengangguran kaum muda. Sejauh ini, pelaksanaan CPF telah mendukung agenda tersebut dengan mengembangkan dasar bukti dan dukungan reformasi bertahap di bidang asuransi bagi pengangguran, reformasi keterampilan dan strategi untuk pelatihan kejuruan serta reformasi kebijakan bagi pekerja migran. IFC sedang mendukung sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor manufaktur, agribisnis dan jasa yang kompetitif, termasuk fasilitas pariwisata dan toko-toko ritel.

### Kotak 3

#### Intervensi Kesetaraan Gender dalam Program Indonesia

Rencana Aksi Gender Negara Indonesia oleh Bank Dunia mengidentifikasi empat bidang prioritas: (a) rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan akses ke keuangan, (b) tingginya angka kematian ibu, (c) rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, dan (d) pembatasan undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan. IBRD dan IFC bersama-sama mendukung upaya Indonesia untuk mengatasi kesenjangan ini melalui pinjaman, hibah, dan analisis.

Pada bulan Mei 2017, Bank Dunia menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan mengenai bagaimana pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk meningkatkan lapangan kerja bagi tenaga kerja perempuan dan memperbaiki kesehatan dan gizi perempuan. Banyak dari rekomendasi tersebut tercermin dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Pemerintah tahun 2018. Pekerjaan analisis lain dari Praktek Global (GP) dan Laboratorium Inovasi Gender Asia Timur dan Pasifik menghasilkan pengetahuan untuk membantu Indonesia mengatasi kesenjangan gender. Proyek IFC Perbankan untuk Perempuan, dengan pendanaan dari *Umbrella Facility for Gender Equality* (UFGE), sedang mengembangkan pelayanan keuangan, pelatihan, dan kesempatan berjejaring bagi pengusaha perempuan dalam rantai pasokan. UFGE juga sedang mendukung pengusaha perempuan Indonesia dengan pelayanan non-keuangan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mereka. Proyek ini bekerja sama dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), sebuah bank terkemuka di Indonesia, yang sejauh ini telah mencairkan lebih dari 300 pinjaman senilai lebih dari \$109 juta kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki kaum perempuan.

Portofolio pinjaman dan hibah juga membantu mengatasi kesenjangan gender. Proyek Generasi mendorong perempuan untuk mengikuti kelas ibu hamil dan menyusui dan meningkatkan asupan vitamin A dan imunisasi di daerah termiskin di Indonesia. Dua pinjaman PforR tahun anggaran 2018 (TA18) akan memanfaatkan hasil-hasil dari proyek Generasi untuk membantu mengatasi kematian ibu melahirkan serta kesehatan dan gizi ibu dan anak (termasuk stunting). Sementara itu, proyek PAMSIMAS memberikan akses yang lebih luas ke pelayanan air bersih dan sanitasi yang penting bagi kesehatan ibu dan anak perempuan serta mendorong partisipasi perempuan dalam badan-badan pengambil keputusan di masyarakat. Proyek Kebijakan Satu Peta yang akan datang akan membantu meningkatkan persentase hak perempuan atas tanah yang terdaftar.





# Pelajaran Yang Dipetik

Di negara besar di mana ketersediaan sumber daya Bank Dunia masih terbatas dibandingkan dengan tingkat permintaan, pendekatan yang bertujuan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna meningkatkan kebijakan, kelembagaan, dan/atau sistem dalam penyelenggaraan program-program nasional akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan dampak transformasional yang berkelanjutan. Bagi Indonesia, skala penting bagi dampak, sehingga Bank Dunia menargetkan program-program nasional dan bertujuan untuk membantu pemerintah membangun program tersebut jika belum ada. Selain itu, Indonesia masih memiliki kapasitas yang lemah sehubungan dengan perencanaan, penganggaran, koordinasi, dan pelaksanaan, di mana masalah ini paling tepat ditangani di tingkat program agar bisa berkelanjutan. Penyempurnaan kebijakan, kelembagaan, dan/atau sistem perlu dilakukan untuk mempertahankan dampak, dan CPF ini mendedikasikan pengetahuan, bantuan teknis, dan sumber daya keuangan untuk tujuan tersebut melalui kerjasama program. Proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang Ketiga merupakan contoh yang baik dari penerapan pendekatan ini. PAMSIMAS mendukung pelaksanaan program pemerintah Akses Universal Air Bersih dan Sanitasi (100-0-100). Pinjaman dari IBRD senilai \$300 juta mempengaruhi pendanaan senilai \$1,09 miliar, termasuk pembiayaan pendamping dari pemerintah dan masyarakat (\$769,4 juta) dan pembiayaan hibah DFAT (\$25 juta). Proyek ini mendukung suatu platform yang memungkinkan belanja infrastruktur, termasuk peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community-Driven Development*, CDD). Hasil proyek yang diharapkan mencakup 27.000 desa dengan 22 juta penduduk penerima manfaat yang mendapatkan akses ke air bersih dan sanitasi yang

lebih baik, tersusunnya rencana peningkatan kapasitas di tingkat kabupaten, dan ditetapkan struktur pemantauan proyek yang menyediakan informasi secara berkala mengenai kualitas pelaksanaan proyek.

**Ketika solusi praktek terbaik global ternyata tidak memungkinkan atau tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka politik, ekonomi atau insentif lain saat ini, maka Bank Dunia harus siap mendukung upaya-upaya yang menjadi langkah-langkah inkremental menuju hasil yang ideal:** mengerahkan seluruh instrumen pengetahuan, saran kebijakan, dan pembiayaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan klien dalam konteks terkait. Apabila siklus politik menjadi kendala, maka Bank Dunia dapat mempertimbangkan untuk bekerja di tingkat teknis dengan mendefinisikan dan membangun dukungan untuk paket reformasi yang dapat diajukan ke badan legislatif selama beberapa bulan pertama setelah pemerintahan baru terbentuk, di mana saat itu lingkungan politik paling memungkinkan. Misalnya, selama transisi politik tahun 2014, Grup Bank Dunia menyediakan hasil analisis dan bantuan teknis untuk membantu mengurangi subsidi BBM dan, dengan demikian, mendukung realokasi sumber daya untuk program sosial dan investasi yang produktif.

**Sangat penting untuk mengidentifikasi secara proaktif dan terus-menerus melibatkan para pendukung, atau *champion*, di semua tingkat pemerintahan agar program dapat diselenggarakan dan berhasil.** Penggerak perekonomian politik mempengaruhi kemungkinan dan arah reformasi – rasa kepemilikan, komitmen, sumber daya, dan *champion* pemerintah untuk agenda reformasi merupakan faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan. Keberhasilan pelaksanaan program bukan hanya menuntut keterlibatan para *champion* dan komitmen dari tingkat tertinggi pemerintahan melainkan juga

kerjasama dengan mitra-mitra di tingkat teknis yang mempunyai rasa kepemilikan, tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap hasil yang ingin dicapai. Pengalaman pelaksanaan CPF mencakup contoh-contoh di mana keberadaan para *champion* di tingkat tinggi pemerintahan telah membuka bidang-bidang kerjasama baru (misalnya, dalam reformasi bantuan sosial), serta contoh-contoh di mana pelaksanaan CPF menghadapi kendala ketika komitmen mulai mengendur atau mitra-mitra yang tadinya berkomitmen tidak ada (misalnya, dalam konektivitas pelabuhan).

**Menyesuaikan pengetahuan Bank Dunia untuk hadirin-hadirin yang berbeda sangat penting untuk mendapatkan dampak yang diinginkan.** Bank Dunia bukan hanya menyiapkan laporan-laporan analisis utama dan catatan-catatan kebijakan yang tepat waktu, melainkan juga telah melangkah maju ke penggunaan presentasi-presentasi *Powerpoint* ringkas yang berisi pesan-pesan utama dengan dilengkapi infografik, grafik, dan diagram bagi para pejabat senior pemerintah. Selain itu, Bank Dunia menggunakan berbagai sarana untuk memperluas diseminasi pengetahuan. Misalnya, tim penanggulangan kemiskinan (*poverty team*) Bank Dunia telah menjadi ahli dalam menerjemahkan laporan-laporan utama berbasis data yang padat menjadi majalah berisi infografis yang memikat mata dan imajinasi dari lebih banyak orang. Laporan “Meluasnya Ketimpangan di Indonesia” telah digunakan sebagai dasar presentasi kepada para pejabat senior pemerintah dalam bentuk diskusi informal dan kemudian dikemas ulang menjadi presentasi bergaya TED Talk untuk hadirin yang berjumlah lebih dari 3.000 pemuda yang dilengkapi dengan sketsa singkat (*short vignettes*) dalam acara *Supermentor*. Laporan Perkembangan Perekonomian Triwulan Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly*), yang memuat informasi ekonomi triwulan terbaru (Bagian A) yang dilengkapi dengan catatan singkat spesifik sektor berdasarkan topik (Bagian B) diluncurkan setiap triwulan dengan sambutan utama dari Menteri-Menteri pemerintahan, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, dan terkadang duta-duta besar dari negara-negara bilateral terkait, lalu diikuti dengan diskusi panel mengenai topik sektoral. Selanjutnya, laporan ini disebarluaskan melalui *email* dan melalui media sosial. Pada bulan Desember 2017, laporan ini diunduh lebih dari 1.000 kali, selain 800 salinan cetak yang dibagikan.

**Terlibat dengan sponsor lokal sebelum terbuka kesempatan untuk membuat kesepakatan merupakan faktor keberhasilan kunci bagi IFC dalam menyelenggarakan program-programnya.** Keterlibatan proaktif sejak dini dengan sponsor lokal akan membuat kehadiran IFC lebih jelas terlihat di pasar dan membantu menentukan posisi IFC ketika terbuka kesempatan untuk berkolaborasi di masa mendatang. Misalnya, untuk mempromosikan agenda perubahan iklim, IFC telah memulai sejumlah diskusi awal dengan lembaga-lembaga keuangan sasaran mengenai caranya mengembangkan portofolio ‘hijau’. IFC akan memimpin pengembangan ini dengan pertama-tama memberikan dukungan peningkatan kapasitas dalam pembentukan, penjaminan, dan pemantauan portofolio, dan akhirnya bertujuan jangka panjang untuk menyediakan jalur pembiayaan khusus kepada lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk mendukung pemberian pinjaman ‘hijau’. Contoh lain dari kerjasama saat ini dengan klien-klien investasi baru adalah perusahaan pangan/agribisnis terkemuka yang mendukung baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal maupun pasar ekspor, dan kelompok lokal yang telah mapan yang mendukung sektor industri, pariwisata dan infrastruktur. Bentuk-bentuk kerjasama dengan kelompok-kelompok ini telah dikembangkan melalui interaksi yang terus-menerus selama beberapa tahun, dengan penawaran yang bernilai tambah seperti layanan konsultasi IFC yang juga memainkan peranan penting.

**Untuk mengatasi kendala kerjasama dengan sektor swasta akibat dominasi BUMN yang berkepanjangan, dibutuhkan solusi koheren dari Grup Bank Dunia, dan pendekatan MFD menjadi platform yang baik.** Di sektor-sektor seperti infrastruktur, lembaga keuangan, dan industri berat (misalnya, penyulingan minyak, pupuk, semen, baja), pemerintah masih sangat mengandalkan BUMN untuk menggerakkan dunia usaha dan memperlihatkan preferensinya kepada BUMN dengan memberi mereka subsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pinjaman mikro. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap keinginan sektor swasta untuk terlibat atau berpartisipasi di sektor-sektor tersebut. Pendekatan MFD Bank Dunia untuk melindungi sumber daya publik yang terbatas (seperti subsidi untuk BUMN) dengan memprioritaskan solusi sektor swasta seharusnya dapat membantu mengatasi kendala ini dan mendorong lebih banyak partisipasi sektor swasta.

# Penyesuaian Kerangka Kemitraan Negara

CPF masih menjadi kerangka kolaborasi dan kerjasama yang efektif dengan pemerintah, dan meskipun PLR menegaskan adanya relevansi dalam keenam bidang kerjasama dan dua balok pendukung, sejumlah penyesuaian telah dilakukan terhadap program. Penyesuaian-penyesuaian itu mencerminkan meningkatnya prioritas dan kebutuhan pengembangan modal manusia dan maksimalisasi keuangan untuk pembangunan infrastruktur, dan menguatnya fokus pada pelaksanaan melalui program-program nasional dan pemberian pinjaman berbasis kinerja, serta kendala ekonomi politik di sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dibandingkan dengan situasi saat persiapan CPF. Penyesuaian-penyesuaian itu mencakup menghilangkan fokus pada mode penyelenggaraan (nasional/daerah, pedesaan atau perkotaan), karena seraya berlalunya waktu, perbedaannya tidak lagi relevan; mengatur kembali ruang lingkup tujuan karena adanya perubahan waktu atau ruang lingkup operasional akibat ekonomi politik atau masalah-masalah lain; dan perluasan ruang lingkup tujuan tertentu yang mencakup prioritas-prioritas baru yang mendesak. Matriks hasil telah dimodifikasi berdasarkan penyesuaian yang dilakukan, dengan mengurangi jumlah tujuan (digabungkan atau dihapuskan, sesuai dengan kebutuhan); mendefinisikan kembali tujuan-tujuan untuk mencerminkan ruang lingkup yang telah dimodifikasi; menghapuskan banyak indikator, menerapkan indikator-indikator baru sesuai dengan kebutuhan, dan merevisi tanggal dan nilai yang ditargetkan. Kerangka Hasil yang telah direvisi disajikan dalam Lampiran 1.

**Bidang Kerjasama 1 sedang didefinisikan kembali sebagai Infrastruktur Nasional untuk Pertumbuhan dan Pembangunan yang mencerminkan diperluasnya ruang lingkup dan berkurangnya penekanan pada mode penyelenggaraan** (nasional dibandingkan

dengan daerah). Mode penyelenggaraan merupakan prinsip pengorganisasian CPF di mana program infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat tercermin dalam Bidang Kerjasama 1 dan program infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tercermin dalam Bidang Kerjasama 4. Selama pelaksanaan CPF, perbedaan ini kehilangan relevansinya karena pendekatan platform telah diutamakan. CPF akan tetap mencari peluang untuk mendukung program-program investasi infrastruktur pemerintah yang signifikan, yang akan mempengaruhi faktor-faktor mendasar yang mendorong pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan melalui bidang kerjasama ini. Bidang kerjasama ini juga akan tetap mendukung pelaksanaan platform penyelenggaraan secara luas, serta fokus baru untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dan memungkinkan pembiayaan infrastruktur secara komersial dan oleh swasta sebagai bagian dari fokus korporasi terhadap MFD. Selama sisa periode CPF, Grup Bank Dunia diharapkan akan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan pariwisata terpadu, bendungan dan irigasi, serta perumahan di bawah Bidang Kerjasama ini.

**Bidang Kerjasama 3: Maritim dan Konektivitas, telah direvisi untuk menghapuskan tujuan terkait peningkatan praktik pengelolaan perikanan dan memperluas konektivitas untuk mencakup konektivitas laut dan darat.** Bank Dunia telah bekerja sama secara intensif pada pertengahan pertama periode CPF dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyusun paket konsultasi dan investasi dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mempromosikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Akan tetapi, prioritas KKP secara eksklusif difokuskan pada: (a) penghapusan penangkapan ikan secara ilegal, dan (b) meningkatkan produktivitas ekonomi sektor perikanan. Oleh karena

itu, upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan kurang bisa diterima oleh KKP, dan oleh karenanya, tujuan CPF ini telah dihapuskan. Selama periode CPF, kerjasama Grup Bank Dunia dalam bidang ini bertujuan untuk mendukung program-program konsultasi kebijakan dan investasi yang meningkatkan konektivitas di laut maupun darat. Kerjasama yang sedang berlangsung maupun yang direncanakan selama sisa periode CPF mencakup instrumen-instrumen berbasis kebijakan untuk meningkatkan sektor logistik dan program penyelenggaraan platform dalam rangka meningkatkan efisiensi jaringan jalan nasional di koridor-koridor logistik utama maupun dukungan untuk program kemitraan publik-swasta (PPP) untuk jalan tol nasional. Bidang kerjasama ini akan tetap mendukung Indonesia dalam upayanya untuk mengelola secara berkelanjutan sumber daya laut dan pantainya, terutama melalui program konsultasi pengelolaan pantai dan laut serta polusi laut.

**Bidang Kerjasama 4: Penyelenggaraan Pelayanan dan Infrastruktur di Daerah, secara prinsip tetap sama namun tujuan dalam bidang kerjasama ini telah disempurnakan agar sejalan dengan perkembangan kegiatan.** Tujuan 6: 'Memperkuat kerangka desentralisasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di daerah' telah direvisi agar lebih mencerminkan fokus indikator yang mengukur pencapaian tujuan itu. Tujuan 7: 'Meningkatkan urbanisasi yang berkelanjutan' telah direvisi untuk menghapuskan acuan ke kota-kota sasaran, karena kerjasama yang direncanakan maupun sedang berlangsung selama sisa periode CPF mempunyai lingkup nasional dan berfokus antara lain pada layanan air bersih, pembangunan perkotaan, transportasi, dan limbah padat. Tujuan 8: 'Meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas' telah direvisi untuk mengurangi penekanan pada perbedaan perkotaan/pedesaan dalam intervensi, dan untuk mencerminkan perluasan ruang lingkup tujuan agar mencakup intervensi-intervensi baru yang berkaitan dengan gizi karena hal ini sebenarnya merupakan krisis nasional dengan 37 persen anak balita mengalami gangguan pertumbuhan (stunting). Intervensi-intervensi itu merupakan hasil dari advokasi yang kuat dari pihak Grup Bank Dunia sehingga mendorong disusun dan diluncurkannya Rencana Aksi Gizi Nasional yang pelaksanaannya dipimpin oleh Wakil Presiden, semuanya dengan dukungan dari program-program kebijakan, konsultasi, dan investasi.

**Dalam Bidang Kerjasama 5: Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, dua tujuan telah digabung.** Setelah dipertimbangkan, kedua tujuan itu hanya menggambarkan "dua sisi dari satu koin yang sama". Selanjutnya, sebagaimana dibahas dalam Bab III, kendala ekonomi politik dan tata kelola sangat menghambat persiapan Program Percepatan Reformasi Agraria dan Proyek Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang seharusnya menjadi penyumbang utama untuk hasil-hasil terkait peningkatan jaminan penguasaan dan pemanfaatan lahan maupun transparansi penetapan batas-batas Kawasan Hutan. Tujuan gabungan itu menjadi 'penguatan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan yang terdesentralisasi'. Kerjasama yang sedang berlangsung dan yang direncanakan selama sisa periode CPF meliputi program-program konsultasi kebijakan dan investasi yang: (a) memperbaiki tata kelola dan pengelolaan lahan dan hutan, (b) menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan dan degradasi sumber daya alam dengan meningkatkan jaminan penguasaan dan pemanfaatan lahan, dan (c) memastikan agar masyarakat rentan yang hidup di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan dapat memanfaatkan sumber daya hutan tersebut.

**Dalam Balok Pendukung 2, dua tujuan telah digabung, dan indikator dan target dari tujuan gabungan ini telah direvisi untuk mencerminkan kontribusi dari pinjaman yang belum diperhitungkan dalam persiapan CPF.** Dalam kerangka hasil CPF, Tujuan 18 di bawah Balok Pendukung 2 secara keliru mencantumkan, sebagai bagian dari deskripsinya, akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, di mana elemen-elemen yang sama juga dicerminkan dalam Tujuan 16: Meningkatkan akses ke pembiayaan. Intervensi-intervensi terkait akan sekarang tercermin secara komprehensif sebagai bagian dari Tujuan 16. Tujuan yang direvisi dalam Balok Pendukung 2, "Peningkatan perlindungan sosial dan akses ke lapangan pekerjaan yang produktif" mencerminkan ruang lingkup intervensi yang membantu pemerintah dalam mendefinisikan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk melindungi masyarakat miskin dan membantu mereka keluar dari kemiskinan dan memasuki kehidupan yang produktif. Tujuan yang direvisi itu juga akan mencakup indikator-indikator dan target-target yang mengukur dampak dari kontribusi pemberian pinjaman yang baru. CPF menjabarkan pekerjaan teknis dan analisis yang mendukung peningkatan program-program perlindungan sosial, tetapi suatu terobosan dalam



pembahasan telah menghasilkan pemberian pinjaman berbasis kinerja TA17 yang mendukung perluasan dan peningkatan program bantuan sosial pengentasan kemiskinan yang paling efektif di Indonesia, yaitu program bantuan tunai bersyarat PKH.

PLR menyederhanakan kerangka hasil dan memperkuat tujuan-tujuan, dan sebagai konsekuensinya, PLR memodifikasi cukup banyak indikator, namun ini bukan berarti ada perubahan substansial dalam program. Bahkan, program ini sebagian besar sama seperti yang dijabarkan ketika CPF disusun. Saat itu, Kerangka Hasil CPF berfokus terutama pada tujuan-tujuan yang didukung oleh proyek-proyek yang sedang dipersiapkan pada TA16. Indikator-indikator dari proyek-proyek ini kemudian dimodifikasi sebelum proyek-proyek ini disetujui oleh Direksi, dan oleh karena itu, diperlukan perubahan indikator agar selaras dengan yang sedang dijalankan oleh proyek. Karena sebagian besar pinjaman yang diberikan pada TA18-20 akan memberikan hasilnya setelah periode CPF ini, maka PLR hanya mencakup hasil-hasil tertentu dari beberapa pinjaman saja.

## Program Indikatif Grup Bank Dunia

**Pipeline IBRD untuk sisa periode CPF dinilai kuat dan beragam.** Setelah menyelenggarakan lebih dari setengah program yang direncanakan dengan nilai pinjaman IBRD sebesar \$7,5 miliar untuk periode CPF TA16-20, pipeline indikatif untuk tahun-tahun terakhir periode ini, yang dijabarkan dalam Tabel 3, masih sehat. Pipeline tersebut mencakup proyek-proyek infrastruktur yang sangat berorientasi pada MFD, serangkaian proyek pendidikan yang sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditingkatkan di bidang pengembangan modal manusia, dua operasi kebijakan pembangunan (DPO) di mana ini mencerminkan realita hasrat reformasi kebijakan selama musim pemilu (jika dibandingkan dengan lima DPO dalam 3 tahun pertama program), dan operasi yang mendukung lanskap berkelanjutan. Grup Bank Dunia akan mempertahankan program ASA yang luas dan kuat selama sisa periode CPF. Pemerintah secara aktif meminta saran-saran dari Grup Bank Dunia mengenai berbagai bidang

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. Tabel 4 memberikan ringkasan kegiatan utama yang bersifat non-pinjaman yang akan dilaksanakan oleh Bank Dunia untuk TA19-20. Lampiran 2 menguraikan rencana dan realisasi pembiayaan IBRD untuk seluruh periode CPF.

IFC ditetapkan akan mencapai target kerjasama barunya hingga sebesar \$3 miliar pada tahun 2020, berdasarkan *pipeline* yang kuat di bidang ekuitas, utang, jaminan (garansi), dan mobilisasi untuk membuka kesempatan bagi sektor swasta. Sesuai dengan CPF, IFC difokuskan untuk membantu mengatasi kesenjangan pembangunan utama di mana sektor swasta memainkan peranan penting. Kesenjangan pembangunan terjadi di tiga bidang tematik: (i) *pertumbuhan ekonomi*; (ii) *inklusi*; dan (iii) *keberlanjutan*. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, IFC mendorong keterlibatan sektor swasta untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan lebih baik di sektor manufaktur, meningkatkan efisiensi energi, memperbaiki logistik dan konektivitas, meningkatkan akses ke jaringan air bersih dan sanitasi, dan memperkuat pasar modal. Untuk mempromosikan inklusi, IFC sedang berfokus pada inklusi keuangan, pariwisata, kesehatan dan pendidikan, agribisnis, dan perumahan yang terjangkau. Di bidang keberlanjutan, IFC bermaksud untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dari minyak sawit dan kehutanan secara berkelanjutan dan mempromosikan bangunan hijau (ramah lingkungan) dan pembiayaan hijau

IFC saat ini sedang memperkuat *pipeline* proyeknya. Upaya yang dilakukan melibatkan lintas sektor, antara lain: (a) sektor *listrik*, khususnya energi terbarukan (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi); (b) *konektivitas*, melalui logistik, pelabuhan, bandara, jalan raya dan angkutan massal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya; (c) *air bersih dan sanitasi*, umumnya melalui kemitraan publik-swasta yang menyediakan air bersih dalam jumlah besar dan proyek-proyek energi yang diproses dari limbah di kota-kota besar di Indonesia, dan melalui kerjasama dengan Grup Bank Dunia; (d) *perumahan terjangkau* melalui pengembangan kota-kota kecil dengan perumahan yang murah; (e) *manufaktur kompetitif* dengan mengembangkan basis industri untuk mendorong investasi, ekspor, dan daya saing manufaktur; (f) *agribisnis* dengan membiayai perluasan usaha manufaktur pangan modern dan kompetitif

dan mempromosikan praktik-praktik terbaik industri untuk mewujudkan keberlanjutan di bidang sawit dan kehutanan melalui investasi dan konsultasi; (g) *layanan*, khususnya pendidikan, kesehatan, pariwisata dan rantai ritel; (h) *sektor keuangan* melalui UMKM dan pembiayaan perempuan maupun aplikasi keuangan digital/*fintech* untuk memanfaatkan maraknya kepemilikan telepon seluler; (i) *iklim* dengan mempromosikan obligasi hijau, mengembangkan aset hijau, dan menyediakan lokakarya pelatihan dan

peningkatan kapasitas di bidang Keuangan Iklim dan Obligasi Hijau bagi lembaga-lembaga keuangan melalui kolaborasi dengan OJK; dan (j) *pasar modal* dengan memperkenalkan produk-produk baru di pasar modal lokal dan berfungsi sebagai jangkar (penahan) untuk menarik investor baru. Dalam melaksanakan CPF, IFC bermitra dengan sponsor-sponsor luar maupun dalam negeri yang kuat dan klien-klien strategis yang juga memiliki agenda pembangunan di Indonesia seperti Grup Bank Dunia.

Tabel 3  
Pipeline Pinjaman Indikatif IBRD TA19–20<sup>a</sup>

No	Nama Proyek/Program	Instansi Pelaksana	Besaran dalam Juta \$ berdasarkan Instrumen Pinjaman		
			IPF	DPF	PforR
<b>Bidang Kerjasama 2: Energi Berkelanjutan dan Akses Universal</b>					
1.	Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi (GREM)	PT. SMI	225		
<b>Bidang Kerjasama 3: Maritim dan Konektivitas</b>					
2.	Program Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Nasional (PPP)	Kemen PUPR	100-300		
<b>Bidang Kerjasama 4: Penyelenggaraan Pelayanan dan Infrastruktur di Daerah</b>					
3.	Penguatan Kelembagaan untuk Penyelenggaraan Pelayanan Desa yang Lebih Baik	Kemendes PDPT			350
4.	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pendidikan	Kemendikbud			300
5.	Merealisasikan Janji Pendidikan di Indonesia	Kemenag	100-250		
6.	Peningkatan Pengelolaan Limbah Padat untuk Mendukung Kota-Kota Regional & Metropolitan	Kemen PUPR	100		
7.	Program Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Nasional	Kemen PUPR	200		
8.	Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (RIDF) II/AF	PT. SMI	200-400		
9.	Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (NUDP)	Kemen PUPR	50		
10.	Program Transportasi Perkotaan Nasional	TBD	250-500		
<b>Bidang Kerjasama 5: Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan</b>					
11.	Program Percepatan Reformasi Agraria dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Kemen ATR	200		
<b>Bidang Kerjasama 6: Meningkatkan Pendapatan dan Membelanjakannya dengan Lebih Baik</b>					
12.	DPF 3 Reformasi Fiskal	Kemenkeu		300	
13.	Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka Reformasi Birokrasi	BAPPENAS	100-150		
<b>Balok Pendukung 1: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta – Investasi, Iklim Usaha dan Fungsi Pasar</b>					
14.	DPF Sektor Keuangan			150	
<b>Balok Pendukung 2: Kemakmuran Bersama, Pemerataan dan Inklusi</b>					
15.	Proyek Pengembangan Keterampilan	Kemnaker			200

Catatan: IPF = Pembiayaan Proyek Investasi (*Investment Project Financing*); Kemen PUPR = Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; PT. SMI = PT. Sarana Multi Infrastruktur, BUMN yang bergerak di bidang Infrastruktur; Kemendes PDPT = Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kemendikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kemenag = Kementerian Agama; Kemen ATR = Kementerian Agraria dan Tata Ruang; dan Kemnaker = Kementerian Ketenagakerjaan.

a. Nilai pembiayaan hanya bersifat indikatif dan akan ditentukan selama periode berjalan. Total paparan IBRD tidak boleh melebihi Single Borrowing Limit.

Tabel 4  
Ringkasan Kegiatan Non-Pinjaman Program

No	ID Tugas	Nama Tugas	GP/CCSA yang Memimpin
<b>Bidang Kerjasama 1: Infrastruktur Nasional untuk Pertumbuhan dan Pembangunan</b>			
1	P153802	Program AAA Urbanisasi Berkelanjutan Indonesia <sup>a</sup>	<i>Social, Urban, Rural, and Resilience</i>
<b>Bidang Kerjasama 2: Energi Berkelanjutan dan Akses Universal</b>			
2	P158183	Program Pengembangan Pipeline dan Kebijakan Energi Berkelanjutan dan Akses Universal (SEAP)	<i>Energy and Extractives</i>
<b>Bidang Kerjasama 4: Penyelenggaraan Pelayanan dan Infrastruktur di Daerah</b>			
3	P153219	Program AAA Undang-Undang Desa Indonesia	<i>Social, Urban, Rural, and Resilience</i>
4	P153828	PAAA Indonesia untuk Mendukung Cakupan Kesehatan Universal (UHC)	<i>Health, Nutrition, and Population</i>
5	P154976	IN-Desentralisasi untuk Pelayanan: Memperbaiki Desentralisasi Untuk Penyelenggaraan Pelayanan yang Lebih Baik <sup>b</sup>	<i>Governance</i>
6	P156674	Memperkuat pelayanan garis depan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) di masyarakat pedesaan miskin	<i>Education</i>
7	P157380	Mendukung Pendidikan Berkualitas 12 tahun bagi Semua	<i>Education</i>
8	P163590	Indonesia: Dukungan untuk Memperkuat Tanggapan Multi Sektor terhadap Gizi	<i>Health, Nutrition, and Population</i>
9	P166489	ID – Mendukung reformasi untuk mempercepat UHC	<i>Health, Nutrition, and Population</i>
<b>Bidang Kerjasama 5: Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan</b>			
10	P156489	Program AAA Lanskap Terpadu Indonesia	<i>Environment and Natural Resources</i>
<b>Bidang Kerjasama 6: Meningkatkan Pendapatan dan Membelanjakannya dengan Lebih Baik</b>			
11	P132241	Program Kerjasama Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro	<i>Macroeconomics, Trade, and Investment</i>
12	P155648	Memperkuat Pengelolaan Pendapatan dan Belanja di Indonesia	<i>Governance</i>
13	P156142	Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Indonesia <sup>c</sup>	<i>Macroeconomics, Trade, and Investment</i>
<b>Balok Pendukung 1: Iklim Usaha dan Fungsi Pasar</b>			
14	P157491	Pembiayaan & Pembangunan Infrastruktur Indonesia	<i>Public Private Partnership</i>
15	P163296	Bantuan Teknis Sektor Keuangan Indonesia	<i>Finance, Competitiveness, and Innovation</i>
<b>Balok Pendukung 2: Kemakmuran Bersama, Pemerataan dan Inklusi</b>			
16	P159575	Kemitraan Kebijakan Penanggulangan Ketimpangan	<i>Poverty and Equity</i>
17	P163964	Program Aksi Lapangan Kerja Indonesia	<i>Social Protection and Jobs</i>

Catatan: CCSA = Cross-cutting Solution Area – Solusi Lintas Bidang

- a. PASA ini juga mendukung Bidang Kerjasama 4.
- b. PASA ini juga mendukung Bidang Kerjasama 6.
- c. PASA ini juga mendukung Bidang Kerjasama 2.



# Risiko Terhadap Program CPF

**Risiko secara keseluruhan terhadap pencapaian tujuan-tujuan CPF masih tetap Cukup Tinggi.** Hasil penilaian risiko dalam PLR terhadap delapan kategori risiko dari Alat Pemeringkat Risiko Operasional Sistematis (*Systematic Operations Risk-Rating Tool*, SORT; lihat Tabel 5) secara garis besar konsisten dengan hasil penilaian pada saat persiapan CPF, dengan dua perkecualian. Perubahan pertama adalah membaiknya tingkat risiko ekonomi makro dari peringkat “Cukup Tinggi” menjadi “Sedang” karena pertumbuhan yang baik dan menguatnya kerangka kebijakan moneter, makro-prudensial dan fiskal dibandingkan dengan status kerangka kebijakan ketika CPF disetujui. Kedua, risiko fidusia memburuk dari peringkat “Sedang” menjadi “Cukup Tinggi”. PLR mempertahankan peringkat risiko politik dan tata kelola (Cukup Tinggi) dan kapasitas kelembagaan untuk pelaksanaan (Cukup Tinggi) dan lingkungan dan sosial (Tinggi).

**Politik dan tata kelola.** Ada momentum reformasi untuk mengatasi risiko tata kelola yang diperkirakan akan dihadapi pada saat penyusunan CPF, khususnya dalam mempromosikan investasi di sektor infrastruktur dan energi. Sampai bulan Agustus 2017, pemerintah telah mengeluarkan total 16 paket deregulasi kebijakan ekonomi sejalan dengan upayanya untuk mempromosikan investasi dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap dunia usaha. Di pihak lain,

**Tabel 5**

SORT yang Direvisi: Risiko terhadap Tujuan CPF di Indonesia

Kategori Risiko	Peringkat
1. Politik dan tata kelola	S
2. Ekonomi Makro	M
3. Strategi dan kebijakan sektor	M
4. Desain teknis proyek atau program	L
5. Kapasitas kelembagaan untuk pelaksanaan dan keberlanjutan	S
6. Fidusia	S
7. Lingkungan dan sosial	H
8. Pemangku kepentingan	L
Keseluruhan	S

Keterangan: H = High (Tinggi); S = Substantial (Cukup Tinggi); M = Moderate (Sedang); L = Low (Rendah).

seraya mendekatnya pelaksanaan pemilu di tingkat parlemen dan presiden yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan April 2019, ada peningkatan risiko melambatnya pelaksanaan program CPF. Kompetisi politik tampaknya akan semakin gencar sehingga mempersulit adanya reformasi ekonomi dan struktural yang vital. Mengejar tujuan-tujuan CPF yang berkaitan dengan perbaikan kualitas kehidupan dan iklim usaha akan lebih cocok selama musim pemilu ini, sedangkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan dan energi yang berkelanjutan akan lebih sulit dicapai. Potensi perubahan prioritas pemerintah setelah pelaksanaan pemilu dan pergantian mitra utama/*champion* reformasi juga bisa menimbulkan tantangan bagi kemajuan pelaksanaan program CPF. Misalnya, pemerintahan yang ada sekarang telah mengambil sikap yang berani dalam menghadapi pemicu utama dari kendala-kendala dalam lanskap berkelanjutan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran dan pengelolaan dataran rendah, yang menghadapi perlawanan bahkan di internal pemerintahan itu sendiri. Kehilangan *champion* kunci untuk reformasi di bidang-bidang tersebut, baik di tingkat nasional maupun daerah/provinsi, merupakan risiko yang tinggi bagi program lanskap yang berkelanjutan. Tim Bank Dunia untuk Indonesia akan terus memberikan perhatian pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik dan menjalin kerjasama strategis dan selektif dengan menggunakan pengetahuan dan bantuan teknis, khususnya melalui penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan dan masukan-masukan dalam proses penyusunan RPJMN untuk bekerja sama di tingkat politik (petahana maupun oposisi) dan teknis mengenai tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan CPF.

**Kapasitas kelembagaan untuk pelaksanaan dan keberlanjutan.** Risiko sebagaimana dijelaskan pada tahap persiapan CPF, yaitu kesulitan pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur besar, telah berkurang termasuk karena adanya perubahan peraturan-peraturan penting yang memungkinkan kontrak tahun jamak (*multiyear*) untuk proyek

infrastruktur besar (yang juga didukung oleh DPF Reformasi Fiskal). Akan tetapi, Kajian Portofolio dan Kinerja Negara (*Country Portfolio and Performance Review*, CPPR) tahun 2018 mengidentifikasi masalah-masalah operasional sistemik sehubungan dengan koordinasi antar lembaga dan antara pemerintah daerah dengan pusat, lemahnya Unit-Unit Pelaksana Program dan kapasitas mitra, khususnya di tingkat daerah, dan tantangan dalam memahami dan menaati ketentuan pengamanan (*safeguards*) fidusia, lingkungan dan sosial. Tantangan-tantangan tersebut terus menghambat persiapan dan pelaksanaan program, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Sebagai upaya mitigasi, Bank Dunia akan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah (terutama dengan Bappenas dan Kemenkeu) untuk memberikan dukungan pelaksanaan program, termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum disepakatinya pinjaman luar negeri (*advance procurement*) dan pemanfaatan fasilitas persiapan proyek, bantuan teknis, dan pelatihan kepada para mitra dan tim-tim proyek. Ke depannya, program Grup Bank Dunia yang ada membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan dan lebih erat di antara ketiga lembaga dalam Grup Bank Dunia dan di seluruh GP agar dapat menyelenggarakan program CPF secara ambisius. Demikian pula, persiapan dan pelaksanaan proyek menuntut agar pemerintah bekerja melalui seluruh kementerian serta lembaga publik dan swasta. Tim manajemen Bank Dunia untuk Indonesia akan terus meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan program, yang mencakup kehadiran tenaga ahli internasional di Indonesia, penguatan kolaborasi antara GP-GP dan unit-unit Bank Dunia, dan peningkatan sumber daya, termasuk Dana Perwalian (*Trust Fund*), untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

**Fidusia.** Selama periode pelaksanaan CPF, Bank Dunia telah mengamati kuatnya preferensi lembaga-lembaga pelaksana utama untuk menggunakan peraturan pengadaan barang/jasa nasional—dibandingkan pedoman pengadaan barang/jasa atau konsultan dari Bank Dunia—dan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) nasional yang kurang memadai untuk melaksanakan pelelangan internasional (*International Competitive Bidding*, ICB). Preferensi ini memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja portofolio karena menyebabkan keterlambatan pelaksanaan, penarikan paket-paket kontrak, dan pembatalan pinjaman. Selain itu, telah diamati adanya penyimpangan integritas, khususnya dalam kontrak yang nilainya

relatif rendah yang pengelolaannya dilakukan secara desentralisasi. Dalam beberapa kasus, ada keengganan untuk mengikuti Pedoman Anti-Korupsi Bank Dunia atau saran-saran Bank Dunia dalam menerapkan pedoman Bank Dunia secara benar. Pemerintah telah mengesahkan peraturan yang menegaskan bahwa pedoman fidusia Grup Bank Dunia berlaku bagi proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang mensosialisasikan peraturan ini kepada lembaga-lembaga pelaksana proyek, termasuk pada saat kegiatan CPPR gabungan antara Grup Bank Dunia dan pemerintah yang diadakan bulan Agustus 2018. Bank Dunia bekerja sama secara erat dengan LKPP untuk memfasilitasi modifikasi sistem *e-procurement* agar dapat diterapkan dalam metode ICB, dan memberikan pelatihan yang relevan kepada unit-unit pelaksana proyek serta memperkuat tindakan-tindakan anti-korupsi dalam desain dan pelaksanaan proyek, yang seharusnya dapat memitigasi risiko-risiko ini.

**Lingkungan dan sosial.** Peningkatan risiko lingkungan dan sosial timbul dari pengarusutamaan model 'platform' pada portofolio. Model ini, di mana sumber daya IBRD mendorong pendanaan dari pemerintah, mitra-mitra pembangunan dan, dalam beberapa kasus, sektor swasta, untuk mendukung program-program besar yang dimiliki dan dijalankan pemerintah, dapat meningkatkan risiko karena Bank Dunia memantau kepatuhan terhadap ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial dari program-program pemerintah yang besar dan bukan hanya bagian-bagian khusus yang dibiayai sumber daya IBRD saja, misalnya PAMSIMAS dan Proyek Pengembangan Pariwisata yang sedang berlangsung. Untuk memitigasi risiko ini, tim manajemen Bank Dunia untuk Indonesia akan terus mengadvokasi adanya staf pengamanan (*safeguards*) yang memadai dan berkualitas tinggi dan akan secara lebih intensif memberikan pembangunan kapasitas kepada mitra-mitra pemerintah terkait kepatuhan pada ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial, khususnya melalui usulan Jaringan Pusat Pembelajaran Indonesia untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial. Yang terakhir, Indonesia mengalami insidens bencana alam yang tinggi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir, yang terus menimbulkan risiko bagi program, sebagaimana diidentifikasi pada waktu persiapan CPF. Program menjaga fleksibilitasnya untuk mengatur sumber daya sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi bencana alam.

# LAMPIRAN

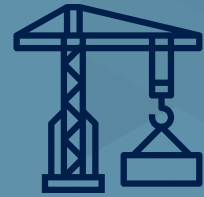
# **Lampiran 1**

## **KERANGKA HASIL CPF YANG DIPERBAHARUI**



## BIDANG KERJASAMA 1

# INFRASTRUKTUR NASIONAL UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN



### Definisi bidang fokus

Infrastruktur Nasional untuk Pertumbuhan dan Pembangunan akan berfokus pada sektor infrastruktur dan isu-isu lintas bidang yang penting bagi pertumbuhan keseluruhan dan agenda pembangunan. Infrastruktur investasi publik masih belum seimbang dengan pertumbuhan yang terjadi. Antara tahun 2005 sampai 2015, modal publik Indonesia bertumbuh sebesar 2,8 persen per tahun, jauh di bawah Vietnam (10,3 persen), Tiongkok (6,7 persen) dan Malaysia (3,7 persen). Investasi tahunan rata-rata untuk modal infrastruktur inti bertumbuh hanya sebesar 1,8 persen dari tahun 2001 sampai 2012. Seandainya modal ini bertumbuh sebesar 5 persen, maka diperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan mencapai rata-rata 6 persen. Angka 5 persen itu juga akan dapat mengurangi kemiskinan sebesar 2 poin persentase. CPF akan terus mencari peluang untuk mendukung program-program investasi infrastruktur pemerintah yang signifikan yang akan mempengaruhi pendorong utama pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan melalui bidang kerjasama ini. Bidang kerjasama ini juga akan terus mendukung pelaksanaan platform penyelenggaraan pelayanan yang luas dan memperbaharui fokus untuk mendorong sektor swasta dan memungkinkan pembiayaan komersial dan swasta untuk infrastruktur sebagai bagian dari fokus korporasi terhadap maksimalisasi pembiayaan untuk pembangunan (MFD).

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Sebagaimana dijabarkan dalam laporan Diagnostik Negara Sistematis (Systematic Country Diagnostic, SCD), pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran bersama di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan mengatasi kesenjangan infrastruktur yang besar. Mengurangi kesenjangan infrastruktur akan mendukung tercapainya kedua tujuan ini dengan mengurangi kendala-kendala akibat keterbatasan infrastruktur terhadap daya saing, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Bidang kerjasama ini berkaitan dengan Jalur SCD 1: Penciptaan Lapangan Kerja dengan mengatasi salah satu kendala terbesar terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang berproduktivitas tinggi, dan Jalur 2: Penyelenggaraan Pelayanan dan Kesempatan bagi Semua

### Tujuan Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (RPJMN) memberikan penekanan yang kuat pada pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, termasuk penekanan pada akses ke perumahan yang terjangkau, infrastruktur pariwisata yang terpadu, inovasi pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan PPP, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan irigasi.

## → Tujuan 1

# MENINGKATKAN AKSES KE SISTEM PENGAIRAN MELALUI IRIGASI DAN KEAMANAN BENDUNGAN

### Logika Intervensi

Ketahanan pangan diprioritaskan dalam RPJMN 2015–2019 dengan berfokus pada modernisasi infrastruktur irigasi, rehabilitasi 3 juta hektar saluran irigasi dan pembangunan 1 juta hektar saluran irigasi baru. Dengan target yang ambisius ini, kerjasama Grup Bank Dunia akan berfokus pada pemanfaatan sumber daya IBRD untuk merehabilitasi skema-skema yang ada, yang dilengkapi dengan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyuluhan, dan memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan partisipasi pengguna dan kesinambungan investasi. Pada saat yang sama, IFC akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi bendungan-bendungan irigasi yang dapat ditingkatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan, bilamana cocok, membantu menawarkan sebagian proyek sebagai kemitraan publik-swasta (PPP) untuk melibatkan partisipasi swasta yang selama ini kurang ada dalam pembangunan dan kegiatan operasional. IFC juga akan terus membantu perusahaan-perusahaan pertanian dalam menggunakan air secara lebih efisien untuk ladang-ladang mereka dan membantu mereka dalam pengelolaan sisi permintaan.

### Indikator Tujuan CPF

Jumlah penduduk yang menikmati saluran irigasi dan drainase yang lebih baik

- *Baseline*: 4,5 juta (2016)
- *Target*: 5,8 juta (2020)

Jumlah penduduk yang menikmati keamanan bendungan yang lebih baik

- *Baseline*: 3,1 juta (2016)
- *Target*: 5,85 juta (2020)

### Indikator Kemajuan Tambahan

Perkumpulan petani pemakai air yang terbentuk atau diperkuat

- *Baseline*: 1.913 (2016)
- *Target*: 2.065 (2018)

Jumlah bendungan yang direhabilitasi

- *Baseline*: 35 (2016)
- *Target*: 90 (2020)

### Program Grup Bank Dunia

Yang sedang berlangsung:

- Proyek Perbaikan dan Keamanan Operasional Bendungan (DOISP) (P096532)
- Proyek Perbaikan dan Keamanan Operasional Bendungan Tahap II (161514), disetujui TA17
- Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi 2 (WISMP-2) (P114348)
- Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) (P157585) – disetujui TA18

## → Tujuan 2

### **MENINGKATKAN AKSES KE PERUMAHAN TERJANGKAU**

#### **Logika Intervensi**

Akses ke perumahan merupakan tantangan yang sangat penting bagi Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Pemerintah saat ini telah membuat secara eksplisit prioritas kebijakan mereka sebagai mengurangi kekurangan perumahan dan menyediakan perumahan yang terjangkau. Dengan program Satu Juta Rumah, yang diluncurkan bulan April 2015, pemerintah telah menetapkan target yang ambisius untuk menyediakan satu juta rumah setiap tahun untuk memenuhi permintaan keluarga baru dan menutupi defisit perumahan. Grup Bank Dunia bermaksud akan bekerja dengan sektor publik maupun swasta untuk mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau melalui pemberian pinjaman dan bantuan teknis di sisi permintaan maupun penawaran, termasuk mendorong sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek perumahan yang terjangkau serta mendukung lembaga-lembaga keuangan dalam menyediakan kredit pemilikan rumah (hipotek). IFC juga akan mempromosikan penerapan konsep bangunan hijau (ramah lingkungan) di kalangan pengembang perumahan swasta.

#### **Indikator Tujuan CPF**

Jumlah keluarga sasaran yang dibantu oleh Program (BSPS) untuk pemilikan rumah terjangkau

- *Baseline*: 0 (2017)
- *Target*: 105.000.000 (2020)

#### **Indikator Kemajuan Tambahan**

Nilai pembiayaan hipotek yang berkaitan dengan bantuan BP2BT (perumahan) yang didukung (\$)

- *Baseline*: 0 (2017)
- *Target*: 105.000.000 (2020)

Jumlah unit rumah sesuai dengan ketentuan bangunan hijau atau menerima sertifikasi bangunan hijau EDGE (*Excellence in Design for Greater Efficiencies*)

- *Baseline* (2014): 0
- *Target* (2020): 332.749

#### **Program Grup Bank Dunia**

Yang sedang berlangsung:

- PAAA Lahan, Perumahan dan Permukiman Perkotaan (P149874 - ACS diselesaikan).
- Program Perumahan Terjangkau Nasional (P154948 – disetujui TA17; 2 jendela pembiayaan: BP2BT untuk bantuan kredit pemilikan rumah dan BSPS untuk pemilikan rumah terjangkau)
- IFC: Jaminan Kredit Parsial melalui Obligasi Ciputra Residence (#33018)
- IFC: Pinjaman Ciputra Residence (#37122)
- IFC: Promosi Bangunan Hijau Indonesia – Tahap II (#602197)

### → Tujuan 3

## **PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA TERPADU**

### **Logika Intervensi**

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan budaya yang luar biasa dan ekstensif sehingga membuat pariwisata berpotensi menjadi salah satu sektor terpenting bagi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan dan kemakmuran bersama dengan penyerapan banyak tenaga kerja perempuan dan kaum muda. Meskipun demikian, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam memanfaatkan keunggulan kompetitifnya. Indonesia kehilangan kesempatan besar di sektor penting ini karena mengalami kesenjangan tajam dalam infrastruktur, kelembagaan dan keterampilan. Grup Bank Dunia mengusulkan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dengan pendekatan komprehensif yang berfokus pada destinasi wisata prioritas 'pusat' (hub) pada mulanya, yang kemudian dikembangkan ke situs-situs lain sebagai bagian dari program pariwisata nasional. Program akan memanfaatkan sumber daya IBRD, IFC dan MIGA untuk mendukung pengembangan destinasi wisata terpadu, berdasarkan rencana induk terpadu dan strategi pelaksanaan yang disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan destinasi wisata terpadu dilakukan melalui proses koordinasi kebijakan dan perencanaan yang berkelanjutan dan akan menyatukan (atau, memadukan) pengembangan infrastruktur, promosi di tingkat nasional dan daerah, dan pengembangan keterampilan dan UKM. Hal ini juga mencakup investasi sektor swasta melalui produk-produk keuangan IFC dan MIGA untuk mendukung industri pariwisata dan mendukung masyarakat lokal dalam memberikan pengalaman yang berkualitas kepada para wisatawan, termasuk pembiayaan UKM dan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian berbasis pariwisata yang kompetitif.

### **Indikator Tujuan CPF**

Jumlah destinasi wisata terpadu dengan badan koordinator dan pengaturan pelaksanaan yang disahkan dengan surat keputusan pemerintah (SK)

- ↳ *Baseline*: 0 (2016)
- ↳ *Target*: 1 (2020)

### **Indikator Kemajuan Tambahan**

Jumlah rencana induk wisata terpadu yang tersusun

- ↳ *Baseline*: 0 (2016)
- ↳ *Target*: 3 (2020)

### **Program Grup Bank Dunia**

Yang sedang berlangsung:

- ↳ Proyek Pengembangan Pariwisata Indonesia (P157599)
- ↳ ASA Indonesia: Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (P164884)
- ↳ RETF untuk ITMP lebih lanjut yang dibiayai oleh MDTF Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (STD-MDTF, P164472)
- ↳ IFC: Indonesia: Iklim Investasi, Persaingan dan Sektor-Sektor Kompetitif (#602983) mempunyai komponen pariwisata.

## BIDANG KERJASAMA 2

# ENERGI BERKELANJUTAN DAN AKSES UNIVERSAL



### Definisi bidang fokus

Pemerintah berupaya secara serentak meningkatkan produksi energi keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan dan bersiap untuk pertumbuhan, secara substansial meningkatkan persentase energi terbarukan dalam persediaan energi, dan memberikan akses universal sebagai hak dasar seluruh warga negara Indonesia. Sektor listrik Indonesia menghadapi defisit infrastruktur yang sangat besar, dan pemerintah telah memproyeksikan bahwa Indonesia akan membutuhkan sedikitnya 35 GW kapasitas pembangkit baru beserta kapasitas transmisi dan distribusi terkait dalam sepuluh tahun mendatang.

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Sebagaimana dijabarkan dalam laporan SCD, pengembangan sektor energi berada di urutan teratas dari prioritas infrastruktur pemerintah dan hal ini juga adalah salah satu hambatan utama terhadap pertumbuhan, kemakmuran Bersama, dan pembentukan modal manusia. Kerjasama ini berkaitan dengan Jalur SCD 1: Penciptaan Lapangan Kerja dengan mengatasi salah satu kendala terbesar terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang berproduktivitas tinggi, dan Jalur 2: Penyelenggaraan Pelayanan dan Kesempatan bagi Semua, khususnya dalam agenda akses pelayanan.

### Tujuan Pembangunan Nasional

RPJMN 2015–2019 memiliki strategi energi yang komprehensif dengan investasi substansial untuk mencapai kedaulatan energi. Dimensi sektor utama dalam RPJMN mencantumkan empat sektor prioritas, yaitu: (a) kedaulatan energi dan listrik, (b) kedaulatan pangan, (c) maritim, dan (d) pariwisata dan industri. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber energi di dalam negeri (tenaga gas, air dan panas bumi) merupakan cara untuk mencapai kedaulatan energi dan listrik. Untuk mengatasi tantangan ini, pada tingkat strategis, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melaksanakan sejumlah kebijakan jangka panjang untuk (a) mengurangi dan menargetkan dengan lebih baik, subsidi energi untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya yang produktif; (b) memperluas akses listrik; (c) memperluas penyebaran energi terbarukan pada tahun 2025; dan (d) memobilisasi program kemitraan konservasi energi untuk mendorong perusahaan-perusahaan industri agar beralih menggunakan teknologi hemat energi.

#### → Tujuan 4

### MENINGKATKAN PASOKAN DAN AKSES ENERGI

#### Logika Intervensi

Tujuan ini akan didukung oleh Grup Bank Dunia melalui kerjasama dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan sektor, mendukung pembangunan energi terbarukan dan rendah karbon, memperluas akses ke pelayanan energi modern melalui pembangkit, transmisi dan distribusi listrik non-batubara, dan mendukung perumusan kebijakan sektor gas dan perencanaan investasi. Grup Bank Dunia akan memberikan dukungan melalui berbagai instrumen pembiayaan: Pembiayaan Proyek Investasi (IPF), Pembiayaan Kebijakan Pembangunan (DPF), Program untuk Hasil (PforRs), ekuitas dan pinjaman IFC untuk proyek swasta dan kombinasi asuransi risiko politik dan produk-produk jaminan risiko kegagalan pemenuhan kewajiban (*non-honoring*) di sektor energi terbarukan oleh MIGA.

#### Indikator Tujuan CPF

Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan listrik baru atau yang ditingkatkan

- ↳ *Baseline* (2015): 11,18 juta jiwa
- ↳ *Target* (2020): 13,18 juta jiwa

Kapasitas (MW) dari pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terpasang secara bertahap

- ↳ *Baseline* (2014): 0
- ↳ *Target* (2020): 150

Listrik non-batubara (tenaga air, gas)<sup>1</sup>

- ↳ *Baseline* (2014): 1.175
- ↳ *Target* (2020): 2.401

#### Indikator Kemajuan Tambahan

Negara peminjam mengeluarkan pendekatan kelistrikan nasional dengan koordinasi tanggung jawab kelembagaan, mekanisme pembiayaan dan perencanaan yang lebih baik

- ↳ *Baseline* (2015): Tidak
- ↳ *Target* (2017): Ya

Negara peminjam mengeluarkan peraturan pelaksanaan UU 2014 tentang Panas Bumi sehubungan dengan proses konversi energi panas bumi (geotermal) menjadi listrik

- ↳ *Baseline* (2015): Tidak
- ↳ *Target* (2017): Ya

#### Program Grup Bank Dunia

Ongoing:

- ↳ Pembangunan Transmisi Listrik Indonesia (P117323)
- ↳ Pembangunan Transmisi Listrik Indonesia Kedua (P123994)
- ↳ *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro-Electricity* (P112158)
- ↳ Investasi Energi Bersih Panas Bumi (P113078)
- ↳ PforR Efisiensi Distribusi Listrik II (P154805) – disetujui TA16
- ↳ Energi DPF I (P154291) – disetujui dan dicairkan penuh TA16
- ↳ Pembangunan Energi Panas Bumi Hulu (CTF/GEF P155047), disetujui TA17
- ↳ Penanaman modal IFC untuk Medco Power (#31462) – tercapai sepenuhnya
- ↳ IFC-BDSN (766617) Asahan I Hydropower – tercapai sepenuhnya
- ↳ Investasi IFC untuk mendukung proyek IPP dan transmisi bersih (#39879)
- ↳ Dukungan konsultasi PPP IFC untuk mengembangkan transmisi dan IPP berbasis energi terbarukan dan gas
- ↳ IFC: Program Energi Terbarukan Indonesia – Pengembangan Usaha (#600118; Pelayanan Konsultasi Lintas Industri)
- ↳ MIGA - Rajamandala Hydropower IPP (penerbitan garansi senilai \$200 juta)

Rencana Proyek:

- ↳ Pengelolaan Fasilitas Risiko Panas Bumi (P166071) - TA19
- ↳ Energi DPF II (P160394) - dihentikan
- ↳ IFC- Investasi baru untuk Medco Power (#40095)
- ↳ IFC-Investasi baru untuk BDSN Asahan I Hydropower (#40507)

<sup>1</sup> Melalui investasi IFC

## BIDANG KERJASAMA 3

# MARITIME AND CONNECTIVITY



### Definisi bidang fokus

Konektivitas yang baik merupakan prasyarat yang sangat penting untuk memasok pasar domestik secara efisien dan bersaing secara internasional. Konektivitas menjadi lebih penting lagi bagi negara kepulauan seperti Indonesia di mana laut dapat menjadi alat pemersatu atau sumber perpecahan dan keterasingan. Logistik pengiriman barang yang baik, dalam hal kecepatan maupun keterandalannya, melibatkan berbagai elemen yang mencakup infrastruktur fisik dan teknologi, regulasi yang baik dan operasi yang efisien, serta kualitas modal manusia. Tantangan konektivitas Indonesia secara umum dipengaruhi oleh pertimbangan konektivitas di laut maupun darat. Selama periode CPF, kerjasama Grup Bank Dunia di bidang ini bertujuan untuk mendukung program-program konsultasi kebijakan dan investasi yang transformasional yang akan meningkatkan konektivitas di laut maupun darat. Kerjasama yang sedang berlangsung maupun baru direncanakan selama sisa periode CPF mencakup instrumen-instrumen berbasis kebijakan untuk meningkatkan sektor logistik dan dukungan untuk program kemitraan publik-swasta (PPP) di bidang pembangunan jalan bebas hambatan nasional. Bidang kerjasama ini akan terus mendukung Indonesia dalam upayanya untuk mengelola secara berkelanjutan sumber daya laut dan pantai yang dimilikinya. Selama sisa periode CPF, bidang kerjasama ini akan mendukung tujuan tersebut, terutama melalui program kebijakan dan konsultasi dalam pengelolaan pantai dan laut serta penanggulangan polusi laut.

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Bidang kerjasama ini berkaitan dengan Jalur SCD 1: Penciptaan Lapangan Kerja dengan mengatasi salah satu kendala terbesar terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang berproduktivitas tinggi, Jalur 2: Penyelenggaraan Pelayanan dan Kesempatan bagi Semua, dan Jalur 3 dalam menyediakan infrastruktur dan lingkungan regulasi untuk memanfaatkan sumber daya alam, khususnya di kawasan pesisir agar lebih berkelanjutan dan manfaatnya dapat dinikmati lebih merata.

### Tujuan Pembangunan Nasional

RPJMN 2015–2019 menuntut adanya peningkatan efisiensi pelabuhan dan penetapan target yang jelas untuk mengurangi waktu tunggu pelayanan (*dwell time*) di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Pemerintah sedang menyusun beberapa Keputusan Presiden tentang peningkatan kualitas pelabuhan, pembangunan pelabuhan baru dan peningkatan efisiensi pelabuhan, selain investasi-investasi yang penting lainnya. RPJMN mencakup target yang jelas untuk restorasi mangrove dan peningkatan pengelolaan kawasan lindung dan spesies tertentu. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan yang sangat penting untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam laut dan pantai.

## → Tujuan 5

# MEMPERBAIKI LOGISTIK DAN KONEKTIVITAS MARITIM

### Logika Intervensi

Sebagai negara kepulauan, logistik dan konektivitas maritim memainkan peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan daya saing, memfasilitasi kemakmuran Bersama, dan menjamin akses yang baik ke barang dan jasa bagi semua warga negara Indonesia di mana pun lokasinya. Di daerah-daerah terpencil, biaya logistik yang tinggi semakin memperbesar keterasingan masyarakat dan membatasi hubungan ekonomi dengan pusat-pusat pertumbuhan sekitarnya; akhirnya hal ini memperkecil prospek untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Program Grup Bank Dunia memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kendala konektivitas dengan menjabarkan opsi-opsi dan prioritas-prioritas untuk meningkatkan efisiensi di bidang logistik pengiriman barang nasional. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk (a) meningkatkan kualitas perumusan kebijakan logistik secara keseluruhan melalui intervensi terhadap sektor-sektor kunci dan analisis kebijakan, (b) memperbaiki konektivitas maritim Indonesia dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberikan rekomendasi untuk solusi logistik yang lebih terpadu, dan (c) menekan biaya logistik dengan mempromosikan reformasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, dengan mengatasi rintangan yang membatasi investasi dan pengembangan usaha di sektor ini.

### Indikator Tujuan CPF

Penurunan waktu tunggu pelayanan di dua pelabuhan utama

- *Baseline*: 5,5 hari di Tanjung Priok dan 6,3 hari di Tanjung Perak (2015)
- *Target*: 3 hari (2020) di kedua pelabuhan

Bertambahnya jumlah izin asing baru untuk freight forwarder dan penyedia jasa pergudangan dan penyimpanan dingin (cold storage)

- *Baseline* (2015): 20 izin untuk freight forwarder dan 3 izin untuk jasa pergudangan dan penyimpanan dingin
- *Target* (2020): 25 izin untuk freight forwarder dan 18 izin untuk jasa pergudangan dan penyimpanan dingin

### Indikator Kemajuan Tambahan

Bertambahnya jumlah pelabuhan yang melayani kapal berkapasitas lebih dari 2.000 TEU di 14 pelabuhan barang peti kemas utama di 4 Pelabuhan Indonesia (Pelindo)<sup>2</sup>

- *Baseline* (2015): 3 pelabuhan
- *Target* (2020): 11 pelabuhan

### Program Grup Bank Dunia

Yang sedang berlangsung:

- Jalan Nasional Indonesia Barat (P090990)
- Pengelolaan Biaya Logistik di Indonesia (P146261) – ditutup TA16
- PA Perdagangan dan logistik (P156780) – dihentikan TA16
- DPF Maritim, logistik & konektivitas (MLC I) (P158140) – ditutup TA18.
- DPF Maritim, logistik & konektivitas (MLC II) (P163973) – disetujui TA18
- Dukungan pinjaman dari IFC untuk *Jakarta International Container Terminal* (#27117) – tercapai sepenuhnya
- Inisiatif Transportasi dan Konektivitas Berkelanjutan di Bali (P165320)
- Platform Pembangunan Pelabuhan Indonesia Timur (P160693) – dihentikan TA18
- Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (COREMAP-CTI) (P127813)

Rencana Baru:

- Program Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) Nasional (P162300) – TA20
- Investasi IFC bersama pengembang dan operator pelabuhan swasta

<sup>2</sup> Pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan sekunder terbesar di setiap Pelindo, yang didominasi dengan muatan berpeti-kemas: Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Balikpapan, Bitung, Ambon, Tanjung Emas, Banjarmasin, Pontianak, Teluk Bayur, Jayapura, Ternate, dan Kendari.



## BIDANG KERJASAMA 4

# PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH



### Definisi bidang fokus

Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan desentralisasi, yang menyerahkan tanggung jawab pelayanan publik dasar kepada pemerintah kabupaten/kota dan, meskipun terjadi peningkatan belanja publik terdesentralisasi yang signifikan (sekitar separuh dari total belanja pemerintah), kualitas pelayanan publik masih tetap rendah dan tidak merata antar daerah. Sebagian besar pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan mereka juga tidak mempertanggungjawabkan hasil-hasilnya kepada pemerintah pusat dan warga masyarakat. Untuk memperbaiki pelayanan di daerah, dibutuhkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, dengan beralih ke sistem transfer fiskal yang lebih berbasis kinerja, dan menyediakan alat-alat bagi warga masyarakat untuk memantau penyelenggaraan pelayanan di daerah serta berbagai pendekatan yang sesuai dengan jenis daerah. Pada akhirnya, perbaikan pelayanan di daerah berarti peningkatan cara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa bekerja sama untuk menyampaikan hasil-hasil pelayanan di lapangan. Bidang kerjasama ini juga akan memperbaharui fokusnya untuk mendorong keterlibatan swasta dan memungkinkan pembiayaan infrastruktur secara komersial dan oleh sektor swasta sebagai bagian dari fokus korporasi dalam rangka memaksimalkan pembiayaan untuk pembangunan (MFD).

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mendorong kemakmuran bersama dalam jangka panjang, dibutuhkan peningkatan kesempatan saat ini, khususnya untuk memperkuat modal manusia melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan gizi agar penduduk di masa mendatang sehat dan produktif. Bidang kerjasama ini berkaitan dengan Jalur SCD 2: Penyelenggaraan Pelayanan dan Kesempatan bagi Semua dalam rangka mempercepat akumulasi modal manusia dan mendukung perbaikan kualitas, akses dan akuntabilitas di bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi dan infrastruktur lain yang disediakan melalui pemerintah daerah.

### Tujuan Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menyelesaikan masalah disparitas dan ketimpangan. Satu dari tiga dimensi pembangunan adalah dimensi kewilayahan dan keadilan yang bertujuan untuk memastikan agar pembangunan dapat dilakukan secara merata di antara kelompok-kelompok penghasilan dan di berbagai daerah.

## → Tujuan 6

### **MEMPERKUAT KERANGKA DESENTRALISASI UNTUK MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI DAERAH**

#### Logika Intervensi

Bidang kerjasama ini akan berfokus untuk mendukung upaya menetapkan sistem transfer fiskal berbasis kinerja, memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pemerintah pusat untuk mendukung dan mengawasi kinerja pemerintah daerah, memperkuat fungsi *back-office* pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur di daerah dan menyediakan alat-alat (instrumen) bagi warga masyarakat untuk memantau penyelenggaraan pelayanan di daerah. Dukungan keuangan Grup Bank Dunia akan berfokus pada peluncuran bertahap insentif kinerja melalui transfer fiskal kepada pemerintah daerah untuk sektor-sektor prioritas (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan). Dengan pilar ini, IFC akan membantu mendukung model penyelenggaraan beberapa jenis pelayanan dari sektor swasta. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, penyedia pelayanan kesehatan swasta (rumah sakit, pusat-pusat layanan diagnosis) melengkapi pengaturan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Grup Bank Dunia akan berupaya mendukung model-model tersebut dan mempromosikan model-model pelayanan kesehatan inklusif lain seperti konsultasi daring (e-consultation), mungkin melalui sektor swasta untuk meningkatkan pelayanan, khususnya ke daerah-daerah perbatasan.

#### Indikator Tujuan CPF

Persentase output fisik yang dibiayai dengan DAK dilaporkan, diverifikasi dan memenuhi kriteria kelayakan di kabupaten/kota di mana insentif kinerja diterapkan

- ↳ *Baseline*: 72 (2016)
- ↳ *Target*: 88 (2018)

#### Indikator Kemajuan Tambahan

Sistem pemantauan kinerja fiskal dan pelayanan publik pemerintah daerah beroperasi penuh

- ↳ *Baseline*: Tidak (2016)
- ↳ *Target*: Ya (2018)

#### Program Grup Bank Dunia

Yang Sedang Berlangsung:

- ↳ DAK Pemerintah Daerah (P111577) – ditutup TA18
- ↳ Pembiayaan Tambahan untuk Proyek Pemda dan Desentralisasi (P123940) – ditutup TA18
- ↳ PASA Desentralisasi untuk Pelayanan (P154976)
- ↳ Investasi untuk Gizi dan Anak Usia Dini (P164686) – disetujui TA18

## → Tujuan 7

### **MENINGKATKAN URBANISASI YANG BERKELANJUTAN**

#### **Logika Intervensi**

Grup Bank Dunia akan mendukung program-program nasional yang memberikan pembiayaan berbasis hasil dan bantuan teknis kepada kota-kota untuk menyediakan pelayanan dasar kepada semua warga, termasuk layanan air bersih dan sanitasi, pembangunan perkotaan, transportasi, dan limbah padat. Untuk mencapai tujuan ini, Grup Bank Dunia akan memperkenalkan skema-skema yang dapat meningkatkan pemanfaatan pembiayaan komersial dan swasta.

#### **Indikator Tujuan CPF**

Jumlah penduduk yang disediakan infrastruktur yang lebih baik dari Proyek Penataan Kawasan Kumuh Nasional

- *Baseline*: 0 (2016)
- *Target*: 7,5 juta jiwa (2020)

Penerima manfaat perempuan dari Proyek Penataan Kawasan Kumuh Nasional

- *Baseline* (2016): 0
- *Target* (2020):
  - Anggota perempuan dalam badan pengambil keputusan masyarakat: 30%
  - Peserta perempuan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan: 40%
  - Warga masyarakat perempuan yang menikmati peningkatan kapasitas: 30%

#### **Indikator Kemajuan Tambahan**

Persentase pemerintah daerah yang telah menyusun Rencana Aksi Perbaikan Kawasan Kumuh (SIAP) yang telah disetujui oleh Bupati/Walikota

- *Baseline*: 0 (2016)
- *Target*: 70 (2020)

Volume endapan yang dikeruk dari jalan air, kanal dan embung (termasuk limbah padat)

- *Baseline*: 1.986.229 (2016)
- *Target*: 3.400.000 (2020)

#### **Program Grup Bank Dunia**

Yang Sedang Berlangsung:

- Proyek Mitigasi Banjir Mendesak Jakarta (P111034)
- BETF Pembangunan Koridor Perkotaan Surabaya (P148821) – dihentikan TA17
- PASA Urbanisasi berkelanjutan (P153802)
- ID-WSSLIC III (PAMSIMAS) (P085375)
- Program Penataan Kawasan Kumuh Nasional (P154782) – disetujui TA17
- Dana Pembangunan Infrastruktur Regional (RIDF) (P154947) – disetujui TA17
- Program Penyediaan Air Minum Perkotaan Nasional (P156125) – disetujui TA18

Rencana Baru:

- Perbaikan Pengelolaan Limbah Padat untuk Mendukung Kota-Kota Regional dan Metropolitan (P157245) – TA19
- Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (P163896) - TA19
- Program Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Nasional (P158310) – TA20
- Dana Pembangunan Infrastruktur Regional (RIDF) II/AF – TA20
- Program Transportasi Perkotaan Nasional – TA20
- Investasi IFC untuk mendukung Proyek Konversi Limbah-ke-Energi Jakarta

## → Tujuan 8

### **MENINGKATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS**

#### Logika Intervensi

Grup Bank Dunia akan mendukung program-program nasional yang mempromosikan pengembangan modal manusia dengan menyediakan pendanaan berbasis kinerja dan bantuan teknis kepada kabupaten dan desa untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan (termasuk air bersih dan sanitasi) yang sesuai dengan standar kualitas minimum. IFC akan mengupayakan model-model sektor swasta untuk pemanfaatan teknologi baru dalam rangka memperluas pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat daerah terpencil yang berada pada lapisan dasar piramida penduduk.

#### Indikator Tujuan CPF

Persentase ibu hamil yang mendapatkan empat kali kunjungan pemeriksaan kandungan di 5.761 desa  
- *Baseline*: 68 (2016) . - *Target*: 80 (2020)

Mekanisme Koordinasi Pengurangan Stunting Nasional diluncurkan dan operasional  
- *Baseline*: Tidak (2018) . - *Target*: Ya (2020)

Jumlah kabupaten yang melaksanakan sistem pelatihan terfokus pada masyarakat dan berdasarkan kabupaten bagi guru pendidikan anak usia dini (guru PAUD)  
- *Baseline*: 0 (2016) . - *Target*: 75 (2020)

Jumlah penduduk yang mempunyai akses ke pelayanan air bersih yang lebih baik di daerah sasaran, dikelompokkan menurut gender  
- *Baseline*: 7,9 juta, dengan 4 juta perempuan (2016)  
- *Target*: 22 juta, dengan 11 juta perempuan (2020)

Jumlah penduduk yang mempunyai akses ke pelayanan sanitasi yang lebih baik di daerah sasaran, dikelompokkan menurut gender  
- *Baseline*: 7,7 juta, dengan 3,9 juta perempuan (2016)  
- *Target*: 14,9 juta, dengan 7,45 juta perempuan (2020)

Penerima manfaat perempuan dari proyek PAMSIMAS  
- *Baseline* (2016): 0 . - *Target* (2020):

- Anggota perempuan dalam badan pengambil keputusan masyarakat: 30%
- Peserta perempuan dalam tahap perencanaan

dan pelaksanaan: 30%

- Warga masyarakat perempuan yang menikmati peningkatan kapasitas: 30%

#### Indikator Kemajuan Tambahan

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan tingkat akreditasi lebih tinggi

- *Baseline*: 500 (2018) . - *Target*: 700 (2020)

Strategi Percepatan Pengurangan Stunting Nasional diluncurkan, dengan Kerangka Hasil dan Rencana Pelaksanaan yang terperinci

- *Baseline*: Tidak (2018) . - *Target*: Ya (2020)

Jumlah desa yang mengembangkan rencana aksi air bersih dan sanitasi

- *Baseline*: 10.000 (2016) . - *Target*: 27.000 (2020)

#### Program Grup Bank Dunia

Yang Sedang Berlangsung:

- PNPM Pedesaan 2012–2015 (P128832) – Program Inovasi Desa (P128832)
- PNPM-Generasi (P132585)
- PASA Indonesia untuk mendukung UHC (P153828)
- PASA Undang-Undang Desa (P153219)
- Studi Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa (P154636)
- PASA Garis Depan PAUD (P156674)
- Evaluasi Dampak PNPM-Generasi (P152466)
- Dana Perwalian Pendukung ID PAMSIMAS (P116236)
- ID-WSSLIC III (PAMSIMAS) (P085375)
- Pendanaan Tambahan-PAMSIMAS 2
- Mendukung Program Pendidikan Berkualitas 12 tahun bagi Semua (P157380)
- Pendanaan Tambahan - PAMSIMAS 3 (P129486) – disetujui TA16
- Indonesia – Mendukung Program PforR Reformasi Layanan Kesehatan Primer (I-SPHERE) (P164277) – disetujui TA18
- Investasi untuk Gizi dan Usia Dini (P164686) – disetujui TA18

Rencana Baru:

- Proyek Layanan Kesehatan Primer (P157150) - dibatalkan
- Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pendidikan (PforR) (P163217) - TA19
- PforR Penguatan Kelembagaan untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik di Desa (P165543) – TA20
- IPF Merealisasikan Janji Pendidikan di Indonesia – TA20

## BIDANG KERJASAMA 5

# PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN



### Definisi bidang fokus

Pemanfaatan potensi kekayaan alam dengan lebih baik (lahan, air, hutan) untuk pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lahan, perbaikan tata kelola dan pengelolaan Kawasan Hutan, integrasi pendekatan lanskap dengan portofolio dan pipeline, membuat pertumbuhan inklusif dengan menargetkan masyarakat rentan dan mendorong pemerataan, serta peningkatan koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam pengelolaan lanskap. Bidang fokus ini meliputi dukungan desain dan pelaksanaan Program Lanskap yang difokuskan pada perbaikan pengelolaan dan manfaat dari kekayaan alam di darat (terrestrial).

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Sebagaimana dijabarkan dalam SCD, kualitas tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam akan mempengaruhi seberapa efektif strategi pertumbuhan Indonesia akan mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem dan mendorong kemakmuran bersama. Angka kemiskinan yang tertinggi dialami oleh keluarga-keluarga yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan. Sifat khusus dari kemiskinan di kawasan hutan membutuhkan pendekatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Keterpencilan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lokasi komunitas yang tersebar luas memerlukan pendekatan yang mengakui hubungan antara nasib orang-orang yang tinggal di kawasan hutan dengan kegiatan sumber daya alam dan perubahan pelayanan ekosistem akibat deforestasi, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, banjir, tanah longsor dan bencana alam lain. Bidang kerjasama ini berkaitan dengan Jalur SCD 3: Pengelolaan Sumber Daya Alam.

### Tujuan Pembangunan Nasional

RPJMN 2015–2019 menjabarkan aksi-aksi prioritas yang berkaitan dengan pengelolaan lanskap: (a) mengoptimalkan sumber daya alam dan mengembangkan peraturan-peraturan pendukungnya (b) memperkuat sektor kehutanan, dan (c) membangun lingkungan keruangan dan berkelanjutan. Pemerintah telah menjalankan sejumlah inisiatif ambisius dan memulai proses perubahan regulasi yang, jika berhasil dilaksanakan, akan dapat mulai menyelesaikan banyak persoalan secara nasional. Inisiatif tersebut mencakup reorganisasi di tingkat kementerian dengan komitmen untuk pengelolaan sumber daya yang lebih berkeadilan, desentralisasi pengelolaan hutan, penataan ruang, pengelolaan kebakaran gambut, serta proses perizinan yang lebih transparan dan efisien. Pada saat yang sama, pemerintah mempunyai kapasitas yang terbatas untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tepat, terutama ketika membutuhkan respons lintas sektoral.

## → Tujuan 9

### **PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN TERDESENTRALISASI**

#### Logika Intervensi

Portofolio indikatif ini membantu pemerintah dalam mengembangkan beberapa fundamental inti untuk memanfaatkan dengan lebih baik potensi kekayaan alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Secara spesifik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan: (a) memperbaiki tata kelola dan pengelolaan lahan dan hutan dengan berfokus pada administrasi lahan yang lebih baik dan pengelolaan hutan yang terdesentralisasi; (b) menyelesaikan akar penyebab kemiskinan dan degradasi alam dengan meningkatkan kepastian penguasaan dan pemanfaatan lahan; dan (c) membuat pertumbuhan inklusif dan merata, dengan memastikan agar masyarakat rentan yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Jenis kegiatan dipilih berdasarkan seberapa penting kegiatan itu akan mengurangi kemiskinan penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan dan meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan pendapatan yang berkaitan dengan hasil hutan sebagai pendorong pertumbuhan yang lebih luas, dan mencerminkan bidang-bidang kerjasama yang sedang berlangsung antara Bank Dunia dan kementerian-kementerian terkait. Demikian pula, portofolio yang sedang disusun mencerminkan bidang-bidang yang penting bagi keberhasilan kerjasama di mana pemerintah telah menunjukkan minatnya. Meskipun bidang-bidang itu dianggap penting bagi kerjasama, risiko-risiko yang besar masih tetap ada mengingat sulitnya ekonomi politik di sektor terkait dan lemahnya koordinasi antara kementerian dengan pemerintah daerah.

#### Indikator Tujuan CPF

Luas lahan yang didukung oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dengan efektivitas pengelolaan yang lebih baik (hektar)

- ↳ *Baseline* (2016): 0
- ↳ *Target* (2020): 177.000

#### Indikator Kemajuan Tambahan

Jumlah KPH dengan batas-batas hutan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan diserahkan kepada lembaga geospasial untuk dimasukkan ke dalam 'Satu Peta.'

- ↳ *Baseline*: 0 (2016)
- ↳ *Target*: 5 (2020)

Jumlah kesatuan pengelolaan hutan yang diatur oleh rencana pengelolaan jangka panjang yang disiapkan dengan partisipasi masyarakat

- ↳ *Baseline*: 0 (2016)
- ↳ *Target*: 2 (2020)

#### Program Grup Bank Dunia

Yang Sedang Berlangsung:

- ↳ Mempromosikan CBNRM Berkelanjutan dan Pengembangan Kelembagaan (P144269)
- ↳ Proyek Penguatan Hak dan Perekonomian Masyarakat Adat dan Lokal - DGM (P156473)
- ↳ PAAA Program Dukungan Pembangunan Hijau (P148318) – dibatalkan TA18.
- ↳ Fasilitas Dukungan REDD+ (P149183) – ditutup TA17
- ↳ PASA Lanskap Terpadu Indonesia (P156489)
- ↳ Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia—GEF Perhutanan Sosial (P165742)
- ↳ Program Lanskap Berkelanjutan REDD+ di Kalimantan Timur – Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (P166244)
- ↳ Program Lanskap Berkelanjutan REDD+ di Jambi—Dana BioCarbon ISFL (P166672)
- ↳ IFC: Peraturan Bangunan Hijau Indonesia (#589167; Trade and Competitiveness)
- ↳ IFC: Konsultasi Kehutanan Asia Tenggara (#600431; Manufacturing, Agribusiness & Services)
- ↳ IFC: Rantai Pasokan Kehutanan Indonesia (#600124; Manufacturing, Agribusiness & Services)
- ↳ IFC: Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Indonesia (#594007; Manufacturing, Agribusiness & Services)
- ↳ IFC: Tindak Lanjut Proyek Sawit No. 2: SCI sektor Perkebunan (#593807; Manufacturing, Agribusiness & Services)

Rencana Baru:

- ↳ Program Percepatan Reformasi Agraria dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (P160661) – TA19

## BIDANG KERJASAMA 6

# MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MEMBELANJAKANNYA DENGAN LEBIH BAIK



### Definisi bidang fokus

Di Indonesia, rasio pendapatan-ke-PDB (14,4 persen pada tahun 2014) dan pajak-ke-PDB (11,3 persen pada tahun 2014) masih sangat rendah berdasarkan standar internasional. Ini bukan disebabkan potensi pajak yang lebih rendah; menurut suatu perkiraan, Indonesia mengumpulkan kurang dari 50 persen dari total potensi pendapatannya. Sedangkan 50 persen pendapatan pajak yang tidak tertagih disebabkan oleh kebijakan perpajakan yang tidak optimal (kesenjangan kebijakan) dan administrasi yang lemah (kesenjangan kepatuhan). Akan tetapi, yang juga sama pentingnya dengan meningkatkan pendapatan adalah 'belanja yang lebih baik', yaitu memperbaiki komposisi maupun penyelenggaraan/pelaksanaan belanja. Sebelum diterapkan reformasi besar di bidang subsidi BBM, belanja publik pemerintah pusat untuk program-program infrastruktur dan kesehatan secara signifikan tergeser oleh belanja untuk subsidi energi yang besar. Pada tahun 2014, belanja untuk subsidi energi mencapai lebih dari seperlima anggaran belanja pemerintah pusat (APBN) dan lebih dari tiga kali alokasi anggaran untuk infrastruktur dan kesehatan. Belanja pemerintah daerah sekarang mencapai sedikit lebih besar dari setengah APBN (tidak termasuk subsidi dan pembayaran bunga). Secara umum, belanja pemerintah daerah sangat didominasi oleh belanja administrasi dan pegawai ketimbang belanja di sektor-sektor produktif dan belanja modal. Memperbaiki komposisi belanja pemerintah daerah dan merelokasi lebih banyak sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan di garis depan merupakan langkah-langkah penting dalam meningkatkan penyediaan pelayanan kunci kepada penduduk.

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Kebijakan fiskal dalam mobilisasi pendapatan dan kualitas fungsi belanja telah diidentifikasi dalam SCD sebagai kunci untuk pengurangan kemiskinan dan kemakmuran bersama. SCD juga mengidentifikasi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sebagai salah satu unsur penting dalam memperbaiki pelayanan publik. Bidang kerjasama ini berkaitan dengan Jalur 2 dengan meningkatkan pendapatan maupun memperbaiki belanja untuk kesempatan penyelenggaraan pelayanan publik bagi semua dan Jalur 3 yang berupaya memperbaiki cara pendapatan dari sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dapat diambil dan disebarluaskan untuk meningkatkan keberlanjutan dan membagi sumber daya alam secara lebih adil.

### Tujuan Pembangunan Nasional

RPJMN 2015–2019 menekankan pentingnya: (a) memperkuat kapasitas administrasi pendapatan negara dan memperbaiki kebijakan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber pajak dan non pajak, dan (b) memperkuat lembaga-lembaga perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran, efisiensi alokasi anggaran, dan efektivitas (dampak) belanja publik.

## → Tujuan 10

### MEMPERBAIKI PENGUMPULAN PENDAPATAN

#### Logika Intervensi

Dengan mengumpulkan lebih banyak pendapatan, pemerintah akan mampu membiayai secara memadai bidang-bidang prioritas utama seperti infrastruktur, yang didukung oleh CPF. Jenis-jenis portofolio yang sedang berjalan maupun akan datang dipilih berdasarkan potensi dampak terhadap penguatan kapasitas administrasi pendapatan (untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan) dan terhadap perbaikan kebijakan perpajakan (untuk mengurangi kesenjangan kebijakan). Secara spesifik, bidang kerjasama Grup Bank Dunia ini bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi distorsi ekonomi dan menekan biaya administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, Grup Bank Dunia akan mendukung pemerintah di bidang-bidang berikut ini: (a) mendukung revisi kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu, (b) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kepatuhan perpajakan dengan beralih dari pendekatan berdasarkan risiko ke pengelolaan kepatuhan, dan (c) memperkuat dan mengarusutamakan administrasi pendapatan non-pajak.

#### Indikator Tujuan CPF

Rasio PPN terhadap PDB

- ↳ *Baseline* (2015): 3,7%
- ↳ *Target* (2020): 4,0%

Rasio Pajak Penghasilan Non-Migas terhadap PDB

- ↳ *Baseline* (2015): 4,7%
- ↳ *Target* (2020): 5,0%

#### Indikator Kemajuan Tambahan

Peraturan dilaksanakan secara penuh untuk menghapuskan NPWP ganda

- ↳ *Baseline*: Tidak (2014)
- ↳ *Target*: Ya (2016)

Rasio pelaporan tahunan wajib pajak

- ↳ *Baseline* (2015): 60,6% (perorangan); 58,0% (badan)
- ↳ *Target* (2019): 80,0% (perorangan); 75,0% (badan)

Wajib pajak perorangan yang terdaftar sebagai persentase dari jumlah tenaga kerja

- ↳ *Baseline* (2015): 24,7%
- ↳ *Target* (2019): 30,0%

#### Program Grup Bank Dunia

Yang Sedang Berlangsung:

- ↳ Bantuan Teknis-Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Belanja (P155648)
- ↳ Bantuan Teknis kebijakan perpajakan (bagian dari PA fiskal makro P132241)
- ↳ Bantuan Teknis kebijakan dan administrasi pendapatan non-pajak (bagian dari PA Sumber Daya Alam untuk Pembangunan P156142)
- ↳ DPF 1 Reformasi Fiskal (P132241)
- ↳ DPF 2 Reformasi Fiskal Indonesia (P161475)
- ↳ Beasiswa SPIRIT (P118150) – ditutup TA18

Rencana Baru:

- ↳ DPF 3 Reformasi Fiskal – Kebijakan Perpajakan dan Admin Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan Publik - TA19



## → Tujuan 11

### **MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BELANJA**

#### **Logika Intervensi**

Dengan memperbaiki efisiensi alokasi dan teknis belanja publik, pemerintah akan mampu mengurangi distorsi ekonomi dan menekan biaya administrasi agar jenis-jenis belanja publik bisa lebih optimal seperti untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Jenis-jenis portofolio yang sedang berjalan maupun yang akan datang dirancang untuk menyediakan beberapa instrumen yang bisa mendukung agenda perbaikan belanja pemerintah. Secara spesifik, Grup Bank Dunia bertujuan membantu pemerintah di bidang-bidang kunci berikut ini: (a) mempercepat reformasi subsidi energi (BBM dan listrik) melalui pelaksanaan yang konsisten dan transparansi yang lebih baik; (b) meningkatkan kualitas belanja (efisiensi alokasi, efektivitas dan implementasi) di bidang-bidang utama; (c) meningkatkan kualitas belanja dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah tertentu; dan (d) memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memodernisasi pengadaan dan pengelolaan kontrak dan untuk memperbaiki lingkungan pengawasan.

#### **Indikator Tujuan CPF**

Belanja pemerintah pusat untuk kesehatan, belanja modal (sebagai proksi infrastruktur), dan bantuan sosial (persentase dari total belanja APBN yang telah disetujui, tidak termasuk transfer fiskal ke pemerintah daerah)

- *Baseline*: kesehatan 2,7 persen (2014); belanja modal 12,2 persen (2014); bantuan sosial 3,2 persen (2014)
- *Target* (2016 dan setelahnya): pertumbuhan positif

Tingkat pelaksanaan anggaran pusat (sebagai realisasi persentase dari APBN) untuk belanja modal

- *Baseline*: 80 persen (2014)
- *Target*: 90 persen (2020)

#### **Indikator Kemajuan Tambahan**

Perubahan peraturan (termasuk, paling tidak, PMK 157/2013) agar kontrak untuk proyek infrastruktur besar bisa dibuat, termasuk kontrak tahun jamak (*multi-year contract*)

- *Baseline*: Tidak (2015)
- *Target*: Ya (2017)

Perbaiki pendapat auditor yang diberikan terhadap laporan keuangan tahunan pemerintah pusat

- *Baseline*: Pendapat Wajar dengan Pengecualian (2015)
- *Target*: Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (2017)

#### **Program Grup Bank Dunia**

Yang Sedang Berlangsung:

- DPL-DDO PERISAI (P130048) - ditutup
- Bantuan Teknis Kebijakan Belanja (bagian dari PA kebijakan fiskal makro P132241)
- DPF I dan II Reformasi Fiskal (P156655) - ditutup
- Bantuan Teknis Fiskal daerah, termasuk di daerah-daerah yang kaya sumber daya (bagian dari PA Kebijakan Fiskal Makro P132241 dan PA Desentralisasi)
- DPF 1 Reformasi Fiskal (P132241)
- DPF 2 Reformasi Fiskal Indonesia (P161475)
- Beasiswa SPIRIT (P118150) – ditutup TA18
- Peningkatan Kapasitas di bidang Statistik Pengadaan Publik di Indonesia (P163517) – Percontohan Kontrak Terbuka dengan Kota Bandung bekerjasama dengan LKPP

Rencana Baru:

- DPF3 Fiskal – Kebijakan Perpajakan dan Admin Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan Publik – TA19
- Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Reformasi Birokrasi, termasuk dukungan untuk profesionalisasi pengadaan dan peningkatan kapasitas (P159461) - TA19
- PFM-MDTF: Penilaian Sistem Pengadaan Publik Pemerintah Indonesia dengan Metodologi OECD-DAC untuk Penilaian Sistem Pengadaan yang telah direvisi (MAPS-II, 2017) untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan serta merekomendasikan tindakan-tindakan untuk perbaikan 'Memperkuat Pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan di Indonesia' (P155648) - TA19

## BALOK PENDUKUNG 1

# MENDORONG KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA: INVESTASI, IKLIM USAHA DAN FUNGSI PASAR



### Definisi bidang fokus

Seperti yang dituangkan dalam SCD, pertumbuhan, lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada strategi pertumbuhan yang didukung oleh sektor swasta sebagai mesin penggerak pertumbuhan. Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan regulasi yang tepat. Meskipun beberapa kendala penting (seperti kesenjangan infrastruktur dan keterampilan) diatasi melalui berbagai bidang kerjasama, faktor yang sama, yaitu lingkungan usaha dan pembiayaan yang lemah, dipandang sebagai faktor yang secara umum terjadi pada seluruh perekonomian dan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas banyak solusi pembangunan. Beberapa gejala lingkungan usaha dan pembiayaan yang lemah terlihat pada regulasi investasi dan perdagangan yang umumnya bersifat membatasi, seringkali tidak konsisten (termasuk antara berbagai tingkat pemerintahan), dan tidak pasti; pengurusan perizinan usaha menyita waktu dan mahal.

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Bidang kerjasama ini berkaitan dengan Jalur SCD 1: Penciptaan Lapangan Kerja, dengan membantu mendorong investasi dan memperbaiki iklim usaha dan fungsi pasar untuk menarik modal swasta yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja dan membantu membiayai kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di Indonesia.

### Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan yang dijabarkan dalam RPJMN hanya bisa dicapai dengan berhasil melibatkan modal swasta. Untuk melakukan hal itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah dengan mereformasi lingkungan peraturan perundang-undangan dan cara-cara lain dalam rangka memperbaiki iklim usaha dan fungsi pasar. Upaya-upaya ini akan berdampak bagi semua bidang kerjasama yang meliputi bidang Infrastruktur, Energi, Maritim dan Pengelolaan Lanskap di Tingkat Nasional maupun Daerah.

## → Tujuan 12

### **MENYEDERHANAKAN PERATURAN USAHA**

#### **Logika Intervensi**

Gabungan produk-produk Grup Bank Dunia akan digunakan untuk mendukung pengembangan sektor swasta yang dinamis dan menghasilkan produktivitas di sejumlah bidang usaha sasaran di mana kondisinya memungkinkan pertumbuhan yang tinggi. Secara khusus, Grup Bank Dunia akan berfokus untuk mendukung reformasi lingkungan peraturan perundang-undangan dan untuk badan-badan usaha dengan pertumbuhan tinggi dalam pasar-pasar produk dan faktor pendukung yang dinamis.

#### **Indikator Tujuan CPF**

Terlaksananya reformasi yang mendukung pengembangan sektor swasta

- *Baseline*: 0 (2018)
- *Target*: 5 (2020)

#### **Indikator Kemajuan Tambahan**

Total waktu yang dibutuhkan untuk memproses seluruh izin usaha di IPP

- *Baseline*: 735 hari (2015)
- *Target*: 435 hari (2017)

#### **Program Grup Bank Dunia**

Yang Sedang Berlangsung:

- Proyek Reformasi Pembangunan Sektor Swasta Indonesia (P144680) - selesai
- Proyek Penelitian dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (P121842)
- ASA II Reformasi Sektor Swasta Indonesia (P160793)
- Kajian Paket-Paket Kebijakan Ekonomi yang Dikeluarkan Pemerintah Indonesia (P160406)
- Pengelolaan Diseminasi Penelitian dan Teknologi Pertanian Berkelanjutan (P117243)
- Iklim Investasi, Sektor-Sektor Kompetitif dan Persaingan Usaha di Indonesia (602128, *IFC Advisory, Umbrella Program*, dengan proyek-proyek terkait: 602983 dan 602984; Penyelenggaraan: TA22)

Rencana Baru:

- Daya Saing dan Inovasi Sektor Swasta Indonesia III

### → Tujuan 13

## **MENINGKATKAN PERAN SEKTOR SWASTA DALAM INVESTASI INFRASTRUKTUR NASIONAL**

### Logika Intervensi

Kerjasama untuk membantu Indonesia dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur publik yang besar dengan mendukung arus modal swasta untuk pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kerangka kelembagaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kemampuan modal sektor swasta dan lembaga publik untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur.

### Indikator Tujuan CPF

Nilai investasi PPP untuk infrastruktur

- *Baseline*: \$327,4 juta (2014)
- *Target*: \$5.000 juta (2020)

Operasi Grup Bank Dunia yang secara langsung menarik investasi swasta selain pembiayaan publik/pemerintah dan Grup Bank Dunia

- *Baseline* (2015): 1 operasi
- *Target* (2020): 4 operasi

### Indikator Kemajuan Tambahan

Peraturan reformasi yang menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) 75 & 38

- *Baseline*: 0 (2016)
- *Target*: 1 (2020)

Jumlah sub-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIFF

- *Baseline*: 0 (2017)
- *Target*: 3 (2019)

Jumlah proyek yang dinilai oleh IIGF<sup>3</sup> sesuai dengan manual operasional yang telah disetujui

- *Baseline*: 0 (2017)
- *Target*: 3 (2019)

### Program Grup Bank Dunia

Yang Sedang Berlangsung:

- Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur IIFF (P092218), Pendanaan Tambahan-Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur IIFF (P154779) – disetujui TA17
- Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (P157490 – disetujui TA16) dan P157491
- Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (P118916)
- IFC: Advokasi hulu mengenai Konsesi Jalan Tol dan Perjanjian Pembelian Listrik Tenaga Air (PPA) dengan PLN

Rencana Baru:

- Program Pembangunan Jalan Tol Nasional (P162300) – TA20
- Pengembangan pasar modal, khususnya di bidang pembiayaan infrastruktur
- IFC: PCG untuk mendukung penerbitan obligasi perusahaan jalan tol

<sup>3</sup> IIGF = Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund).

## → Tujuan 14

### **MENINGKATKAN AKSES KE KEUANGAN**

#### **Logika Intervensi**

Tujuan ini akan didukung oleh pelayanan konsultasi keuangan dan pengetahuan dengan membantu desain dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan memperkuat kapasitas berbagai lembaga yang terlibat dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan akses ke keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani, menjamin ketahanan sektor keuangan, dan memfasilitasi pembiayaan investasi oleh swasta, khususnya untuk infrastruktur. Akses dan inklusi keuangan – perorangan maupun UKM: analisis infrastruktur keuangan (sistem pembayaran, sistem pelaporan kredit) dan mendukung pelaksanaan reformasi (*agent banking* untuk memperluas akses ke layanan keuangan), digitalisasi pembayaran pemerintah, perbaikan lembaga-lembaga non-bank lain / *deposit-taking institutions* (koperasi/lembaga keuangan mikro), peningkatan perlindungan konsumen dan kemampuan keuangan mereka. Pelayanan Grup Bank Dunia untuk meningkatkan akses ke keuangan dilengkapi dengan kajian stabilitas keuangan dan pendalaman keuangan, yang bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih kuat dan mengembangkan pasar keuangan (yang berhubungan dengan keuangan infrastruktur dan pembiayaan risiko bencana). Kajian kebijakan dan kajian investasi dan konsultasi sektor swasta adalah pelengkap untuk mendukung tujuan ini. IFC berharap dapat memberikan pembiayaan kepada bank dan lembaga-lembaga keuangan agar mereka memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah, dan ini membantu menciptakan mata pencaharian dan lapangan kerja bagi rakyat miskin. IFC juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar di sektor infrastruktur, manufaktur, produk pangan, dan jasa untuk mendukung mereka dalam memperoleh pekerjaan, melakukan pengadaan bahan mentah, dan memproduksi barang berkualitas tinggi bagi rakyat miskin dengan berfokus pada model-model usaha inklusif.

#### **Indikator Tujuan CPF**

Persentase orang dewasa (usia 15+) yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal

- *Baseline*: 36 persen (2014)
- *Target*: 65 persen (2020)

Jumlah pinjaman mikro yang dicairkan, dikelompokkan menurut gender<sup>4</sup>

- *Baseline* (2014): 0
- *Target* (2020): 3.000.000 (di mana 50 persennya adalah perempuan)

Jumlah UKM yang terjangkau oleh layanan keuangan<sup>5</sup>

- *Baseline* (2014): 0
- *Target* (2020): 3.800<sup>6</sup>

#### **Indikator Kemajuan Tambahan**

Peningkatan literasi keuangan

- *Baseline*: 21 persen (2013)
- *Target*: kenaikan 2 persen per tahun hingga 2017

Nilai Pembiayaan Difasilitasi<sup>7</sup>

- *Baseline* (2015): \$561,8 juta
- *Target* (2019): \$3,2 miliar

#### **Program Grup Bank Dunia**

Yang Sedang Berlangsung:

- Peningkatan Sistem Pembayaran Indonesia (156536) – ditutup TA16
- Pembayaran Digital Indonesia (P151368) – ditutup TA17
- Bantuan Teknis Sektor Keuangan Indonesia (P163296)
- Promosi Akses dan Inklusi Keuangan Indonesia (P166791)
- IFC: Asuransi Gempa Berbasis Indeks (EQII) untuk Perlindungan Portofolio Keuangan Mikro (#599136; *Finance and Markets*)
- IFC: Manajemen Risiko Lingkungan & Sosial bagi Lembaga Keuangan (#591447; *Financial Institutions Group*)
- IFC: Proyek Tata Kelola Korporasi Indonesia (#590107; *Environment, Social and Governance*)
- IFC: Infrastruktur Keuangan Indonesia – Transaksi

<sup>4</sup> Melalui investasi IFC

<sup>5</sup> Melalui investasi IFC

<sup>6</sup> Estimasi IFC per Maret 2018

<sup>7</sup> Melalui investasi IFC

Terjamin (#597607; *Finance and Markets*)

- ↳ IFC: Mobile Banking Indonesia menuju Inklusi Digital (#600401; *Finance and Markets*)
- ↳ IFC: Kredit Parsial Obligasi Ciputra *Residence* (#33018)
- ↳ Investasi dan dukungan konsultasi IFC untuk berbagai klien sektor swasta

Rencana Baru:

- ↳ DPF Sektor Keuangan – TA20
- ↳ Infrastruktur Keuangan Indonesia – Pelaporan Kredit (#598967; *Finance and Markets*)
- ↳ Keuangan Mikro Indonesia (#599772; *Financial Institutions Group*)
- ↳ Mobile Banking Indonesia Tahap 2 (Inklusi Keuangan Digital) (#599875; *Financial Institutions Group*)
- ↳ Dukungan investasi IFC kepada perusahaan swasta untuk menerbitkan obligasi atau saham di pasar modal
- ↳ Pengembangan pasar modal, khususnya di bidang keuangan infrastruktur
- ↳ IFC: Jaminan Kredit Parsial (PCG) untuk mendukung penerbitan obligasi perusahaan-perusahaan jalan tol.

## BALOK PENDUKUNG 2

# KEMAKMURAN BERSAMA, PEMERATAAN DAN INKLUSI



### Definisi bidang fokus

Semua kebijakan yang didukung oleh bidang-bidang kerjasama CPF yang lain, jika dirancang dan dilaksanakan dengan tepat, dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada tujuan ganda. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan khusus juga dibutuhkan untuk melindungi mereka yang miskin dan rentan saat ini dan membantu mereka mendapatkan kehidupan yang produktif. Indonesia sudah membangun sistem jaminan sosial sejak Krisis Keuangan Asia 1997, tetapi cakupan bantuan pada tahun 2015 masih rendah dan manfaatnya masih terlalu kecil untuk mendatangkan hasil yang berkelanjutan. Indonesia sekarang sedang melaksanakan salah satu reformasi jaminan sosial terbesar di dunia, tetapi pada tahun 2015, cakupannya masih sangat terbatas, dengan maraknya kecurangan dan korupsi; kontribusi yang tinggi dari pemberi kerja dengan upah minimum dan pesangon yang tinggi semakin memperburuk kesempatan kerja formal. Kebijakan-kebijakan untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang produktif, seperti melalui pemberian bantuan kredit, tabungan dan pekerjaan, masih sangat terbatas tetapi pemerintahan yang baru telah menjadikan hal ini sebagai prioritas, karena kebijakan-kebijakan tersebut saling melengkapi untuk kebijakan-kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif.

### Hubungan antara bidang fokus dengan tujuan ganda

Untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem dan mendorong kemakmuran bersama, maka kebijakan-kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kemiskinan dan ketimpangan masyarakat, beserta kebijakan-kebijakan khusus untuk melindungi masyarakat miskin dan membantu mereka keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang produktif.

### Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan keseluruhan dari RPJMN adalah mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang inklusif. Salah satu dari tiga dimensi pengembangan RPJMN adalah kewilayahan dan pemerataan, yang mencakup kebijakan-kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di antara kelompok-kelompok penghasil dan daerah-daerah.

## → Tujuan 15

### **MEMPERBAIKI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN AKSES KE PEKERJAAN PRODUKTIF**

#### Logika Intervensi

Tujuan ini akan didukung dengan pelayanan keuangan dan pengetahuan: (a) fokus kemiskinan dan ketimpangan: analisis kemiskinan dan ketimpangan, serta dukungan untuk kebijakan dan program tertentu oleh CPF untuk meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan; (b) jaring pengaman: pengembangan sistem bersama program-program bantuan sosial melalui penargetan dan pembayaran, reformasi Program Beras Sejahtera (Rastra) untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke makanan bergizi, perluasan dan perbaikan program Bantuan Tunai Bersyarat PKH, dan peningkatan koordinasi PKH dengan program-program bantuan sosial pelengkap yang lain; (c) jaminan sosial: desain, keuangan dan peningkatan kapasitas untuk mengelola program Asuransi Kesehatan – Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terkait ketenagakerjaan, melindungi sistem terhadap kesalahan, kecurangan dan korupsi (EFC) dan pajak tenaga kerja yang tinggi, menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi, dan mensosialisasikan program-program ketenagakerjaan; (d) memberikan pelayanan ketenagakerjaan termasuk fungsi pencarian pekerjaan yang efektif; (e) meningkatkan keterampilan tenaga kerja; (f) meningkatkan perlindungan tenaga kerja tanpa menghambat penempatan tenaga kerja formal; (g) meningkatkan perlindungan dan kualitas penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; dan (h) mengembangkan infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses ke kredit, tabungan dan asuransi bagi masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia.

#### Indikator Tujuan CPF

Jumlah total keluarga peserta PKH

- ↳ *Baseline*: 5,9 juta (2016)
- ↳ *Target*: 8 juta (2020)

Persentase peserta PKH yang menerima program bantuan sosial lain

- ↳ *Baseline*: 13,6 (2016)
- ↳ *Target*: 85 (2020)

#### Indikator Kemajuan Tambahan

Makalah strategis sebagai masukan untuk perluasan dan perbaikan PKH telah disusun

- ↳ *Baseline*: Tidak (2016)
- ↳ *Target*: Ya (2018)

Menerapkan pemuktahiran dinamis Database Terpadu (yang digunakan untuk penargetan kemiskinan)

- ↳ *Baseline*: Tidak (2016)
- ↳ *Target*: Ya (2019)

Pedoman dan rencana aksi perbaikan sistem untuk mencegah, mendeteksi dan mengoreksi EFC telah dikembangkan dan dilaksanakan

- ↳ *Baseline*: Tidak (2016)
- ↳ *Target*: Ya (2020)

Penetapan upah minimum berbasis rumus telah diperkenalkan

- ↳ *Baseline* (2016): Tidak
- ↳ *Target* (2020): Ya



## Program Grup Bank Dunia

### Yang Sedang Berlangsung:

- ↳ PASA Kemitraan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengetahuan (P132247) - selesai
- ↳ Proyek Penguatan Statistik Indonesia (STATCAP) – ditutup TA18
- ↳ Simulasi Modul Konsumsi SUSENAS (P153589) – ditutup TA17
- ↳ Bantuan Teknis reformasi bantuan sosial (P117975) – ditutup TA16, Bantuan Teknis Penguatan Bantuan Sosial Indonesia (P160590)
- ↳ PAAA Jaminan Sosial (P144677) - selesai
- ↳ Program Reformasi Bantuan Sosial (PforR - P160665) – disetujui TA17
- ↳ Pembayaran Digital Indonesia (P151368) – ditutup TA17
- ↳ PASA Lapangan Kerja (P146480) - ditutup, Program Aksi Lapangan Kerja Indonesia (P163964) Aktif, penyelesaian 2020
- ↳ PASA Bantuan Teknis Sektor Keuangan (P163295)
- ↳ Pengembangan Keterampilan di Indonesia (P166241)
- ↳ Mendukung Reformasi Perlindungan Pekerja di Indonesia (P166241)
- ↳ Studi dan Bantuan Teknis Migrasi Tenaga Kerja Internasional di Indonesia (P150164) – ditutup TA16
- ↳ Pekerja Rentan dan Tidak Terlindungi di Indonesia (P159694)
- ↳ Indonesia #C007 Peningkatan Sistem Pembayaran (P156536) – ditutup TA16
- ↳ Pembayaran Digital Indonesia (P151368) – ditutup TA17
- ↳ IFC: Pengembangan Usaha Agribisnis Indonesia (#600483; *Manufacturing, Agribusiness & Services*)
- ↳ FHP Indonesia II (#36865, Wadah Investasi Kolektif, \$40m) – tercapai sepenuhnya
- ↳ MIGA- Rajamandala Hydropower IPP (penerbitan jaminan senilai \$200 juta)

### Rencana Baru:

- ↳ PforR Proyek Pengembangan Keterampilan– TA20
- ↳ IFC: Mobile Banking 2 Indonesia menuju Inklusi Digital (#600401; *Finance and Markets*)
- ↳ IFC: AS Keuangan Pertanian untuk Bank Muamalat (#600480; *Financial Institutions Group*)
- ↳ IFC: Keuangan Pertanian Danamon (#600755; *Financial Institutions Group*)
- ↳ IFC: Keuangan Mikro Indonesia yang Bertanggung Jawab (#601066; *Finance and Markets*)

**Lampiran 2**  
**RENCANA DAN REALISASI**  
**PEMBIAYAAN IBRD TA16-20**  
Terkini, per 30 Juni 2018

Bidang Kerjasama 1

**PLATFORM INFRASTRUKTUR DI TINGKAT NASIONAL**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$ juta)	Rencana* (\$ juta)	Status
1	Proyek Rehabilitasi Operasi & Peningkatan Keselamatan Bendungan 2 (DORSIP-2) – IPF	125	150-200	Disetujui tanggal 27-2-17, sedang dilaksanakan dengan pembiayaan bersama AIIB senilai \$125 juta
2	Proyek Rehabilitasi Irigasi Mendesak (URIP) – IPF	250	150-150	Disetujui tanggal 21-6-18. Kedua proyek ini telah digabung menjadi satu proyek: Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak – IPF, \$250 juta dari IBRD dengan pembiayaan bersama AIIB senilai \$250 juta
3	Proyek Modernisasi Irigasi Strategis (MISP) – IPF		150	
4	Program Perumahan Terjangkau Nasional – IPF	450	150	Disetujui tanggal 17-3-17, sedang dilaksanakan
5	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata – IPF	300	100-150	Disetujui tanggal 30-5-18

Bidang Kerjasama 2

**ENERGI BERKELANJUTAN DAN AKSES UNIVERSAL**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$ juta)	Rencana* (\$ juta)	Status
1	DPF Energi I – DPF	500	500	Disetujui tanggal 1-12-15, ditutup
2	DPF Energy II – DPF	n/a	300	Dibatalkan
3	Pendanaan Tambahan - Upper Cisokan 1040MW – IPF		150-200	Dibatalkan
4	P4R Efisiensi Distribusi Listrik (PT PLN) – PforR	500	500	Disetujui tanggal 22-4-16, sedang dilaksanakan
5	Poko Hydro Power 130MW (PLN) – IPF	n/a	200-250	Dibatalkan
6	Geothermal II 150MW (PT PGE/ Pertamina) – IPF	225	100-150	Fokus dukungan pembiayaan geothermal telah berubah dari investasi hilir menjadi hulu, dan dimulai dengan proyek pembangunan hulu Energi Geothermal (Panas Bumi) (GEUDP), dua hibah senilai \$55,25 juta
7	Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Geothermal (GREM)**	n/a	225	Direncanakan untuk TA19
8	P4R Efisiensi Distribusi Listrik II (PT PLN) – PforR	n/a	250	Ditunda

Bidang Kerjasama 3

**MARITIM DAN KONEKTIVITAS**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$ juta)	Rencana* (\$ juta)	Status
1	Perbaikan jalan untuk mendukung tol darat dan laut terpadu – wilayah utara – IPF	n/a	150-200	Dibatalkan
2	DPF Maritim, Logistik & Konektivitas (MLC) – DPF	400	300	Disetujui tanggal 2-11-16, ditutup
3	DPF Maritim, Logistik & Konektivitas (MLC II) – DPF	300	300	Disetujui tanggal 28-6-18
4	Pembangunan Pelabuhan Wilayah Timur (PT Pelindo) – IPF	n/a	200	Dibatalkan
5	Program Nasional untuk Ekonomi Biru – IPF	n/a	100	Dibatalkan
6	Program Pengembangan Jalan Bebas Hambatan Nasional (PPP) – IPF**	n/a	100-300	Direncanakan TA20 (berpotensi dibiayai bersama)

## Bidang Kerjasama 4

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$juta)	Rencana* (\$juta)	Status
1	Dana Pembangunan Infrastruktur Regional (RIDF) – IPF	100	100	Disetujui tanggal 10-3-17, sedang dilaksanakan, dengan pembiayaan bersama AIIB senilai \$100 juta
2	Pendanaan Tambahan - Penyediaan Air Minum & Sanitasi Pedesaan Nasional (PAMSIMAS 3) – IPF	300	300	Disetujui tanggal 8-1-16, sedang dilaksanakan
3	Penataan Kawasan Kumuh Nasional – IPF	216,5	200	Disetujui tanggal 12-7-16, sedang dilaksanakan, dengan pembiayaan bersama AIIB senilai \$216,5 juta
4	Peningkatan Layanan Kesehatan Primer – PforR	150	250	Disetujui tanggal 13-6-18
5	Peningkatan Pengelolaan Limbah Padat untuk Mendukung Kota-Kota Regional & Metropolitan – IPF	n/a	100	Direncanakan TA19. Nama proyek berubah menjadi Proyek Peningkatan Pengelolaan Limbah Padat Indonesia
6	Program Penyediaan Air Minum Perkotaan Nasional – IPF	100	100	Disetujui tanggal 6-6-18
7	Pemasokan Air Bersih Regional di Benteng Kobema & Durolis – IPF	n/a	100	Dibatalkan
8	Transportasi Perkotaan Surabaya – IPF	n/a	100	Dibatalkan
9	Program Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Nasional (Pengembangan sistem pembuangan air limbah dan pengembangan fasilitas pengolahan limbah) – IPF	n/a	200	Direncanakan TA19. Nama proyek berubah menjadi Program Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Nasional (berpotensi untuk dibiayai bersama)
10	Dukungan Penyelenggaraan Infrastruktur Desa dan Pelayanan Dasar – PforR	350	150	Direncanakan TA20. Nama proyek berubah menjadi Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Desa yang Lebih Baik. Instrumen berubah dari IPF menjadi PforR
11	Program Pembangunan Perkotaan Nasional (NUDP) – Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan – IPF	50	100	Direncanakan TA19
12	Program Reformasi DAK – IPF	n/a	100-150	Ditunda
13	Pendidikan Berkualitas di Daerah Tertinggal – IPF	n/a	100-150	Dibatalkan
14	Investasi untuk Gizi dan Anak Usia Dini – PforR**	400	0	Disetujui tanggal 21-6-18
15	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pendidikan – PforR**	n/a	300	Direncanakan TA19
16	Merealisasikan Janji Pendidikan di Indonesia – IPF**	n/a	100-250	Direncanakan TA20
17	Dana Pembangunan Infrastruktur Regional (RIDF) II / Pendanaan Tambahan – IPF**	n/a	200-400	Direncanakan TA20 (berpotensi untuk dibiayai bersama)
18	Program Transportasi Perkotaan Nasional**	n/a	250-500	Direncanakan TA20 (berpotensi untuk dibiayai bersama)

## Bidang Kerjasama 5

**PENGLOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$juta)	Rencana* (\$juta)	Status
1	Program Investasi Kehutanan – IPF	22	100	Disetujui tanggal 27-5-16, dibiayai dengan hibah
2	Administrasi Lahan dan Penataan Ruang Nasional – IPF	n/a	200	Direncanakan TA19. Nama proyek berubah menjadi Program Percepatan Reformasi Agraria dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Bidang Kerjasama 6

**MENGUMPULKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN DAN MEMBELANJAKANNYA DENGAN LEBIH BAIK**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$ juta)	Rencana* (\$ juta)	Status
1	DPF Pengumpulan Pendapatan	400	300	Disetujui tanggal 31-5-16, ditutup. Nama proyek berubah menjadi DPF Reformasi Fiskal Indonesia
2	Proyek Modernisasi Pemungutan Pajak – IPF	n/a	100	Dibatalkan
3	DPF II Pengumpulan Pendapatan	300	300	Disetujui tanggal 31-10-17, sedang dilaksanakan. Nama proyek berubah menjadi DPF II Reformasi Fiskal Indonesia
4	Pengembangan Kapasitas, Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SPIRIT II) – IPF	n/a	100-150	Direncanakan TA19. Nama proyek berubah menjadi Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Reformasi Birokrasi
5	DPF III Reformasi Fiskal Indonesia**	n/a	300	Direncanakan TA19

Balok Pendukung 1

**MENDORONG KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA – INVESTASI, IKLIM USANA DAN FUNGSI PASAR**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$ juta)	Rencana* (\$ juta)	Status
1	Pendanaan Tambahan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia – IPF	200	150	Disetujui tanggal 24-6-09, sedang dilaksanakan
2	DPF Sektor Keuangan**	n/a	150	Direncanakan TA20

Balok Pendukung 2

**KEMAKMURAN BERSAMA, PEMERATAAN DAN INKLUSI**

No	Nama Proyek/Program	Realisasi (\$ juta)	Rencana* (\$ juta)	Status
1	Proyek Pengembangan Keterampilan – PforR**	n/a	100-200	Direncanakan TA20
2	Proyek Reformasi Bantuan Sosial**	200	0	Disetujui tanggal 9-5-17, sedang dilaksanakan

Catatan: \* Nilai proyek akan ditetapkan selama persiapan melalui konsultasi dengan pemerintah.

\*\* Proyek-proyek yang tidak direncanakan pada saat persiapan CPF dan baru ditambahkan kemudian.

## **Lampiran 3**

### **INDIKATOR KUNCI EKONOMI MAKRO**

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f

<b>EKONOMI RIIL</b>									
Perubahan persentase tahunan, kecuali disebutkan lain									
PDB Riil	6,0	5,6	5,0	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3
GDI Per Kapita (Metode Atlas USD)	3.599	3.759	3.654	3.515	3.514	..	..	..	..
Kontribusi pertumbuhan PDB (ppt):									
Konsumsi	3,1	3,0	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9
Investasi	2,9	1,6	1,4	1,6	1,4	2,0	2,1	2,3	2,4
Ekspor netto	-1,5	0,6	-0,2	0,9	0,2	0,3	-0,5	-0,3	-0,2
Impor (pertumbuhan riil)	8,0	1,9	2,1	-6,2	-2,4	8,1	9,5	8,7	8,5
Ekspor (pertumbuhan riil)	1,6	4,2	1,1	-2,1	-1,6	9,1	6,5	6,8	7,0
Angka pengangguran (definisi ILO)	6,1	6,2	5,9	6,2	5,6	5,5	3,9	3,4	2,9
Deflator PDB (rata-rata)	3,8	5,0	5,4	4,0	2,5	4,2	0,5	4,9	5,7
CPI (rata-rata)	4,0	6,4	6,4	6,4	3,5	3,8	3,4	3,7	3,7
<b>REKENING FISKAL*</b>									
Persentase dari PDB									
Belanja	17,3	17,3	16,8	15,7	15,0	14,8	14,6	14,7	14,8
Pendapatan	15,5	15,1	14,7	13,1	12,5	12,3	12,6	12,8	12,8
Saldo Umum Pemerintah	-1,8	-2,2	-2,1	-2,6	-2,5	-2,5	-2,1	-1,8	-2,0
Utang Umum Pemerintah	22,9	24,8	24,7	27,0	27,9	29,4	28,8	28,9	29,0
<b>REKENING MONETER TERTENTU</b>									
Perubahan persentase tahunan									
Uang Primer/Base Money (M2)	15,0	12,8	11,9	9,0	10,0	8,3	10,7	8,9	7,6
Kredit kepada non-pemerintah (eop)	22,4	22,1	14,2	..	..	..	..	..	..
Bunga (suku bunga acuan utama), eop**	5,8	7,5	7,8	7,5	4,6	3,3	..	..	..
<b>NERACA PEMBAYARAN</b>									
Persentase dari PDB, kecuali disebutkan lain									
Neraca Transaksi Berjalan	-2,7	-3,2	-3,1	-2,0	-1,8	-1,7	-2,4	-2,3	-2,4
Impor	23,2	23,2	22,7	19,3	17,1	18,0	20,0	20,8	21,4
Ekspor	23,0	22,5	22,3	19,9	18,0	19,1	20,5	21,2	21,7
Investasi Langsung (net, US\$ miliar)	13,7	12,2	14,7	10,7	16,1	19,2	19,4	23,2	27,9
Cadangan Bruto (US\$ juta, eop)	112,8	99,4	111,9	105,9	116,4	130,2	114,6	108,8	106,7
Nilai impor bulanan (barang)	7,7	7,1	9,9	9,8	9,3	9,7	8,0	7,1	..
% dari utang jangka pendek eksternal	206,4	176,6	188,8	190,9	212,7	237,5	..	..	..
Utang Eksternal	27,5	29,1	32,9	36,1	34,3	34,8	..	..	..
Nilai Tukar Perdagangan (indeks 2015=100)	102,1	98,2	99,4	100,0	101,4	102,5	102,1	102,9	103,9
Nilai Tukar (rata-rata) Rp /US\$	9387	10.461	11.865	13.389	13.308	13.381	..	..	..
<b>ITEM MEMO</b>									
PDB nominal (dalam miliar US\$)	918	913	891	861	932	1.016	1.018	1.110	1.216

Catatan: Dengan menggunakan PDB yang direvisi dan PDB 2010 yang ditetapkan ulang, \*Rekening fiskal untuk 2018-2020 adalah hasil proyeksi staf Bank Dunia. \*\*Bank Indonesia memperkuat operasi moneter dengan menerapkan suku bunga acuan baru yang disebut BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, berlaku sejak 19 Agustus 2016.

Sumber: BPS; Kementerian Keuangan; BI; Proyeksi staf Bank Dunia untuk 2018-2020.









**WORLD BANK GROUP**